



JURNAL MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Journal of Regional Development Management

Volume 10 Nomor 2, November 2018

**OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Ika Aprilia, Yusman Syaukat, dan A Faroby Falatehan

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-
LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN**

Anik Juniastuti, A Faroby Falatehan, dan Pudji Muljono

**STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PADA SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

Feby Kurnia, Ma'mun Sarma, dan Dwi Rachmina

**STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR**

Judo Satria, A. Faroby Falatehan, dan Irfan Syauqi Beik

**STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Enditya Luhur Raharja, Lukman M Baga, dan A Faroby Falatehan

**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH EKONOMI KABUPATEN
BANGKALAN**

Ahmad Herlyasa Sosro Pratama, Ernan Rustiadi, dan Yusman Syaukat

**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PERTANIAN LAHAN
KERING DI JAWA BARAT**

Yusman Syaukat, A Faroby Falatehan, Nizar Nasrullah dan Arini Hardjanto

**ANALISIS DAMPAK EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR
DENGAN PENDEKATAN *INPUT OUTPUT ANALYSIS***

Syarief Gerald Prasetya dan Yustiana Wardhani



Kerjasama

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) IPB
Perhimpunan Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)

Jurnal MPD. Volume 10 Nomor 2, November 2018

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Ec

(Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor)

Dewan Redaksi

Ketua : Dr. Ir. Lukman M Baga, MA.Ec
Anggota : Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME
Hendra Khaerizal, SP, M.Si

Reviewer Internal

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS
Prof. Dr. Ir. Yusman Syaikat, M.Ec
Prof. Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS
Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS
Dr. Ir. Ernan Rustadi, M.Agr
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec
Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc
Dr. Ir. Abdul Kohar Irwanto, M.Sc
Dr. Ir. Ekawati S Wahyuni, MS
Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si
Dr. Ir. M'mun Sarma, MS, M.Si
Dr. Nia Kurniawati, SP, M.Si
Dr. Nuva, SP, M.Si

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MSc
Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc
Dr. Ir. H. M. Ikhwanudin Mawardi, Msc
Dr. Ir. Sugeng Budiharsono

Redaksi Pelaksana

Fieta Resnia Handayani, A.Md
Dhini Fajri, A.Md

Alamat Redaksi

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Wing 5 Level 4, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.
Tlp/Fax: +62-251-862-9342. Mobile: +62-812-82-744-530
Website : <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd>
E-mail: jurnalmpd@apps.ipb.ac.id

ARTIKEL

- OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**
Ika Aprilia, Yusman Syaukat, dan A Faroby Falatehan 1 - 17
- STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN**
Anik Juniastuti, A Faroby Falatehan, dan Pudji Muljono 18 - 32
- STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
Feby Kurnia, Ma'mun Sarma, dan Dwi Rachmina 33 - 47
- STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR**
Judo Satria, A. Faroby Falatehan, dan Irfan Syauqi Beik 48 - 59
- STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR**
Enditya Luhur Raharja, Lukman M Baga, dan A Faroby Falatehan 60 - 75
- STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH EKONOMI KABUPATEN BANGKALAN**
Ahmad Herlyasa Sosro Pratama, Ernan Rustiadi, dan Yusman Syaukat 76 - 90
- STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PERTANIAN LAHAN KERING DI JAWA BARAT**
Yusman Syaukat, A Faroby Falatehan, Nizar Nasrullah dan Arini Hardjanto 91-99
- ANALISIS DAMPAK EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN INPUT OUTPUT ANALYSIS**
Syarief Gerald Prasetya dan Yustiana Wardhani 100-119

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) adalah media ilmiah penyebaran utama hasil-hasil penelitian sosial - ekonomi dalam lingkup pembangunan daerah dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pemberi informasi bagi pengambil kebijakan, praktisi dan pemerhati pembangunan daerah. Jurnal MPD terbit perdana April 2009, Jurnal MPD diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Program studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB bekerjasama dengan Perhimpunan Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

*Optimization of Fix Asset Management in Achieving Good Governance at The Province
of DKI Jakarta*

Ika Aprilia¹, Yusman Syaukat², A Faroby Falatehan²

¹ Staff Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). E-mail : ikapriaku@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB.
E-mail : ysyaukat@gmail.com, affalatehan@gmail.com

ABSTRACT

Local autonomy means that local governments are given freedom of action to manage and develop their own regions according to their each condition, characters and potency. The core of local autonomy is democratization and empowerment. It is expected that the emerging democratization brings good governance into reality including good governance, both on the management of local finance and local assets. Assets or the active is one of components in the Local Government Financial Report, in which the greatest sub component is fixed assets. Therefore, good governance on fixed assets will support the efforts that have been made by the Province of DKI Jakarta to realize the good governance. Management of assets or items own by local authorities, according to Permendagri Nomor 19 tahun 2016, consists of several stages that can be classified into four managerial functions, which are planning, organizing, mobilizing or executing and controlling and monitoring. This study utilized primary and secondary data using an analysis method of gap analysis and qualitative description. Results of the study indicated that there was still a "partial gap" for each managerial function in asset management. All managerial functions had been executed moderately well in the asset management; however, the functions should be optimized further to be consistent with the prevailing laws. Based on the gap analysis, the causes of the weaknesses of asset management and the strategy move to overcome the weaknesses in the management of the most needed assets currently in the Province of DKI Jakarta.

Key Words: Managerial Function, Gap Analysis and Optimizing Asset Management Strategy

ABSTRAK

Otonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan *good governance*, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan *good governance*. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode analisis adalah gap analisis dan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil masih ada "*partial gap*" untuk setiap fungsi manajerial pengelolaan aset. Semua fungsi manajerial telah dijalankan dengan cukup baik dalam pengelolaan aset, namun masih perlu dioptimalkan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis gap diperoleh penyebab kelemahan pengelolaan aset sekaligus langkah strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan aset yang paling dibutuhkan saat ini di Pemprov DKI Jakarta.

Kata Kunci: Fungsi Manajerial, Gap Analisis, Dan Strategi Optimalisasi Manajemen Aset



PENDAHULUAN

Gerakan reformasi pada tahun 1998 salah satunya berdampak pada lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir perubahan paradig pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta dapat mencegah disintegrasi bangsa. Pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai landasan hukum pemerintahan daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada kecenderungan beberapa pandangan skeptis masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah daerah. Masyarakat masih menangkap bahwa pengelolaan daerah masih belum dilakukan secara akuntabel dan *bad governance*. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi perhatian utama oleh masyarakat terhadap cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan konsep *good governance* hadir untuk menampilkan susunan organisasi pemerintahan yang sederhana, agenda kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan yang jelas, kewenangan yang seimbang, personel yang profesional, prosedur pelayanan publik yang efisien, kelembagaan pengawasan yang mantap dan sistem pertanggungjawaban yang tegas. Semangat dalam menciptakan tata kelola yang baik sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen kuat

untuk membangun keuangan negara/daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Itjen DepAg, 2007). Penerapan prinsip *good governance* diantaranya dilakukan melalui pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel. Untuk pemerintah daerah, sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, bahwa pelaksanaan desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Oleh karena itu menjadi sangat bagi pemerintah daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal (Hidayat 2012). Selain itu manajemen aset atau pengelolaan aset menjadi sesuatu yang penting dari keseluruhan komponen pengelolaan pemerintah daerah karena aset memiliki peran strategis di dalam sebuah organisasi. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah serta merupakan komponen yang dominan dari total aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

Pengelolaan keuangan daerah setiap tahun dua kali akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK selaku auditor ekstern pemerintah. Dalam melakukan kegiatan audit laporan keuangan pemerintah daerah, BPK akan melakukan audit hingga ke tingkat SKPD, guna melihat kewajaran penyajian laporan keuangan SKPD. Permasalahan pengelolaan aset daerah hampir menjadi faktor penyebab terganjalnya pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit laporan keuangan oleh BPK. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta,

provinsi dengan APBD terbesar dan memiliki nilai aset tetap terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun anggaran 2013 dan 2014) “hanya” mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan paragraf penjelas. Perubahan opini BPK yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir, salah satu catatan penting penyebabnya adalah masalah pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta, meskipun

selama beberapa tahun terakhir pengelolaan aset tetap sudah mulai mengalami perbaikan. Perhatian dan upaya yang maksimal sangat diperlukan untuk membenahi pengelolaan aset tetap, mengingat besarnya jumlah nilai aset tetap yang harus dikelola. Tabel 1 memperlihatkan jumlah nilai aset tetap Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai tahun 2015.

Tabel 1 Jumlah aset tetap Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2015

Tahun	Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah Aset Tetap (Rp)
2011	335.07 triliun	-	335.07 triliun
2012	342.28 triliun	-	342.28 triliun
2013	332.88 triliun	-	332.88 triliun
2014	341.98 triliun	-	341.98 triliun
2015	363.58 triliun	(29.18 triliun)	334.40 triliun

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2011-2015

Kesemua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dicatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan juga laporan-laporan BMD lainnya sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperoleh dari APBD, hibah atau sumbangan dari masyarakat, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Perkembangan jumlah total aset tetap setiap tahun di Provinsi DKI Jakarta naik setiap tahunnya, khususnya di tahun 2015 Pemda Provinsi DKI Jakarta mulai

menerapkan akuntansi basis akrual sehingga di tahun ini mulai menghitung penyusutan atas aset tetap.

Siagian (2012) menjelaskan bahwa manajemen adalah pengelolaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi organik manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian. Kelima fungsi manajerial lebih sering dikenal dengan fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating and controlling*). Demikian halnya dalam pengelolaan aset tetap daerah, tahapan-tahapan yang ada mencerminkan keempat fungsi manajemen organisasi. Setiap tahapan pengelolaan saling berkaitan yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Semakin kuat koordinasi antar tiap tahapan, akan semakin baik pengelolaan aset di suatu pemerintah daerah.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta BPAD yang melaksanakan tugas koordinator pengelolaan aset daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait.

Responden terdiri dari pengurus barang/pejabat yang ditunjuk pengurus barang di 45 SKPD/UKPD/UPB dan *expert responden* yang memahami pengelolaan keuangan dan aset di Pemprov DKI Jakarta dan dipilih secara *purposive sampling*. Pemilihan responden berdasarkan pertimbangan bahwa responden merupakan pejabat yang bertugas melakukan penyusunan laporan BMD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 19. Data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 – 2015, dokumen serta regulasi terkait dan relevan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan untuk sesuai dengan urutan tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Analisis Gap dan (2) deskripsi kualitatif.

Metode *gap analysis* akan membandingkan kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang sedang dijalankan (Bappenas, 2009). Metode perbandingan dalam penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya program atau

kegiatan dijalankan menurut ketentuan yang berlaku, dengan realisasi pelaksanaan program atau kegiatan yang beralngsung selama ini di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan aset tetapnya. Metode kedua yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini, selain masih berkesinambungan dengan hasil metode *gap analysis*, juga diperoleh melalui studi pustaka dan deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu subyek (Furchan, 1992). Untuk mengidentifikasi faktor kelemahan dan kekuatan yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelaporan BMD peneliti melakukan wawancara terhadap *expert responden* dalam pengelolaan keuangan dan aset serta yang kompatibel dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan aset di Pemprov DKI Jakarta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Analisis ini menjelaskan persepsi responden terhadap realisasi pengelolaan aset dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan atau sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap wawancara dan kuesioner terhadap 45 responden diperoleh jawaban masing-masing tahapan pengelolaan BMD dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Analisis GAP

Tahapan	Jumlah sub komponen	Persentase Simpulan		
		<i>Fit</i>	<i>Partial</i>	<i>Gap</i>
Perencanaan	6	33.33	33.33	33.33
Pengorganisasian	5	60	20	20
Pelaksanaan	23	30.43	47.83	21.74
Pengendalian	4	50	25	25
Total rata-rata		43.44	31.54	25.02

Dari Tabel 2, jika kondisi yang diinginkan adalah pada kondisi *fit*, sedangkan kondisi yang belum sesuai adalah gabungan kondisi *partial* dan *gap*, maka dapat disimpulkan dari persepsi responden bahwa tahap pelaksanaan merupakan tahap yang memiliki kesenjangan paling besar. Kesenjangan tahap pelaksanaan berbeda sedikit dengan kesenjangan pada tahap perencanaan, artinya bahwa tahap pelaksanaan dan tahap perencanaan adalah dua tahap yang berkaitan paling erat serta tahap yang saling menentukan satu sama lain. Tahap selanjutnya yang memiliki kesenjangan cukup besar adalah tahap pengendalian dan tahap pengorganisasian. Semakin besar nilai *partial* dan *gap*, maka kondisi yang sedang berjalan semakin belum sesuai dengan ketentuan. Gambaran mengenai perbandingan kondisi yang dilaksanakan dengan kondisi yang diinginkan untuk beberapa sub komponen dalam setiap tahap pengelolaan aset seperti tersaji di dalam Lampiran 1.

Faktor-faktor Kelemahan Pengelolaan Aset di Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis gap terhadap pengelolaan BMD, yaitu pada fungsi manajerial perencanaan, penyebab masih terjadinya kesenjangan adalah kekurangpahaman dari pihak BPAD Pemprov DKI Jakarta mengenai dokumen pendukung yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan aset, serta kurangnya sinkronisasi sistem perencanaan kebutuhan aset dengan

sistem perencanaan anggaran secara umum.

Fungsi pengorganisasian masih belum optimal dilaksanakan karena struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, banyaknya UKPD/ UPB yang ada, serta dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Dinamika organisasi memberikan dampak terhadap pola saluran informasi komunikasi dan kebijakan organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan aset.

Kesenjangan yang terdapat pada fungsi pelaksanaan disebabkan karena pengamanan hukum dan fisik aset yang masih lemah, belum adanya sistem informasi aset yang konsisten selama sepuluh tahun terakhir, lemahnya pendokumentasian atas kepemilikan aset, proses penerbitan SK Penghapusan aset yang memakan waktu yang lama, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani aset, baik di BPAD maupun di SKPD/UKPD/UPB.

Fungsi pengendalian masih terjadi kesenjangan disebabkan oleh kurangnya dukungan serta komitmen secara nyata dari Kepala SKPD/ UKPD/ UPB terhadap pengelolaan aset di lingkungan unit kerjanya. Dukungan dari Kepala unit kerja sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengurus barang dalam mengelola aset yang menjadi kewenangan unit kerjanya. Dukungan pimpinan memberikan pengaruh pada motivasi pengurus barang untuk menjalankan tugas pengelolaan aset secara tertib dan

penuh tanggung jawab. Demikian juga dukungan dan komitmen yang tinggi dari Gubernur dalam mendukung pengelolaan aset sangat dibutuhkan. Bentuk dukungan berupa pembuatan peraturan gubernur yang menjamin pengelolaan aset adalah bagian penting dari manajemen pemerintah daerah, SK Gubernur pengangkatan pengurus barang pembantu di tingkat UPB, percepatan proses penghapusan aset dengan batasan-batasan nilai tertentu dan klasifikasi tertentu, serta peraturan daerah atau peraturan gubernur lainnya yang mendukung lancarnya pengelolaan aset daerah.

Optimisasi Manajemen Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta

Kesenjangan yang terdapat di setiap fungsi manajemen aset tetap menghambat pengelolaan pemerintahan yang baik di Pemprov DKI Jakarta. Upaya-upaya perlu dilakukan agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan

secara lebih efektif efisien, transparan, responsif dan merata bagi kepentingan masyarakat umum, dijalankan penuh integritas dan professional serta berakuntabilitas. Pada akhirnya jika upaya tersebut dapat dijalankan maka manajemen aset tetap akan mencapai titik optimum dalam pelaksanaannya, yaitu memberikan kepuasan tertinggi bagi masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintah daerah serta mendapatkan penilaian tertinggi dari sisi pengawasan, yang menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah di Pemprov DKI Jakarta telah dijalankan secara *good and clean governance*. Langkah strategis yang ditentukan dengan memperhatikan penyebab kesenjangan pada setiap fungsi manajemen serta diharapkan dapat meminimalisir terulangnya kondisi yang menyebabkan kesenjangan sebelumnya. Upaya strategis untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Upaya Strategis Optimisasi Manajemen Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta

Fungsi Manajemen Dan Penyebab Kesenjangan	Upaya Strategis	Rencana Jangka Waktu	Aktor
1. Perencanaan a. Belum sinkronnya sistem perencanaan kebutuhan aset dengan perencanaan program kegiatan pemda secara umum. b. Kurangnya pemahaman BPAD sebagai SKPD koordinator dalam hal perencanaan kebutuhan aset yang memberikan dampak pada pengelolaan aset.	Membangun sistem informasi aset yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aset serta terintegrasi dengan sistem informasi keuangan akuntansi dan <i>e-budgeting</i> 1) Penambahan personil di BPAD yang memahami proses perencanaan, keuangan akuntansi serta pengendalian internal 2) Peningkatan kapabilitas SDM di BPAD 3) Melakukan studi banding dengan sistem BMN yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.	1-2 tahun	BPAD Bappeda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		1 tahun	BKD
			Diklat Aset minimal 1 tahun 2x 3 bulan

Fungsi Manajemen Dan Penyebab Kesenjangan	Upaya Strategis	Rencana Jangka Waktu	Aktor
<p>2. Pengorganisasian</p> <p>a. Banyaknya SKPD/UKPD/UPB</p> <p>b. Dinamika pergantian kepala daerah</p>	<p>Menginventarisir jumlah UPB secara pasti dan up to date serta menuangkannya ke dalam Peraturan Gubernur termasuk alur pertanggungjawaban aset.</p> <p>Merumuskan suatu peraturan daerah mengenai sistem tata kerja organisasi pengelola aset yang dapat mengantisipasi terjadinya pergantian Gubernur</p>	<p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p>	<p>BPAD dan SKPD</p> <p>PAD, BPKD, DPRD dan Pimpinan Daerah</p>
<p>3. Pelaksanaan</p> <p>a. Pengamanan hukum dan fisik aset yang masih lemah</p> <p>b. Belum adanya sistem informasi aset yang konsisten selama lima sampai sepuluh tahun terakhir.</p> <p>c. Proses penghapusan yang lama</p>	<p>1) Inventarisasi dokumen kepemilikan aset dengan memperhatikan status masing-masing aset</p> <p>2) Membangun sistem informasi dokumen kepemilikan aset</p> <p>3) Meningkatkan legalitas aset-aset yang dimiliki</p> <p>4) Menginventarisir aset yang belum diamankan secara fisik seperti pemasangan batas kepemilikan, plang kepemilikan aset, labeling pada fisik aset</p> <p>Membangun sistem informasi aset yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aset serta terintegrasi dengan sistem informasi keuangan akuntansi dan e-budgeting</p> <p>1) Membuat kebijakan daerah yang mengatur mengenai penghapusan aset dengan batasan nilai tertentu dan klasifikasi tertentu tanpa bertentangan dengan aturan di atasnya.</p> <p>1) Penambahan personil pengelola aset di BPAD dan SKPD/UKPD/UPB</p> <p>2) Peningkatan kapabilitas SDM pengelola aset di</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun simultan dengan inventarisasi</p> <p>1-2 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1-2 tahun</p> <p>6 bulan</p>	<p>BPAD dan SKPD</p> <p>BPAD dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik BPAD dan Biro Hukum</p> <p>BPAD dan SKPD</p> <p>BPAD dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p> <p>BPAD, BPKD, Sekretariat Daerah</p>



Fungsi Manajemen Dan Penyebab Kesenjangan	Upaya Strategis	Rencana Jangka Waktu	Aktor
d. Keterbatasan SDM pengelola aset	BPAD dan SKPD/UKPD/UPB	1-3 tahun Diklat aset 1 tahun 4x	BKD BPAD, SKPD/UKPD/UPB dan Badan Pengembangan SDM
4. Pengendalian Belum maksimalnya dukungan Kepala Unit Kerja dan Pimpinan Daerah terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan aset	Membuat pakta integritas serta sanksi bagi Kepala Unit Kerja yang lalai melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset unit kerjanya	1 bulan	Kepala SKPD/UKPD/UPB dan Gubernur

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan aset tetap merupakan cerminan dari empat fungsi manajerial pengelolaan barang milik daerah, yang di masing-masing fungsinya masih terdapat kesenjangan antara kondisi yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI dengan kondisi yang diinginkan yaitu sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.
2. Penyebab terjadinya kesenjangan di setiap fungsi atau tahapan secara umum disebabkan oleh belum konsistennya sistem aset dan masih lemahnya pendokumentasian kepemilikan aset, dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh tahun terakhir, serta banyaknya SKPD/UKPD/UPB.
3. Upaya strategis perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih tertib, profesional,

transparan, partisipatif dan responsif serta berakuntabilitas.

Saran

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran antara lain:

1. Memperkuat sistem informasi aset yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aset, *friendly user*, konsisten, terintegrasi dengan sistem keuangan akuntansi serta dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi para manajemen
2. Melakukan inventarisasi dokumen kepemilikan aset, khususnya tanah dan bangunan, meningkatkan legalitas dokumen kepemilikan serta membangun dan mengembangkan sistem aset khusus untuk dokumen kepemilikan aset
3. Melakukan penguatan sumber daya manusia pengelola barang di tingkat SKPD/UKPD/UPB secara terus menerus serta meningkatkan dukungan para pimpinan daerah dari tingkat UPB hingga Gubernur kepada pelaksanaan tugas para pengelola barang.

DAFTAR PUSTAKA

- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. Jakarta (ID): BAPPENAS
- Departemen Agama. 2007. Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan. Jakarta (ID): Itjen Departemen Agama
- Furchan A. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya (ID): Usaha Nasional
- Hidayat M. 2012. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Jogjakarta (ID): LaksBang PRESSindo
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan *BMD*. Jakarta (ID). Dirjen Peraturan PerUUan KemenkumHAM.
- Sekretariat Negara. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta (ID). Sekneg
- Siagian SP. 2012. Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara



Lampiran 1. Hasil Analisis GAP pengelolaan Aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>1. Perencanaan</p> <p>a. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada</p> <p>b. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana (Renja) SKPD ditetapkan.</p> <p>c. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD untuk pengusulan anggaran</p> <p>d. Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada Renja SKPD.</p> <p>e. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan rencana kebutuhan pengadaan BMD dengan berpedoman pada standar harga, standar barang dan standar kebutuhan.</p> <p>f. Rencana kebutuhan barang dituangkan ke dalam dokumen RKBMD mulai dari Kuasa Pengguna Barang yang dihimpun oleh Pengguna Barang dan ditetapkan oleh Pengelola Barang sebagai dasar penyusunan RKA SKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan.</p>	<p>SKPD dan UKPD menyusun perencanaan kebutuhan barang berdasarkan kebutuhan unit kerja masing-masing, akan tetapi di dalam proses pembahasan perencanaan seringkali terdapat perubahan usulan dengan realisasi, dan perubahan ini yang seringkali kurang terinformasikan sampai kepada yang mengusulkan.</p> <p>Perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah Renja SKPD ditetapkan</p> <p>Salah satu dasar bagi SKPD untuk mengusulkan anggaran adalah perencanaan kebutuhan barang, selain ketersediaan plafon anggaran dan kesesuaian program kegiatan dengan unit kerja di atasnya.</p> <p>Perencanaan kebutuhan barang mengacu pada Renja SKPD untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian program kegiatan di tingkat Provinsi</p> <p>Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang telah mengusulkan rencana kebutuhan barang dengan mengacu pada standar harga, standar barang dan standar kebutuhan.</p> <p>Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang belum menuangkan rencana kebutuhan barang unit kerjanya ke dalam dokumen RKBMD sesuai Permendagri 19 tahun 2016</p>	<p><i>Partial</i></p> <p>Fit</p> <p>Fit</p> <p>Fit</p> <p>Fit</p> <p>Fit</p> <p>Gap</p>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>2. Pengorganisasian</p>		
<p>a. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota</p>	<p>Surat Keputusan Gubernur yang atas Kepala SKPD/ UKPD sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sekaligus sebagai Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>Fit</p>
<p>b. Pengurus barang dan pengurus barang pembantu telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur atas usul Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>Sampai dengan saat ini Gubernur telah menerbitkan 2 surat keputusan tentang pengangkatan pengurus barang dan pengurus barang pembantu sebanyak 719 orang. Akan tetapi di Pemprov DKI Jakarta, ada satuan kerja pengelola barang di bawah UKPD yaitu UPB yang memiliki personil dengan tugas yang sama dengan Pengurus Barang. Personil ini yang belum ditetapkan dengan SK Gubernur, baru sebatas SK Walikota atau SK Kepala Dinas.</p>	<p>Partial</p>
<p>c. Alur pertanggung-jawaban pengelolaan aset jelas dan efektif.</p>	<p>Terdapat unit kerja suku dinas di tingkat kota/ kabupaten administratif, yang merupakan perpanjangan tugas pokok dan fungsi Dinas (Provinsi) di wilayah. Khusus untuk Dinas Pendidikan, di tingkat kota/ kabupaten ada 2 Suku Dinas Pendidikan, dan dibawahnya lagi terdapat sekolah-sekolah.</p>	<p>Partial</p>
<p>d. Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>	<p>Namun demikian, pengurus barang di tingkat satuan pelaksana pelayanan yang diangkat dan ditetapkan dengan SK Walikota/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan belum mendapatkan insentif</p>	<p>Partial</p>
<p>e. Saluran informasi dan komunikasi mengenai pengelolaan aset dirancang dan dibuat untuk memberi kemudahan dalam pengendalian</p>	<p>Saluran informasi dan komunikasi yang ada selama ini menggunakan sistem informasi aset dan BPAD sebagai koordinator dan mediator antar Saluran informasi komunikasi antar SKPD masih sangat terbatas, kecuali apabila ada permasalahan aset dan kepentingan pembangunan/pemeliharaan</p>	<p>Partial</p>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>3. Pelaksanaan</p> <p>a. Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya.</p> <p>c. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur.</p> <p>d. Laporan hasil pengadaan yang dibuat terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan tahunan.</p> <p>e. Pengelola barang/ pengguna barang dengan persetujuan Gubernur, telah membuat penetapan dan perjanjian untuk pemanfaatan barang milik daerah</p>	<p>Pengadaan barang di Provinsi DKI Jakarta saat ini tidak lepas kaitannya dengan proses perencanaan penganggaran dengan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i> serta terdapat juga sistem <i>e-catalog</i>. Untuk proses pengadaan barang/ jasa yang menggunakan mekanisme pelelangan/ tender barang dengan nilai di atas 100 milyar dilakukan secara terpusat oleh Badan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta, sedangkan nilai di bawahnya oleh Tim Pengadaan SKPD</p> <p>Pengguna barang/ Kuasa pengguna barang telah membuat laporan pengadaan sebagai bagian dari penatausahaan aset serta untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pengguna barang belum membuat permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah, khususnya selain tanah dan bangunan, kepada Gubernur karena selama ini selama aset yang telah dicatat ke dalam pembukuan SKPD/ UKPD secara otomatis dianggap telah sah untuk digunakan oleh unit kerja yang bersangkutan.</p> <p>Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang telah membuat laporan hasil pengadaan barang di unit kerjanya secara bulanan, semesteran dan tahunan.</p> <p>Provinsi DKI Jakarta telah membuat perjanjian-perjanjian kerjasama untuk jenis-jenis pemanfaatan barang milik daerah, meskipun masih banyak potensi aset milik Pemprov yang belum dibuatkan perjanjian kerjasamanya.</p>	<p><i>Fit</i></p> <p><i>Partial</i></p> <p><i>Partial</i></p> <p><i>Fit</i></p> <p><i>Partial</i></p>

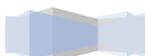
Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>f. Pengelola barang, Pengguna barang dan/ atau Kuasa Pengguna barang telah melakukan pengamanan baik pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, terhadap aset/ barang milik daerah yang menjadi penguasaannya.</p>	<p>Pengamanan aset berupa pengamanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengguna barang/ Kuasa Pengguna barang telah dilakukan atas aset yang menjadi penguasaannya, akan tetapi untuk pengamanan fisik dan hukum sebagian besar menjadi kewenangan BPAD selaku unit kerja koordinasi tingkat Provinsi yang menangani aset. Pengamanan administrasi dilakukan dengan melakukan pencatatan/ pembukuan dan pelaporan atas aset yang dikuasai/ dikelola oleh Pengguna barang dan/ atau Kuasa Pengguna barang. Pengamanan fisik atas aset khususnya tanah dan bangunan berupa pemagaran, pemasangan tanda kepemilikan tanah dan penjagaan atas semua tanah dan bangunan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Pengamanan hukum berupa pensertifikatan atas semua tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta adalah merupakan kewenangan BPAD bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga dengan penyimpanan atas surat kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan bermotor dilaksanakan oleh BPAD. Belum semua Pengguna barang/ Kuasa Pengguna barang memiliki Salinan atas surat kepemilikan tanah, bangunan maupun kendaraan bermotor.</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>g. Kuasa pengguna barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan selanjutnya Pengguna barang akan melakukan penelitian dan membuat Laporan Hasil Penelitian Pemeliharaan Barang.</p>	<p>Saat ini apabila terdapat kegiatan pemeliharaan atas aset tetap yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna barang, maka pencatatan yang dilakukan baru sebatas pada buku besar atau buku register Pengurus barang pembantu, belum dilakukan dengan format yang seragam untuk seluruh unit kerja. Demikian juga Pengguna barang</p>	<p><i>Partial</i></p>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>h. Dalam rangka tertib pemeliharaan, pengurus barang dan pengurus barang pembantu membuat kartu pemeliharaan/ perawatan atas aset.</p>	<p>belum membuat Laporan Hasil penelitian Pemeliharaan Barang.</p> <p>Pengurus barang dan pengurus barang pembantu sampai dengan saat ini baru membuat kartu pemeliharaan/ perawatan atas aset berupa kendaraan bermotor. Untuk aset lainnya, pencatatan pemeliharaan dilakukan pada buku register barang</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>i. Penetapan nilai aset tetap/ barang milik daerah telah dilakukan dengan perpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p>	<p>Penilaian atas aset Pemprov DKI Jakarta telah mengacu pada SAP dan kebijakan akuntansi Provinsi, khususnya yang mengatur masalah kapitalisasi aset.</p>	<p><i>Fit</i></p>
<p>j. Pemindahtanganan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan dilengkapi oleh dokumen pendukung yang memadai.</p>	<p>Pemindahtanganan yang banyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta adalah berupa penjualan, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk aset yang dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan dan penyertaan modal pemerintah daerah telah didukung dengan dokumen yang cukup memadai, namun pemindahtanganan yang berupa hibah belum seluruhnya didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Hibah Aset.</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>k. Pengguna barang membuat permohonan pemusnahan aset atau barang milik daerah kepada Gubernur dan atas persetujuan Gubernur, Pengguna barang melaksanakan pemusnahan barang milik daerah.</p>	<p>Pengguna barang telah membuat permohonan pemusnahan barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang (Sekretaris Daerah), akan tetapi kewenangan untuk pelaksanaan pemusnahan barang ada di BPAD.</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>l. Gubernur menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah atas permohonan pemusnahan yang disetujui.</p>	<p>Gubernur menerbitkan surat persetujuan pemusnahan atas permohonan pemusnahan barang yang disetujui, akan tetapi jangka waktu penerbitan surat persetujuan dengan permohonan selama ini masih banyak yang belum memiliki batas waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan banyak aset yang dikuasai oleh SKPD</p>	<p><i>Partial</i></p>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>m. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah surat persetujuan pemusnahan diterbitkan</p>	<p>namun dalam kondisi rusak berat yang masih terdapat di dalam pencatatan aset SKPD.</p> <p>Pelaksanaan pemusnahan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pihak BPAD dan SKPD pemohon.</p>	<p><i>Fit</i></p>
<p>n. Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna barang membuat permohonan penghapusan aset kepada Gubernur melalui Pengelola barang dan atas dasar surat permohonan yang telah diteliti validitas nya, maka Gubernur melalui Pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan penghapusan aset atau barang milik daerah</p>	<p>Pengguna barang dan/ atau Kuasa pengguna barang selama ini secara periodik telah membuat surat usulan penghapusan atas aset yang tidak dapat lagi digunakan oleh SKPD/ UKPD maupun aset yang tidak lagi dalam kewenangan SKPD/ UKPD yang bersangkutan, akan tetapi proses penelitian permohonan sampai dengan penerbitan persetujuan penghapusan masih memakan waktu yang lama.</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>o. Pengguna barang atau Kuasa Pengguna barang membuat laporan penghapusan barang milik daerah dan membuat Perubahan Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna serta dilaporkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>	<p>Pengguna barang melalui Pengurus barang maupun pengurus barang pembantu selama ini telah membuat laporan penghapusan barang namun tidak membuat Perubahan Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sesuai format yang ada di dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Pencatatan atas perubahan daftar barang karena penghapusan hanya dilakukan dengan cara mengeluarkan kode barang yang telah dihapuskan dari KIB yang telah ada. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran maupun Laporan Tahunan SKPD, aset atau barang milik daerah yang telah dihapuskan akan dicantumkan sebagai mutasi kurang aset tahun berjalan.</p>	<p><i>Partial</i></p>
<p>p. Pengguna barang dan Kuasa Pengguna barang melalui pengurus barang dan pengurus barang pembantu melakukan pencatatan</p>	<p>Pengurus barang dan pengurus barang pembantu telah membuat pencatatan aset atau barang milik daerah yang menjadi kewenangan</p>	<p><i>Fit</i></p>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
<p>atau pembukuan aset atau barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi aset serta membuat Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.</p>	<p>SKPD/ UKPD-nya ke dalam KIB, KIR dan Buku Inventaris. Pencatatan aset di Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem informasi aset.</p>	
<p>q. Pemerintah daerah melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.</p>	<p>Mengacu salah satunya dari hasil sensus BMD 2013, menjadi lebih akurat. Pada kegiatan inventarisasi ini sekaligus juga dilakukan kegiatan labelisasi atau penempelan/pemasangan identitas barang hasil inventarisasi pada fisik barang.</p>	<i>Fit</i>
<p>r. Kuasa Pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna barang, dan Pengguna barang akan menghimpun laporan tersebut sebagai bahan penyusunan laporan keuangan (Neraca) semesteran dan tahunan.</p>	<p>Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan telah dibuat oleh PB/KPB bersamaan dengan proses penginputan mutasi aset pada KIB dengan menggunakan SIA. Dokumen pencatatan dan pelaporan aset menjadi bahan penyusunan Neraca SKPD/ UKPD, sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semesteran dan Tahunan.</p>	<i>Fit</i>
<p>s. Pemerintah daerah mengadakan suatu sistem dan aplikasi yang memadai, konsisten serta memudahkan bagi pengguna (<i>user friendly</i>) dalam melakukan penatausahaan aset dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan ketentuan terbaru, yang sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset.</p>	<p>SIA dikembangkan oleh Dinas Informatika, Komunikasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan BPAD. Sistem e-asset baru digunakan di tahun anggaran 2016 setelah sebelumnya menggunakan sistem <i>excell</i> dan SIMDA BMD yang dikembangkan oleh BPKP.</p>	<i>Partial</i>
<p>4. Pengendalian a. Pengguna barang/ Kuasa Pengguna barang melakukan pengawasan dan pengendalian aset atau barang milik daerah yang menjadi kewenangannya, salah satunya</p>	<p>Belum semua Pengguna barang (Kepala SKPD) atau Kuasa Pengguna barang (Kepala UKPD) atau Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan telah melakukan</p>	<i>Partial</i>

Uraian tahapan dan Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang sedang dijalankan	Degree of fit
melalui pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pengurus barang/ pengurus barang pembantu.	pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pengelolaan aset unit kerjanya.	
b. Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan BPK melakukan audit dan/ atau pengawasan terhadap pengelolaan aset atau barang milik daerah	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, BPKP dan BPK telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP lebih berifat pencegahan (preventif), sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh BPK bersifat audit represif (penindakan) karena BPK merupakan auditor eksternal pemerintah.	<i>Fit</i>
c. BPAD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah, termasuk fungsi pembinaan, sosialisasi dan pengendalian	BPAD telah melaksanakan fungsi koordinator pengelolaan aset daerah, di antaranya melakukan pembinaan sosialisasi mengenai peraturan ketentuan tentang barang milik daerah dan hal lainnya yang terkait pengelolaan aset, akan tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya.	<i>Partial</i>
d. Pemerintah daerah menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagai petunjuk pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan aset atau barang milik daerah yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan mengacu kepada peraturan di atasnya.	Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai Perda/ Pergub yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan BMD	<i>Gap</i>



STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

*The Strategy of Content Quality Improvement for E-Learning on Budget and
Treasury Training Center*

Anik Juniastuti¹, A Faroby Falatehan², Pudji Muljono³

¹ Staf Bagian Keuangan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan.

E-mail: anik.juniastuti@gmail.com

² Staf Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. Email : affalatehan@gmail.com

³ Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Email: skpm@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Content is an important variable in e-learning implementation. Creating the right content, will determine success in learning based on information and communication technology. The results of research in Budget and Treasury Training Center states that e-learning is no more effective than classical, due to the method of delivering inappropriate teaching materials. This research will formulate the strategy of content quality improvement for e-learning on the Budget and Treasury Training Center. First analysis of internal and external factors that determine the quality of e-learning based training content. The analysis was performed using Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrix. The second phase focuses on developing alternative strategies by aligning key internal and external factors. Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) Analytical techniques will get some alternative strategies. Last stage is to set priority strategy using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). This research formulates the strategy of optimization of the training services by creating excellent services of e-learning. The policies were the provision of learning materials in attractive packaging, fulfillment of user needs and user friendly. These policies were outlined in three programs: designing edutainment programs, designing micro learning for learning materials, and providing LMS application of android version.

Key Words: Content Quality, IFE, EFE, SWOT, QSPM

ABSTRAK

Konten merupakan variabel penting dalam implementasi *e-learning*. Membuat konten yang tepat, akan menentukan keberhasilan dalam belajar menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian terkait *e-learning* di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyatakan bahwa diklat dengan metode *e-learning* tidak lebih efektif dibanding dengan metode klasikal. Hal tersebut disebabkan cara penyampaian materi dalam bentuk bahan ajar yang tidak tepat. Penelitian ini akan merumuskan strategi peningkatan kualitas konten diklat berbasis *e-learning* pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu, pertama analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis *e-learning*. Analisis dilakukan menggunakan matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Tahap kedua berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik analisis menggunakan metode *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT) akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Tahap ketiga adalah menetapkan prioritas strategi menggunakan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis *e-learning*. Kebijakan yang ditetapkan adalah penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan *user friendly*. Kebijakan dijabarkan dalam tiga program yaitu merancang program *edutainment*, merancang materi dalam bentuk *micro learning*, dan menyediakan aplikasi LMS versi android.

Kata Kunci: Kualitas Konten, IFE, EFE, SWOT, QSPM

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan, oleh karena itu untuk menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dibutuhkan SDM yang berkualitas. Guna mewujudkan SDM berkualitas perlu dilakukan *Human Capital Investment* (HCI). Tujuan dari HCI adalah mendapatkan SDM yang kompeten pada bidang tugasnya. Pemenuhan kompetensi SDM di lingkup pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).

Kemajuan teknologi menjadikan metode diklat dengan memanfaatkan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Hal ini mendorong institusi pendidikan untuk berinovasi, termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang membuat diklat berbasis teknologi atau yang disebut dengan *e-learning*. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merupakan salah satu pusdiklat di bawah BPPK, pada tahun 2017 menyelenggarakan diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan metode *blended learning*, yaitu kombinasi *e-learning* dan klasikal. Penelitian terkait *e-learning* di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pernah dilakukan oleh Munajatisari (2014) menyatakan bahwa *e-learning* tidak lebih efektif dibanding dengan klasikal, yang disebabkan metode penyampaian materi dalam bentuk bahan ajar yang tidak tepat. Bagian yang sangat penting dalam proses belajar adalah materi pembelajaran (konten). Membuat konten yang tepat, akan sangat menentukan keberhasilan dalam belajar menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan pada ranah konten ini perlu mendapat perhatian yang baik karena konten merupakan variabel penting dalam implementasi *e-learning*. Oleh karena itu penelitian ini ingin merumuskan strategi

yang implementatif dalam upaya meningkatkan kualitas konten diklat berbasis *e-learning* pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis *e-learning*?; dan (2) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk meningkatkan kualitas konten diklat berbasis *e-learning*?. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis *e-learning*; dan (2) Merumuskan strategi peningkatan kualitas konten diklat dalam implementasi *e-learning*.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2017 di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang berlokasi di Jalan Raya Puncak km. 72 Gadog, Ciawi - Bogor. Obyek dipilih karena:

1. Hasil penelitian terkait *e-learning* di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan masih menunjukkan tingkat efektifitas yang masih rendah, dikarenakan permasalahan konten.
2. Pada tahun 2017 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan diklat PBJ dengan metode *blended learning*, yaitu kombinasi *e-learning* dan klasikal.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang



terdiri dari pejabat struktural Bidang Renbang pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, staf dan Widyaiswara yang terlibat dengan proses kegiatan pembelajaran pada diklat PBJ dengan metode *e-learning*. Data sekunder berupa peraturan, pedoman, laporan, kajian terdahulu dan sebagainya yang diperoleh dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan maupun melalui media publikasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis IFE dan EFE untuk mengetahui kekuatan utama, kelemahan utama, peluang utama, dan ancaman utama. Menurut David dan David (2016) dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal keterlibatan perwakilan manajer dan karyawan sangat diperlukan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan, melalui pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi informasi mengenai proses bisnis organisasi. Demikian juga dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal keterlibatan perwakilan manajer dan karyawan sangat diperlukan dalam menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Organisasi sebaiknya merespon secara ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor ini dengan memformulasikan strategi yang dapat memanfaatkan peluang atau meminimalisasi dampak ancaman potensial. Kekuatan dan kelemahan internal bersama dengan peluang dan ancaman eksternal, serta visi dan misi yang jelas, memberikan dasar untuk membangun tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi dibangun dengan keinginan memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan visi dan misi organisasi, serta mereka yang mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Teknik formulasi strategi yang penting

dapat diintegrasikan dalam tiga kerangka kerja pembuatan keputusan, yaitu:

1. Tahap input yaitu formulasi kerangka kerja yang minimal terdiri atas matriks IFE, matriks EFE. Tahap ini meringkas informasi input mendasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi.
2. Tahap pencocokan, berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik tahap ini menggunakan matriks SWOT.
3. Tahap keputusan, melibatkan teknik tunggal QSPM dengan menggunakan informasi input dari tahap 1 secara obyektif mengevaluasi strategi yang diidentifikasi dalam tahap 2. QSPM mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan memberikan dasar yang obyektif dalam memilih strategi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga diklat dituntut memberikan pelayanan kediklatan yang terbaik agar pengguna layanan merasakan kemanfaatan, sehingga diharapkan para lulusan diklat dapat menerapkan ilmunya di tempat kerjanya. Kualitas pembelajaran merupakan hal penting dalam penyelenggaraan diklat karena inti dari proses pembelajaran adalah konten pembelajaran. Konten adalah materi pelajaran yang disampaikan dalam diklat, dan pada diklat berbasis *e-learning* konten juga merupakan sistem aplikasi yang menjadi akses utama peserta diklat. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebagai penyelenggara diklat PBJ dengan metode *blended learning*, yaitu kombinasi *e-learning* dan klasikal, harus mampu menjaga dan meningkatkan kualitas konten diklat. Menurut Chapnick dalam Oketch (2014), salah satu faktor dalam *E-Learning Readiness* (ELR) adalah *content readiness*, dimana komponen dari *content readiness* terdiri dari materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Konten

merupakan bagian penting dalam proses *delivery* materi diklat. Inti dari diklat adalah kesiapan materi yang akan diajarkan kepada peserta. Supaya materi tersebut dapat sampai kepada peserta, dapat difahami oleh peserta, maka cara penyampaian materi atau metode pembelajaran harus menjadi perhatian dalam proses penyelenggaraan diklat. Dalam *e-learning* sebagian atau seluruh proses pembelajaran berbantuan dengan teknologi atau sistem aplikasi. Hernawati dan Aji (2016) menyatakan bahwa konten yaitu berupa format, media dan materi dalam *e-learning*, yang lebih mengarah pada penyediaan aplikasi.

Identifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan kualitas konten diklat berbasis *e-learning* pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan diperoleh melalui wawancara terhadap pejabat struktural, Widyaiswara, dan pelaksana. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat ini akan ditinjau dari sudut pandang organisasi sebagai unit obyek.

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Desain program diklat telah melalui proses validasi.

Salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam pengelolaan diklat adalah validasi program diklat. Target IKU ini adalah program diklat yang mendapat nilai validasi A. Tujuannya adalah untuk menjamin kelayakan program sebelum diklat diselenggarakan. Hal ini diatur dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-006.1/PP/2011 tentang Validasi Program Diklat. Termasuk dalam lingkup penilaian validasi ini adalah ketersediaan dan kelengkapan perangkat diklat yang antara lain meliputi kurikulum, bahan ajar, fasilitator/narasumber/pengajar, dan

kelas. Jadi, proses validasi merupakan upaya BPPK menjaga kualitas diklat termasuk adalah menjaga kualitas konten diklat.

2. Ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten dengan dibuktikan melalui sertifikasi.

Narasumber/pengajar PBJ adalah seseorang yang memiliki/pemegang Sertifikasi Pelatihan untuk Pelatih Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai 6 Widyaiswara yang mengajar pada diklat PBJ dan semuanya telah memiliki sertifikat tersebut. Tugas Widyaiswara ini adalah mendesain program diklat PBJ, menyusun kurikulum dan menyiapkan bahan ajar. Oleh karena itu tenaga pengajar yang kompeten akan menentukan kualitas konten diklat.

3. SDM pengelola diklat yang berkualitas. Nilai-nilai Kementerian Keuangan menjadi landasan perilaku bagi seluruh pegawainya yang meliputi integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sesuai dengan maknanya, nilai atau value merupakan bagian dari falsafah hidup yang diyakini menjadi penentu arah tindakan dan pedoman dalam bersikap dan berperilaku, dan ketika nilai-nilai ini dilakukan terus-menerus maka akan menjadi budaya. Selain itu SDM pengelola diklat juga memiliki tingkat pendidikan yang sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari profil pegawai di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dengan jumlah pegawai 87 orang latar belakang tingkat pendidikan S2 sebanyak 29 orang, S1/D4 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 14 orang, D1 sebanyak 3 orang dan SMA sebanyak 9 orang. Sedangkan untuk tenaga keamanan dan kebersihan diangkat tenaga honorer.



Pengelola diklat menjadi bagian yang turut berperan dalam menentukan kualitas konten diklat. Dukungan yang diberikan antara lain adalah penyediaan infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat. Melihat kondisi tersebut, SDM menjadi kekuatan dalam memberikan kontribusi terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan.

4. Sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan diklat.

Keberhasilan proses pembelajaran juga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu IKU dalam pengelolaan diklat yang mengukur tingkat kepuasan peserta yaitu indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran. Indeks persepsi peserta diklat merupakan penilaian peserta atas kualitas pengajar, kualitas bahan ajar, kualitas metodologi pembelajaran serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana. Dari laporan kinerja BPPK tahun 2016 diketahui bahwa target IKU ini adalah 4 dari skala 5, dan capaian indeksnya adalah 4,36. Artinya upaya yang dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk mensukseskan proses belajar telah dinilai baik oleh pengguna layanan.

Hal ini juga didukung oleh adanya Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-007.1/PP/2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPPK yang harus dipedomani. Terselenggaranya diklat Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode e-learning yang sudah berjalan, tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Sebagai contohnya adalah pembangunan learning management system yang menjadi akses utama proses pembelajaran berbasis e-learning.

5. Koordinasi yang baik dengan unit teknis selaku perancang kebijakan.

Hubungan yang baik dengan unit teknis perancang kebijakan mutlak dilakukan, karena diklat-diklat yang didesain oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sumbernya adalah kebijakan tersebut. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan misalnya dalam hal desain program diklat, kerjasama tenaga ahli dalam pendidikan, bimbingan teknis, dan sebagainya. Koordinasi yang baik terkait dengan kualitas konten diklat karena dalam hal desain program diklat akan berbicara tentang kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, dan sebagainya yang kesemuanya menjadi bagian dari konten diklat. Kerjasama tenaga ahli dalam pendidikan atau bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terkait kebijakan teknis, dan peningkatan wawasan keilmuan dapat dimanfaatkan dalam membuat konten diklat.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Penyelenggaraan diklat dengan metode *e-learning* belum memperoleh *quality assurance* dari lembaga sertifikasi.

Anggraini (2014) menyatakan bahwa manajemen mutu pembelajaran sebagai salah satu strategi manajemen mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentunya didukung oleh konten yang berkualitas. Jika perencanaan kualitas pembelajaran dilakukan dengan baik, maka akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah melakukan tata kelola kediklatan yang baik dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pengelolaan proses bisnis kediklatan. Namun standar manajemen mutu tersebut masih

terbatas pada penyelenggaraan diklat klasikal, dan hingga saat ini belum dilakukan pengembangan manajemen mutu untuk proses diklat berbasis *e-learning*.

2. Adanya pegawai yang resisten terhadap perubahan.

Resistensi terhadap perubahan ini biasanya dikarenakan oleh sebagian orang yang merasa sudah nyaman dengan apa yang selama ini dilakukan, sehingga jika dilakukan perubahan atas kebiasaan tersebut maka akan muncul keengganan untuk berubah. Resistensi ini juga terjadi di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, khususnya bagi mereka yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Padahal kemajuan teknologi menuntut perubahan metode kerja dari yang semula konvensional, masih manual dan lebih banyak pekerjaan klerikal menjadi metode kerja berbasis sistem. Kemajuan teknologi menuntut dinamika kerja yang lebih kreatif dan inovatif, termasuk juga dalam pengelolaan diklat terlebih diklat berbasis *e-learning*. Perkembangan teknologi juga memberikan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan di bidang kediklatan, khususnya terkait dengan konten pembelajaran. Semakin mudahnya akses berbagai informasi dengan berbagai macam bentuk (multimedia) tersedia di dunia maya. Namun jika resistensi terhadap kemajuan teknologi ini masih ada, maka sikap ini akan menjadi penghambat kemajuan organisasi.

3. Bahan ajar interaktif masih sangat kurang.

Penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning* dituntut untuk dapat menyediakan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Upaya yang dilakukan dapat berupa mengalihmediakan materi ke dalam bentuk multimedia. Sebagaimana disampaikan oleh Palupi (2012),

konten *e-learning* pada Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan telah mengalihmediakan seluruh materi menjadi bentuk multimedia, yaitu: teks dengan format pdf, video dengan format flv, presentasi dengan format flash player, audio dengan format MP3, dan presentasi instruktur dengan MS power point.

Kondisi yang ada pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, bahan ajar yang tersedia masih sebatas modul dan bahan tayang berupa *power point*. Hal ini dapat difahami mengingat untuk dapat membuat modul *e-learning* dengan *content* dan *packaging* yang baik memerlukan keahlian khusus serta tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Untuk keperluan itu perlunya ada satu institusi yang secara khusus bertanggung jawab untuk membantu dosen dalam menyiapkan *content* dan *packaging* materi-materi kuliah. Selanjutnya untuk dapat membuat modul *e-learning* yang baik maka pengetahuan dosen yang terkait dengan pedagogik dan aktivitas intruksional harus diberikan terlebih dahulu. Pengetahuan ini akan menjadi modal berharga dalam menyusun materi-materi yang akan dikemas dalam paket *e-learning* (Prayudi 2009). Saat observasi lapangan mendapatkan informasi bahwa secara simultan untuk kelengkapan bahan ajar akan sambil dilakukan penambahan dan perbaikan. Hal ini dilihat sebagai kekurangsiapan penyelenggara diklat.

4. Penugasan terhadap Widyaiswara masih mengalami tumpang tindih.

Widyaiswara adalah jabatan fungsional dalam lingkup PNS di Indonesia. Widyaiswara bekerja hampir sama dengan *trainer* atau fasilitator. Tugasnya adalah mendidik dan melatih PNS agar mampu bekerja dengan baik di bagian masing-masing (Sugandi 2016). Dengan keahlian yang



dimiliki berdasarkan rumpun keilmuannya, sering Widyaiswara diperlukan sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, tidak hanya di dalam institusinya bahkan sering juga diluar institusi. Kadangkala penugasan atau permintaan datang dari pimpinan yang lebih tinggi dan sifatnya wajib, misalnya dari pejabat eselon I atau menteri. Hal seperti ini menjadi penyebab Widyaiswara mendapat tugas ganda pada saat bersamaan, dan harus memilih prioritas sehingga ada yang terpaksa harus dikorbankan. Dan ketika mengajar yang harus dikalahkan, maka hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran.

Banyaknya diklat yang diselenggarakan juga mengakibatkan sebagian besar waktu Widyaiswara digunakan untuk mengajar, sehingga waktu yang digunakan untuk persiapan proses pembelajaran diklat menjadi berkurang. Dengan waktu yang sempit maka dalam mempersiapkan materi belajar, menyusun modul, menyiapkan bahan tayang, membuat materi dalam bentuk multimedia menjadi kurang memperoleh bagian.

5. Jumlah karya ilmiah dan penelitian masih sangat terbatas.

Karya ilmiah dan penelitian tersebut memiliki peranan besar dalam mengembangkan kompetensi keahlian yang bersifat spesialis dan membangun reputasi kepakaran Widyaiswara dan reputasi institusi kediklatan. Dengan mengaplikasikan metodologi riset dalam upaya memperoleh temuan dalam bidang pendidikan, berbagai temuan yang dihasilkan selain dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan saintifik juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan keilmuan melalui

kegiatan penelitian harusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun konten belajar yang baik.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPK 2015-2019, kelemahan yang sekaligus menjadi tantangan yaitu Widyaiswara lebih berfokus pada kegiatan mengajar, sehingga jumlah publikasi karya ilmiah dan penelitian masih terbatas. Disamping juga belum adanya pengelolaan penelitian dan pengembangan (litbang) yang terarah dan mendukung pengembangan kompetensi teknis Widyaiswara dalam bidang keilmuan yang diampu.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Rekomendasi hasil kajian terkait *e-learning* di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Hasil kajian terhadap kinerja organisasi dapat dipergunakan untuk evaluasi, meskipun kajian tersebut dilakukan oleh pihak luar. Terdapat satu kajian terkait *e-learning* di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang menyatakan bahwa diklat berbasis *e-learning* tidak lebih efektif dibandingkan dengan diklat klasikal. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan persiapan konten, yaitu tidak tepatnya penggunaan metode dalam menyampaikan materi. Akibatnya adalah peserta menjadi tidak dapat memahami materi yang diberikan. Untuk materi yang membutuhkan praktek/simulasi, bahan ajar yang tepat misalnya menggunakan animasi, audio maupun video. Namun hal ini belum dilakukan oleh penyelenggara diklat. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan supaya bahan ajar disusun menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran (Munajatisari 2014).

2. Tersedia berbagai program pelatihan/*shortcourse* yang diselenggarakan oleh pihak luar.

Banyak lembaga pelatihan baik dari dalam maupun luar negeri yang memberikan tawaran program dalam bentuk seminar, workshop, *shortcourse*, dan sejenisnya. Hal ini menjadi peluang baik untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi para pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan disesuaikan dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki, sehingga tujuan mereka mengikuti pelatihan adalah mempertajam bidang ilmu yang dikuasai. Investasi dalam ilmu pengetahuan akan menambah kekayaan referensi/perbendaharaan materi yang berguna untuk mendukung proses pembelajaran dalam diklat.

3. Perkembangan yang pesat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta ilmu pengetahuan.

Tidak dapat dielakkan bahwa teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi yang ada saat ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Berbagai kemudahan diberikan kepada pengguna teknologi, efisiensi waktu dan biaya juga dirasakan dengan adanya teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Diklat dengan metode *e-learning* adalah bagian dari pemanfaatan teknologi. Untuk itu dengan kemajuan teknologi, hendaknya sistem pembelajaran yang dibangun harus lebih *user friendly*.

4. Ketersediaan layanan pengembangan LMS dan QC dari Sekretariat BPPK maupun Setjen Kementerian Keuangan.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) sebagai pengelola IT di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan

fungsi layanan TIK tidak hanya untuk unitnya namun juga kepada semua unit di lingkup Kementerian Keuangan. Pengembangan LMS di BPPK dilakukan oleh Sekretariat, sedangkan *quality control* dilaksanakan oleh Pusintek. Melalui sinergi yang baik ini menjadi peluang bagi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk meningkatkan kualitas layanan *e-learning*, khususnya layanan dalam sistem aplikasi pembelajaran.

5. *Potential trainee* sangat banyak untuk program diklat terkait pengelolaan keuangan negara.

Terdapat sekitar 24.000 satker di seluruh wilayah Indonesia ini yang membutuhkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara. Untuk menjangkau mereka tidak mungkin dilakukan secara klasikal. Akan lebih efektif dan efisien jika dibantu dengan *e-learning*. *Potential trainee* yang sangat besar ini menjadi peluang bagi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk memberikan program-program berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) belum sepenuhnya mengakomodir angka kredit bagi Widyaiswara yang melaksanakan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pusat pembinaan Widyaiswara, LAN memiliki tugas diantaranya merumuskan kebijakan untuk jabatan fungsional Widyaiswara termasuk kebijakan penetapan angka kredit. Kenaikan golongan atau kenaikan jabatan Widyaiswara dihitung berdasarkan perolehan angka kredit. Maka, berbagai pengembangan kegiatan diklat yang sudah tentu melibatkan peran besar Widyaiswara sudah selayaknya dapat diakomodir untuk perhitungan angka kredit.

Kekhawatiran yang muncul apabila kegiatan terkait *e-learning* tidak diakomodir, Widyaiswara tidak memiliki interest untuk mengerjakan kegiatan *e-learning* tetapi lebih memilih kegiatan yang menghasilkan angka kredit. Padahal Widyaiswara adalah aktor utama dalam proses pembelajaran baik klasikal maupun *e-learning*.

2. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) masih tergantung pada unit teknis.

Tujuan dilakukannya IKD adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tingkat kompetensi yang diharapkan unit pengguna dengan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh PNS dan CPNS. IKD sekaligus sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kesenjangan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan sikap yang perlu dipenuhi melalui diklat. Hasil dari IKD akan ditindaklanjuti dengan desain program.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.12/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang melakukan IKD adalah unit teknis atau unit pengguna. Hal ini menyebabkan ketergantungan unit pengelola diklat pada unit pengguna atau unit teknis yang melakukan IKD. Kekhawatiran yang muncul apabila ketidaktepatan dalam proses IKD, maka akan berdampak pada ketidaktepatan penyiapan program diklat termasuk ketidaktepatan penyiapan konten belajarnya.

3. Ketergantungan tenaga ahli/praktisi dari unit teknis.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPK bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan pengetahuan/kompetensi khususnya terkait dengan hal teknis terkini yang

diharapkan dari unit pengguna diklat dengan pengetahuan/kompetensi yang dimiliki Widyaiswara di BPPK. Untuk memenuhi kompetensi tertentu yang tidak tersedia dari BPPK, maka yang dilakukan adalah mengundang narasumber yang kompeten, dan biasanya adalah tenaga ahli/praktisi berasal dari unit teknis. Dalam kondisi tertentu kompetensi mereka dibutuhkan tidak hanya pada saat diklat sedang berlangsung, namun tidak jarang mereka turut terlibat sejak merumuskan desain program diklat termasuk konten diklat. Ketergantungan dengan pihak luar tentunya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan proses diklat.

4. Keterbatasan dalam akses LMS.

Diklat berbasis *e-learning* yang dikembangkan BPPK dapat diakses melalui internet. Untuk itu ketersediaan jaringan menjadi syarat mengakses LMS. Kestabilan dan ketersediaan jaringan sangat tergantung oleh pihak luar, dalam hal ini penyediaan kapasitas dilakukan melalui persetujuan Pusintek. Dalam membangun LMS atau pengembangannya dan pada saat dilakukan QC sangat dibutuhkan ketersediaan jaringan untuk mengakses LMS.

Untuk saat ini LMS baru dapat diakses menggunakan personal computer (PC) atau laptop, belum dapat diakses misalnya melalui *smartphone*. Sementara dengan semakin berkembangnya teknologi sangat memungkinkan aplikasi ini tersedia dalam versi android. Pengguna layanan juga akan merasa dimudahkan dan didekatkan jika tersedia dalam versi android.

5. Adanya resistensi peserta diklat terhadap perubahan metode diklat.

Zona nyaman dapat membuat seseorang resisten terhadap perubahan. Demikian halnya dengan adanya

perubahan metode diklat dari yang sepenuhnya klasikal menjadi *blended learning*, dimana metode *blended learning* menghendaki peserta diklat mampu belajar secara mandiri dan kendalinya ada pada peserta. Untuk keperluan evaluasi guna memberikan saran dan masukan penyediaan layanan *e-learning*, evaluator harus berinteraksi dengan perangkat *e-learning*. Evaluator yang memiliki resistensi dengan perubahan metode diklat mungkin tidak akan memberikan masukan atau saran. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bagaimana agar peserta dapat berpartisipasi aktif dalam belajar mandiri tersebut dan memberikan evaluasi yang tepat serta memberikan saran perbaikan.

Seluruh faktor tersebut selanjutnya dituangkan dalam kuesioner untuk diberikan bobot dan peringkat (*rating*) oleh responden. Analisis dilakukan menggunakan Matriks IFE dan EFE. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor internal.

Tabel 1 Hasil Penilaian Responden Terhadap Faktor-Faktor Internal

No	Faktor Sragetis Internal	Bobot	Rating	Skor
<u>Kekuatan (Strengths)</u>				
1	Desain program diklat telah melalui proses validasi	0,137	3,60	0,492
2	Ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten dengan dibuktikan melalui sertifikasi	0,114	3,40	0,389
3	SDM pengelola diklat yang berkualitas	0,097	3,20	0,309
4	Sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan diklat	0,099	3,60	0,356
5	Koordinasi yang baik dengan unit teknis selaku perancang kebijakan	0,103	3,40	0,351
Total				1,898
<u>Kelemahan (Weaknesses)</u>				
1	Penyelenggaraan diklat dengan metode <i>e-learning</i> belum memperoleh <i>quality assurance</i> dari lembaga sertifikasi	0,064	1,80	0,116
2	Adanya pegawai yang resisten terhadap perubahan	0,071	1,40	0,100
3	Bahan ajar interaktif masih sangat kurang	0,119	2,00	0,238
4	Penugasan terhadap Widyaiswara masih mengalami tumpang tindih	0,091	1,40	0,128
5	Jumlah karya ilmiah dan penelitian masih sangat terbatas	0,104	1,60	0,167
Total				0,748
TOTAL IFE				2,646

Total skor IFE diatas 2,5 mengindikasikan bahwa organisasi memiliki posisi internal yang kuat. Hal ini menunjukkan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memiliki kekuatan internal untuk meningkatkan kualitas konten diklat berbasis *e-learning*. Faktor yang dianggap sebagai kekuatan utama yaitu desain program diklat yang telah melalui proses validasi guna memastikan program tersebut layak untuk

diselenggarakan. Faktor yang dianggap sebagai kelemahan utama adalah bahan ajar interaktif masih sangat kurang.

Total skor EFE sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 menunjukkan hasil lebih besar dari 2,5. Hal tersebut berarti bahwa Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merespon dengan baik terhadap peluang dan ancaman yang ada.



Tabel 2 Hasil Penilaian Responden Terhadap Faktor-Faktor Eksternal

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<u>Peluang (Opportunities)</u>				
1	Rekomendasi hasil kajian terkait <i>e-learning</i> di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	0,097	2,60	0,251
2	Tersedia berbagai program pelatihan/ <i>shortcourse</i> yang diselenggarakan oleh pihak luar	0,134	3,00	0,403
3	Perkembangan yang pesat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta ilmu pengetahuan	0,111	2,80	0,311
4	Ketersediaan layanan pengembangan LMS dan QC dari Sekretariat BPPK maupun Setjen Kementerian Keuangan	0,088	2,40	0,211
5	<i>Potential trainee</i> sangat banyak untuk program diklat terkait pengelolaan keuangan negara	0,116	2,40	0,277
Total				1,454
<u>Ancaman (Threats)</u>				
1	Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) belum sepenuhnya mengakomodir angka kredit bagi Widyaiswara yang melaksanakan aktivitas pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	0,107	3,00	0,320
2	Pelaksanaan IKD masih tergantung pada unit teknis	0,106	2,80	0,296
3	Ketergantungan tenaga ahli/praktisi dari unit teknis	0,126	3,00	0,377
4	Keterbatasan dalam akses LMS	0,061	2,40	0,147
5	Adanya resistensi terhadap perubahan metode diklat	0,056	2,60	0,144
Total				1,283
TOTAL EFE				2,737

Peluang dengan nilai skor tertimbang paling besar yaitu tersedianya berbagai program pelatihan/*shortcourse* yang diselenggarakan oleh pihak luar. Peluang ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pusdiklat dengan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Faktor utama yang dianggap menjadi ancaman yaitu adanya ketergantungan tenaga ahli/praktisi yang berasal dari unit teknis. Dalam kondisi tertentu, ketika tenaga ahli tidak dapat dipenuhi dari internal pusdiklat, maka yang dilakukan adalah mendatangkan tenaga ahli/praktisi dari luar. Hal yang demikian ini tentunya menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain, dimana ketergantungan tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Hal ini menyebabkan pusdiklat tidak memiliki *bargaining position*. Apabila kondisi yang demikian dibiarkan terus-menerus, maka ancaman terhadap keberlangsungan proses pembelajaran (diklat) dapat terganggu.

Perumusan Strategi Peningkatan Kualitas Konten Diklat Berbasis *E-Learning*

Perumusan strategi dilakukan dengan menuangkan faktor-faktor internal dan eksternal ini dalam matriks SWOT. Analisis SWOT sebagaimana Tabel 3 digunakan untuk merumuskan strategi dengan menggabungkan kekuatan dengan peluang, kelemahan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, dan kelemahan dengan ancaman.

Tabel 3 Hasil Analisis SWOT Terhadap Kualitas Konten Diklat Berbasis *E-Learning*

Faktor	Kekuatan/ <i>Strengths</i> (S)	Kelemahan/ <i>Weaknesses</i> (W)
Internal	1. Desain program diklat telah melalui proses validasi	1. Diklat metode <i>e-learning</i> belum memperoleh <i>quality assurance</i> dari lembaga sertifikasi
	2. Tenaga pengajar yang kompeten	2. Resistensi terhadap perubahan
	3. SDM pengelola diklat yang berkualitas	3. Bahan ajar interaktif masih sangat kurang
	4. Sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan diklat	4. Penugasan terhadap Widyaiswara masih mengalami tumpang tindih
	5. Koordinasi yang baik dengan unit teknis selaku perancang kebijakan	5. Jumlah karya ilmiah dan penelitian masih sangat terbatas
Eksternal		
Peluang/<i>Opportunities</i> (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Rekomendasi kajian <i>e-learning</i> di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis <i>e-learning</i> (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5)	2. Penyempurnaan pengelolaan diklat berbasis <i>e-learning</i> melalui penataan proses bisnis (W1, W2, W3, W4, W5, O1, O3, O4)
2. Program pelatihan/ <i>shortcourse</i> yang diselenggarakan pihak luar		
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta ilmu pengetahuan		
4. Ketersediaan layanan pengembangan LMS dan QC dari Sekretariat BPPK maupun Setjen Kementerian Keuangan		
5. <i>Potential trainee</i> sangat banyak untuk program diklat terkait pengelolaan keuangan negara		
Ancaman/<i>Threats</i> (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Kebijakan LAN belum sepenuhnya mengakomodir aktivitas pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	3. Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendorong implementasi <i>e-learning</i> (S2, S3, S5, T1, T2, T3)	4. Penguatan peran Widyaiswara dalam membangun diklat berbasis <i>e-learning</i> sebagai program prioritas unggulan (W3, W4, W5, T2, T3, T4, T5)
2. Pelaksanaan IKD tergantung pada unit teknis		
3. Dukungan tenaga ahli/praktisi dari unit teknis		
4. Keterbatasan dalam akses LMS		
5. Adanya resistensi terhadap perubahan metode diklat		

Hasil analisis SWOT merumuskan empat alternatif strategi, yaitu:

1. Optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis *e-learning*.
2. Penyempurnaan pengelolaan diklat berbasis *e-learning* melalui penataan proses bisnis.

3. Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendorong implementasi *e-learning*.
4. Penguatan peran Widyaiswara dalam membangun diklat berbasis *e-learning* sebagai program prioritas unggulan.

Untuk menentukan strategi prioritas dilakukan dengan menetapkan tingkat daya tarik relatif (*relative attractiveness*) dari keempat alternatif strategi

menggunakan *Attractive Score* (AS). QSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif (David 2012). Analisis QSPM akan menghitung besaran *Total Attractive*

Score (TAS) pada masing-masing alternatif strategi. Nilai TAS tertinggi merupakan strategi prioritas. Tabel 4 menunjukkan hasil penilaian TAS pada QSPM

Tabel 4 Hasil penilaian *Total Attractiveness Score* (TAS) menggunakan QSPM

No	Strategi	TAS
1.	Optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis <i>e-learning</i> .	7,201
2.	Penyempurnaan pengelolaan diklat berbasis <i>e-learning</i> melalui penataan proses bisnis.	6,867
3.	Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendorong implementasi <i>e-learning</i> .	5,697
4.	Penguatan peran Widyaiswara dalam membangun diklat berbasis <i>e-learning</i> sebagai program prioritas unggulan.	6,161

Dengan demikian strategi prioritas yang diperoleh dari penelitian ini yaitu optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis *e-learning*. Dengan ditetapkannya diklat berbasis *e-learning* menjadi layanan unggulan maka seluruh sumber daya akan difokuskan untuk menjadikan *e-learning* sebagai program prioritas atau program unggulan. Strategi prioritas pertama merupakan strategi yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sedangkan ketiga

strategi lainnya dapat diupayakan untuk dilaksanakan diselaraskan dengan strategi prioritas yang ditentukan oleh pengambil kebijakan. Strategi yang mendukung atau mempunyai hubungan timbal balik dengan strategi prioritas dapat pula dilaksanakan secara paralel untuk mendukung pencapaian strategi prioritas. Untuk dapat mengimplementasikan strategi prioritas maka perlu disusun rumusan strategi ke dalam pelaksanaan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Perancangan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
Optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis <i>e-learning</i>	Penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna dan <i>user friendly</i>	1. Merancang program <i>edutainment</i>	1. Menetapkan tema belajar, narasumber, moderator/host 2. Menyusun skrip/naskah 3. Pengambilan gambar/ <i>shooting</i> 4. Menyunting/ <i>Edit</i> 5. <i>Quality Control</i>
		2. Merancang materi belajar dalam bentuk <i>micro learning</i>	1. Mem- <i>breakdown</i> materi diklat dalam kelompok tema yang lebih kecil 2. Menentukan <i>metode delivery</i> 3. Menyusun materi 4. Pengesahan
		3. Menyediakan aplikasi LMS versi android	1. Pemilihan materi belajar 2. Membuat <i>use case diagnosa</i> aplikasi 3. Merancang tampilan layar 4. <i>Quality Assurance</i>

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis IFE menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama adalah desain program diklat yang telah melalui proses validasi, sedangkan faktor kelemahan utama yaitu bahan ajar interaktif yang masih sangat kurang. Hasil analisis EFE menunjukkan bahwa faktor peluang utama adalah tersedia berbagai program pelatihan/*shortcourse* yang diselenggarakan oleh pihak luar, dan faktor ancaman utama yaitu ketergantungan tenaga ahli/praktisi dari unit teknis.
2. Strategi prioritas yang dapat dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk meningkatkan kualitas konten diklat berbasis *e-learning* adalah optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis *e-learning*. Guna menjadikan *e-learning* sebagai produk unggulan, maka kebijakan yang ditetapkan yaitu penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna dan *user friendly*. Kebijakan ini dijabarkan dalam tiga program yaitu merancang program *edutainment*, merancang materi belajar dalam bentuk *micro learning*, dan menyediakan aplikasi LMS versi android.

Saran

1. Meningkatkan kualitas layanan diklat dengan menjadikan *e-learning* sebagai layanan unggulan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

2. Strategi yang dirumuskan akan lebih optimal jika dieskalasi pada level yang lebih tinggi, yaitu oleh BPPK. Dengan demikian diharapkan seluruh unit diklat di bawah BPPK memiliki standar pelayanan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini NI. 2014. Manajemen Mutu Pembelajaran di SMP Negeri 115 Jakarta. *Jurnal Improvement*. Vol 1, Edisi 1.
- [BPPK] Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2011. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-006.1/PP/2011 tentang Validasi Program Diklat.
- [BPPK] Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2011. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-007.1/PP/2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPPK.
- [BPPK] Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2015. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2015-2019.
- David FR. 2012. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*. Sunardi D, Penerjemah; Wuriarti P, editor. Jakarta (ID): Salemba Empat. Terjemahan dari: *Strategic Management*, 12th ed.
- David FR, David FR. 2016. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Puspasari N, Puspitasari LN, Penerjemah; Halim DA, editor. Jakarta (ID): Salemba Empat. Terjemahan dari: *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 15th ed.
- Hernawati E, Aji P. 2016. Perancangan dan Penerapan Konten E-

- Learning melalui Learning Management System dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Studi Kasus pada Mata Kuliah Pemrograman Basis Data. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*. Vol. (2); No. 1.
- [KEMENKEU] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.12/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Munajatisari RR. 2014. Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 10 no. 2. hal 173-185.
- Oketch HA, Njihia JM, Wausi AN. 2014. E-Learning Readiness Assessment Model in Kenyas' Higher Education Institutions: a Case Study of University of Nairobi. *International Journal of Scientific Knowledge*. Vol. (5); No. 6.
- Palupi S. 2012. Analisis dan Desain E-Learning Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan menggunakan Standar Learning Technology System Architecture (IEEE P1484.1). *Tesis*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Prayudi Y. 2009. Kajian Awal: E-Learning Readiness Index (ELRI) sebagai Model bagi Evaluasi E-Learning pada Sebuah Institusi. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Sugandi. 2016. *Selayang Pandang Profesi Widyaiswara*. Jogjakarta (ID): Garudhawaca.

STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

*Strengthening Strategies of Planning and Budgeting on Marine and Fishery Subsector at
Anambas Archipelago Regency*

Feby Kurnia¹, Ma'mun Sarma², Dwi Rachmina³

¹ Staff Kantor Camat Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : febykurnia,mail@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. E-mail : mamun_sarma@yahoo.com

³ Staff Pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. E-mail : dwirachmina@gmail.com

ABSTRACT

The financial condition of the region that continues to experience of fluctuations and the allocation of development funds in the marine and fishery sub-sector which tend to decrease every year become problems that often arise. It requires local governments to be able to determine the right strategy in order to produce appropriate planning and budgeting development that are suitable with the potential of the marine and fisheries sub-sector. The purposes of this research are to analyze the consistency of planning and budgeting formulation, to analyze the implementation of planning and budgeting, and to formulate priority strategies that needed in an effort to strengthen planning and budgeting in marine and fisheries sub-sector in Anambas Achipelago Regency. The method used is using PBCM (Planning and Budgeting Consistency Matrix) analysis, perception analysis using Likert scale, SWOT analysis and QSPM method. The result of the research shows that there are inconsistencies in planning and budgeting as well as the level of implementation of planning and budgeting that are good but still need improvement on human resources competency component. The main priority strategy chosen is the improvement of the quality of the planning apparatus held by the local government through coordination and cooperation between the Governments (local and central) with University.

Keywords: PBCM, Perception Analysis, Planing and Budgeting Implementation, Strengthening Strategies

ABSTRAK

Kondisi keuangan daerah yang terus mengalami fluktuasi serta alokasi dana pembangunan pada subsektor kelautan dan perikanan yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi permasalahan yang kerap timbul. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mampu menentukan strategi yang tepat agar dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi perumusan perencanaan dan penganggaran, menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran serta merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam upaya menguatkan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis Matrik Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), analisis kuesioner menggunakan skala likert, analisis SWOT dan metode QSPM. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat inkonsistensi pada perencanaan dan penganggaran serta tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran tergolong baik namun masih perlu perbaikan pada komponen kompetensi SDM. Strategi prioritas utama yang dipilih adalah peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi perguruan tinggi.

Kata Kunci : Analisis Persepsi, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran, MKPP, Strategi penguatan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari pendapatan serta belanja daerah yang terangkum didalam rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBD dijabarkan secara terperinci kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk masa tertentu, yaitu satu tahun anggaran (Adisasmita 2011). Permasalahan yang kerap ditemukan dalam perencanaan dan penganggaran selain tidak berimbang antara belanja rutin dan pembangunan, adalah ketidaktepatan di dalam mengalokasikan anggaran itu sendiri terhadap sektor-sektor yang seharusnya mendapat prioritas. Ketidaktepatan didalam alokasi anggaran akan menyebabkan inefisiensi, sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan tidak tercapai.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah yang 98 persennya merupakan lautan. Sektor potensial yang dimiliki oleh daerah yaitu dengan kontribusi PDRB tertinggi 22,45 persen adalah sektor kelautan dan perikanan. Sektor tersebut cenderung hanya mendapatkan alokasi anggaran yang kecil dalam APBD yaitu sebesar 1,57 persen pada tahun 2014. Alokasi tersebut bahkan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 1,47 persen (BPS KKA 2016). Tentunya hal ini bertolak belakang dengan visi serta program prioritas daerah yaitu mengkedepankan potensi kelautan dan perikanan dalam

program prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut ditambah dengan penerimaan daerah yang masih cenderung mengalami fluktuasi dan bahkan menurun setiap tahunnya. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk lebih jeli dalam mengalokasikan anggarannya yang semakin terbatas agar tetap dapat menghasilkan kinerja pembangunan yang optimal.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka menjadi penting untuk dikaji bagaimana pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal tersebut juga sebagai langkah mewujudkan visi dan misi daerah dengan mengedepankan pembangunan potensi maritim yang dimiliki khususnya subsektor kelautan dan perikanan. Langkah yang dilakukan dimulai dari melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran serta apa saja yang menjadi kelemahan, kekuatan, ancaman serta peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan subsektor kelautan dan perikanan tersebut. Data tersebut lalu digunakan untuk merumuskan strategi penguatan perencanaan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis konsistensi perumusan perencanaan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) Menganalisis implementasi perencanaan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan (3) Menyusun dan merumuskan strategi yang tepat dalam penguatan perencanaan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau tepatnya pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan merupakan organisasi perangkat daerah yang telah ditentukan sebagai koordinator sektor perikanan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data perencanaan dan penganggaran khususnya subsektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait. Total Responden berjumlah 15 orang yang terdiri dari pejabat dan aparatur fungsional yang menangani perencanaan dan penganggaran yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Aparatur tersebut terdiri dari aparatur perencanaan dana penganggaran yang berada pada Dinas perikanan, pertanian dan pangan, Badan Penelitian Pengembangan Perencanaan Daerah (BALITBANG-PEDA), Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum. Data sekunder diperoleh dari Dokumen perencanaan daerah dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan DPA SKPD tahun 2014-2017, dokumen serta regulasi terkait dan relevan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan sesuai dengan urutan tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Matriks konsistensi perencanaan dan penganggaran (MKPP), (2) analisis persepsi menggunakan skala likert, (3) analisis SWOT serta (4) analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM).

Matriks konsistensi perencanaan dan penganggaran (MKPP) dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi

perencanaan dan penganggaran yang dilakukan (Bastian 2006). MKPP dilakukan dengan cara membandingkan konsistensi program, kegiatan serta anggaran yang diakomodir pada setiap tahapan perencanaan dari RPJM hingga DPA. Skala likert digunakan untuk menganalisis persepsi responden terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran yang meliputi komponen kompetensi SDM, sistem administrasi perencanaan dan penganggaran, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, penghargaan serta sanksi. Komponen tersebut merupakan kondisi yang terjadi pada lingkup internal pemerintah daerah selaku eksekutif.

Analisis SWOT perlu dilakukan untuk menetapkan alternatif strategi yang paling tepat dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Faktor penting yang menjadi kunci dalam pemilihan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran tersebut terdiri dari faktor kunci internal (IFE) dan faktor kunci eksternal (EFE). Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor internal dan eksternal kepada stakeholder dengan menggunakan metode *paired comparison* (Kinnear dan Taylor, 1991). Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot di setiap faktor-faktor internal dan eksternal.

Analisis QSPM bertujuan untuk menetapkan prioritas strategi terbaik yang paling layak untuk diimplementasikan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Analisis QSPM menggunakan skor daya tarik atau *Attractiveness Scores* (AS) dengan Nilai Daya Tarik adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 = sangat menarik. Penentuan prioritas strategi terbaik dilakukan dengan cara menentukan rating atau tingkat

ketertarikan relatif dari strategi-strategi yang telah dipilih. Nilai *Total Attractiveness Scores* (TAS) tertinggi menandakan strategi yang paling layak untuk diimplementasikan dengan memperhatikan seluruh faktor internal dan eksternal (David dan David 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konsistensi perumusan perencanaan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kondisi keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi daerah dalam melaksanakan

pembangunan daerah, yang tentunya program pembangunan yang dapat dilaksanakan daerah semakin terbatas. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan analisis konsistensi dari sisi anggaran. Anggaran merupakan hal krusial bagi pembangunan daerah. Perencanaan dan anggaran merupakan suatu kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat konsistensi anggaran dapat dilihat melalui deviasi anggaran yang terjadi. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan penghitungan deviasi anggaran yang terdapat pada RKPD dengan anggaran yang terdapat pada APBD yang tertuang melalui DPA SKPD. Kondisi deviasi anggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Deviasi anggaran pada subsektor kelautan dan perikanan Tahun 2014-2017

No	Tahun Penganggaran	RKPD	APBD	Deviasi anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2014	19.141.349.931	17.934.666.045	1.206.683.886	-6,30
2	2015	18.662.968.099	16.656.448.915	2.006.519.184	-10,75
3	2016	11.711.876.621	11.035.364.621	676.512.000	-5,78
4	2017	6.060.749.574	9.070.768.000	3.010.018.426	49,66

Deviasi anggaran menunjukkan bahwa masih kurangnya kemampuan untuk melakukan proyeksi antara penerimaan dan belanja daerah. Dalam manajemen keuangan daerah, hal tersebut disinyalkan melalui defisit anggaran dikarenakan target penerimaan tidak sesuai dengan rencana. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa tidak tercapainya target penerimaan maupun penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan. Deviasi anggaran tentunya akan berdampak kepada program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah sehingga diperlukan penyesuaian kembali dokumen perencanaan. Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2017 selalu mengalami deviasi anggaran. Pada tahun 2014 terjadi deviasi

sebesar 6,3 persen yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran daerah. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang juga mengalami defisit anggaran. Tidak hanya itu, deviasi anggaran yang terjadi juga diiringi dengan penurunan nominal anggaran yang dialokasikan kepada subsektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2017 terjadi deviasi yang positif, yaitu terdapat peningkatan anggaran sebesar 49,66 persen dari total anggaran yang pada mulanya dianggarkan di RKPD.

Deviasi anggaran yang selalu terjadi dikarenakan karena jumlah penerimaan daerah yang selalu mengalami perubahan, khususnya pada porsi dana perimbangan berupa dana bagi hasil minyak dan gas. Fluktuasi harga minyak yang cenderung mengalami penurunan

tentunya akan berdampak kepada penerimaan daerah oleh pusat yang berasal dari sektor tersebut. Namun pada tahun 2017, kelebihan penerimaan yang diperoleh daerah merupakan hasil dari salah satu langkah daerah untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, membuat daerah untuk tidak menggunakan target penerimaan maksimal dalam menentukan proyeksi penerimaan pada RKPD. Sehingga kelebihan penerimaan yang diperoleh dalam tahun berjalan dapat dialokasikan melalui mekanisme APBD-P.

Konsistensi Perencanaan Kegiatan

Kondisi konsistensi perencanaan kegiatan pada subsektor kelautan dan perikanan. Hampir setiap tahunnya selalu terjadi inkonsistensi kecuali pada tahun 2015. Inkonsistensi yang terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pada proses penentuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terjadi proses politis yang alot dan dianggap 7 kegiatan yang telah disepakati

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak dapat diakomodir pada tahun tersebut, sehingga dilakukan penyusunan ulang dan terbentuklah 5 kegiatan baru yang dapat direalisasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun pada tahun 2015, keseluruhan kegiatan dapat terakomodir dan terlaksanakan sepenuhnya pada tahun berjalan. Pada tahun 2016 terjadi inkonsistensi yang disebabkan perencanaan yang mematok anggaran kegiatan minimal untuk menghindari terjadinya defisit anggaran, namun pada tahun berjalan dapat terakomodir melalui mekanisme APBD-P. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017. Walaupun daerah melakukan tersebut untuk menghindari terjadinya defisit anggaran, tetapi hal tersebut menandakan bahwa daerah masih belum dapat menentukan perencanaan dan penganggaran yang baik dikarenakan masih sangat terpengaruh oleh fluktuasi alokasi dana transfer pusat untuk daerah. Konsistensi perencanaan kegiatan pada subsektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Matrik konsistensi perencanaan kegiatan subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2017

No	Status Kegiatan	Dokumen perencanaan (tahun)			
		2014	2015	2016	2017
1	Konsisten	11	15	7	2
2	Tidak konsisten				
	a. Tidak terakomodir	7	-	1	-
	b. Muncul kegiatan baru	5	-	4	5
	Jumlah	23	15	12	7
	Tingkat Konsistensi (%)	47,83	100,00	58,33	28,57

Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Pada Subsektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengukuran implementasi perencanaan dan penganggaran ini dianalisis dengan menggunakan skala likert yang berhubungan dengan

perencanaan dan penganggaran di subsektor kelautan dan perikanan. Pada analisis ini terdapat lima komponen penilaian yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran. Kelima komponen penilaian tersebut meliputi kompetensi SDM perencanaan penganggaran, sistem administrasi perencanaan dan penganggaran,

kesesuaian perencanaan penganggaran, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Semakin tinggi skor hasil yang diperoleh maka semakin baik implementasi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dalam pengukuran yang dilakukan telah ditentukan bahwa setiap nilai skor

tertinggi setiap pertanyaan adalah 4 sehingga nilai maksimal yang akan diperoleh adalah $4 \times 27 \times 15$ responden = 1620, dan nilai terendah adalah 1 sehingga skor yang akan diperoleh adalah $1 \times 27 \times 15 = 405$, Hasil dari seluruh komponen penilaian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Persepsi responden terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Komponen Penilaian	Skor Maksimal	Skor Total	Kategori
1	Kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran	600	430	Sedang
2	Sistem Administrasi Perencanaan dan penganggaran	240	191	Tinggi
3	Kesesuaian Perencanaan Penganggaran	420	328	Tinggi
4	Penghargaan (<i>reward</i>)	180	144	Tinggi
5	Sanksi (<i>punishment</i>)	180	137	Tinggi
Total		1620	1230	Tinggi

Komponen Kompetensi SDM Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, ditemukan bahwa indikator yang ada pada komponen kompetensi SDM 5 dari 10 indikator yang ada berada pada kategori sedang. Adapun yang menjadi kelemahan tersebut antara lain:

1. Tingkat pendidikan

Berdasarkan persepsi responden bahwa latar belakang pendidikan staf perencana di SKPD belum sepenuhnya memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan *basic* keilmuan yang dimiliki. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi faktor utama kenapa indikator ini berada pada kategori kurang baik. Bahkan ada beberapa SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tidak tepat, tetapi beberapa ada yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya yaitu DIII. Selain itu dikarenakan adanya kekurangan personil yang memiliki kualifikasi yang mencukupi tersebut, ada beberapa SKPD yang menugaskan satu personil untuk

melaksanakan beberapa fungsi yang berbeda.

2. Kesempatan pelatihan

Pelatihan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM khususnya pada bagian perencanaan dan penganggaran ini. Akan tetapi kesempatan tersebut terbilang cukup langka untuk didapatkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya yang mengakibatkan harus terjadinya efisiensi anggaran setiap tahunnya. Ploting anggaran yang sering mendapatkan revisi adalah anggaran kegiatan pelatihan yang diusulkan oleh SKPD. Hal tersebut menjadikan responden hanya dapat mengandalkan kesempatan pelatihan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggaran yang bersumber dari selain APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Biaya Pengembangan

Keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan

kapasitas SDM. Menurut responden, hal ini berkorelasi dengan kesempatan pelatihan yang dimiliki oleh personil perencanaan untuk dapat melakukan pengembangan kompetensi diri.

4. Pelatihan

Indikator ini menunjukkan bahwa personil perencana dan penganggaran masih belum mendapatkan pelatihan yang cukup atau bahkan belum pernah mendapat kesempatan pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus.

5. Sertifikasi

Secara umum, pejabat Eselon telah mengikuti pelatihan sehingga mendapatkan sertifikasi terkait perencanaan dan penganggaran. Walaupun tetap saja ada beberapa pejabat eselon yang juga belum mendapatkannya. Menurut responden, hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak juga staf perencana yang belum mendapatkan sertifikasi mengenai perencanaan dan anggaran

Komponen Sistem Administrasi Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa indikator yang ada pada komponen sistem administrasi perencanaan dan penganggaran berada pada kategori tinggi dengan perolehan skor 191. Adapun yang menjadi perhatian adalah terkait penerapan ASB.

Menurut responden, dengan adanya dinamika kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan mengharuskan pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kemajuan yang ada. ASB merupakan salah satu terobosan baru dengan harapan untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang lebih akuntabel. Namun hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya daerah. Oleh karena itu daerah masih

mendapatkan toleransi khususnya dalam penerapan kebijakan-kebijakan baru salah satunya adalah penggunaan ASB. Walaupun demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas telah mulai melakukan penyesuaian secara bertahap untuk menerapkan ASB melalui beberapa SKPD yang akan menjadi proyek percontohan bagi SKPD lainnya.

Komponen Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

Hasil pengolahan data kuesioner yang dilakukan pada komponen kesesuaian perencanaan dan penganggaran berada pada kategori Tinggi dengan perolehan skor 328. Namun dari semua indikator yang diukur, terdapat satu indikator yang masih berada pada kategori kurang baik. Indikator tersebut adalah manfaat program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, responden mengatakan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima manfaat. Walaupun sebagian besar mendapatkan respon yang positif, tetapi tentu saja masih terdapat kekurangan yang muncul. Salah satunya contohnya adalah tidak tepatnya metode pengelolaan program subsektor kelautan perikanan yang dilakukan. Hal tersebut menjadi evaluasi dan catatan khusus untuk proses perencanaan kegiatan yang memiliki karakteristik yang serupa.

Komponen Penghargaan (*Reward*)

Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan perolehan skor total 144 dengan persentase 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara khususnya aparatur pelaksana perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut menjadi target tersendiri bagi aparatur sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Reward yang diberikan dapat berupa promosi jabatan maupun insentif,

sementara untuk instansi terkait yang berhasil mencapai target dapat berupa penghargaan maupun sertifikat.

Komponen Sanksi (*punishment*)

Komponen yang kelima dalam implementasi perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sanksi. Komponen ini memperlihatkan apakah pemberian sanksi dapat menjadi *warning* maupun dorongan bagi SKPD agar dapat bekerja secara maksimal agar dapat mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, komponen sanksi memperoleh skor total 137 dengan persentase 76,11. Nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen ini adalah 180 dan nilai minimal yang dapat diperoleh adalah 45. Berdasarkan skor yang diperoleh maka komponen sanksi berada pada kategori baik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang diukur memperoleh kategori yang baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemberian sanksi juga merupakan salah satu langkah untuk dapat memberikan dorongan kepada aparatur perencanaan dan penganggaran untuk dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang baik serta dapat dilaksanakan dan berdampak

positif khususnya pada subsektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan wawancara responden, penerapan sanksi sudah sewajarnya untuk dilaksanakan. Sanksi tersebut selayaknya diberikan kepada personal yang melakukan kelalaian, bukan kepada instansi terkait. Sehingga memberikan dampak khusus kepada penerima, serta menjadi contoh bagi yang lain dan tidak mengganggu keberlanjutan program maupun kegiatan yang telah direncanakan.

Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pada Subsektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan kajian terhadap dokumen terkait, diperoleh 19 (sembilan belas) faktor strategis yang berperan dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Langkah selanjutnya adalah memberikan kuesioner kepada informan untuk melakukan penilaian atas faktor internal dan eksternal. Hasil penilaian atas faktor internal dan eksternal menggunakan *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4 Analisis IFE penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Faktor Strategis Internal Kekuatan/ <i>strength</i> (S)	Bobot	Rating	Skor
S1	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan penganggaran berdasarkan visi daerah	0,117	4,00	0,467
S2	Struktur organisasi dan tupoksi SKPD yang jelas	0,109	3,00	0,328
S3	Ketersediaan SDM muda yang potensial	0,096	3,67	0,353
S4	Target pembangunan yang tercantum jelas pada RPJM	0,100	3,67	0,367
S5	Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perencanaan penganggaran yang aktif	0,093	3,33	0,309
Total		0,515		1,823

Lanjutan Tabel 4

No.	Kelemahan/ <i>weakness</i> (W)			
W1	Rendahnya <i>Leadership</i> OPD dalam mewujudkan target RPJM	0,106	1,67	0,176
W2	Pembagian tupoksi internal OPD yang masih belum jelas	0,102	1,33	0,136
W3	Kualitas dan kuantitas aparatur perencanaan di SKPD masih rendah	0,094	2,00	0,189
W4	Rotasi/mutasi pegawai yang sering terjadi dan tidak diimbangi dengan kesesuaian kecakapan	0,096	2,00	0,193
W5	Pengembangan SDM aparatur perencanaan oleh Pemerintah Daerah masih kurang memadai	0,087	1,67	0,145
Total		0,485		0,838
Total IFE		1,000		2,661

Hasil penghitungan *Internal Factor Evaluation* (IFE) menunjukkan bahwa pada faktor strategis internal, pada kekuatan, menjelaskan bahwa kepala daerah mendukung segala upaya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan visi daerah. Sementara yang terlihat pada

kelemahan adalah dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sering terjadi mutasi/rotasi pegawai. Hal tersebut tentunya sangat menghambat proses perencanaan dan penganggaran karena aparatur perencanaan akan harus kembali mengulang dan beradaptasi kembali terhadap kondisi kerja yang baru.

Tabel 5 Analisis EFE penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Skor
No.	Peluang/ <i>Opportunities</i> (O)			
O1	Regulasi Pemerintah tentang sistem perencanaan dan penganggaran yang jelas	0,111	2,67	0,296
O2	Regulasi Pemerintah tentang perjanjian kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintahan	0,100	2,33	0,232
O3	Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan sektor maritim	0,130	3,67	0,475
O4	Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung pengembangan sektor kelautan perikanan	0,130	3,33	0,432
O5	Diklat khusus bidang perencanaan oleh kementerian yang bekerjasama dengan institusi/perguruan tinggi	0,109	2,33	0,254
Total		0,579		1,690

Lanjutan Tabel 5

No.	Ancaman/Thread (T)			
T1	Ketidakpastian (fluktuasi) dana transfer pusat untuk daerah	0,093	4,00	0,370
T2	Keterlambatan informasi alokasi dana transfer pusat untuk daerah	0,109	3,67	0,399
T3	Ketidakpastian keberlanjutan program subsektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Pusat	0,111	3,00	0,333
T4	Belum adanya evaluasi khusus terhadap perencanaan penganggaran subsektor kelautan dan perikanan	0,109	2,33	0,254
Total		0,421		1,356
Total EFE		1,000		3,046

Hasil penghitungan yang dilakukan pada faktor strategis eksternal menunjukkan bahwa, peluang dengan skor tertinggi yang menandakan adanya kesempatan yang dapat diraih adalah adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan sektor maritim. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan mampu mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan akselerasi pembangunan. Sementara ancaman dengan skor tertinggi adalah keterlambatan informasi alokasi dana transfer pusat untuk daerah. Hal tersebut tersebut tentunya sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah yang disebabkan masih sangat tergantung kepada dana perimbangan oleh pusat untuk daerah

Perumusan Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil analisis internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas masing- memperoleh skor IFE = 2,661 dan EFE 3,046. Nilai tersebut akan digunakan untuk membentuk matrik Internal Eksternal (IE) untuk kemudian menjadi panduan dalam menentukan pendekatan pembangunan yang tepat sesuai dengan faktor-faktor yang telah dianalisis. Matrik tersebut disajikan pada Gambar 1.

Skor Total IFE 2,661

	Kuat 3.00-4.00	Sedang 2.00-2.99	Lemah 1.00-1.99	
Tinggi 3.00-4.00	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain	Skor Total EFE
Sedang 2.00-2.99	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divestiture	
Rendah 1.00-1.99	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divestiture	IX Harvest and Divestiture	

Gambar 1 Matriks IE perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Perumusan Strategi Prioritas

Penggunaan QSPM bertujuan untuk memperoleh strategi yang menjadi prioritas terbaik dan yang paling menarik untuk diimplementasikan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan cara menentukan rating atau tingkat ketertarikan relatif (*relative attractiveness*) dari strategi-strategi yang telah dipilih. Skor yang diberikan untuk daya tarik terbagi atas empat pilihan, yaitu 1 untuk tidak menarik, 2 untuk agak menarik, 3, cukup menarik dan 4 untuk

sangat menarik. Skor yang diberikan tersebut akan menghasilkan skor daya tarik total (*Total Attractiveness Score-TAS*). Skor tersebut akan dijumlahkan sehingga akan mendapat nilai total TAS dari masing-masing strategi. Skor yang paling tinggi menandakan bahwa strategi tersebut paling menarik dan lebih diutamakan untuk diimplementasikan.

Penentuan strategi dan pemberian skor tersebut diperlukan ketelitian, intuisi serta pengalaman yang mumpuni. Karena hal tersebut, maka kuesioner QSPM ini hanya diberikan kepada pemegang kebijakan yang memiliki kewenangan. Hasil dari penilaian tersebut disajikan secara ringkas pada Tabel 7.

Tabel 7 Prioritas strategi perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan

No	Strategi	TAS	Peringkat
1	Optimalisasi target pembangunan subsektor kelautan dan perikanan melalui penyelarasan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor maritim.	5,546	3
2	Peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi/ perguruan tinggi	6,107	1
3	Penyelarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan subsektor kelautan dan perikanan sesuai dengan RPJMD dan RPJMN.	5,300	4
4	Peningkatan kapasitas pimpinan OPD dalam menghadapi ketidakpastian dana transfer dan keberlanjutan program pemerintah pusat.	5,691	2

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan atas penilaian yang diberikan oleh responden terhadap skor daya tarik dari setiap strategi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dengan menggunakan kuesioner QSPM pada Tabel 7, maka diperoleh hasil bahwa skor tertinggi adalah 6,107. Strategi yang memperoleh nilai TAS tersebut merupakan strategi kedua, yaitu strategi yang menggunakan pendekatan W-O. Artinya adalah strategi yang layak untuk mendapatkan prioritas adalah strategi peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi

dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi/ perguruan tinggi. Hasil sejalan dengan analisis pada tujuan pertama dan kedua dari penelitian ini. Hasil ini membuktikan bahwa untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan yang konsisten juga memerlukan kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran yang baik pula.

Perencanaan Implementasi Strategi

Menindaklanjuti hasil strategi utama yang telah diperoleh berdasarkan analisis QSPM yang dilakukan adalah dengan merealisasikan strategi tersebut. Agar dapat dilaksanakan tentunya strategi memerlukan penjabaran yang baik sehingga dapat menjadi pedoman

pelaksanaan yang tepat sesuai dengan tujuan strategi tersebut. Penjabaran strategi tersebut tertuang melalui kebijakan operasional. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan seperti yang akan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Implementasi strategi penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi	Program	Kegiatan	Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi/perguruan tinggi	Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Seleksi penerimaan CPNS fungsional perencana di OPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Tersedianya formasi aparatur perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kompetensinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan SDM	2018-2019
	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur perencanaan dan penganggaran	Open bidding jabatan fungsional perencana tingkat pertama, muda dan madya	tersedianya fungsional perencana tingkat pertama, muda dan madya yang kompeten dan berdedikasi	Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baperjakat	2018-2019
		Bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya pemahaman terhadap perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah daerah, BAPPENAS, Institusi Pendidikan	2019-2021
		Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perencana OPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya pemahaman dan kompetensi pejabat fungsional perencana	Pemerintah daerah, BAPPENAS, Institusi Pendidikan	2019-2020



Berdasarkan strategi utama yang telah dirumuskan melalui program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur serta program Pembinaan dan pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur perencanaan dan penganggaran memiliki beberapa kegiatan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 8. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

1. Seleksi penerimaan CPNS fungsional perencana di OPD Kabupaten Kepulauan Anambas

Terbatasnya aparatur perencana baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi alasan diperlukannya penerimaan CPNS fungsional baru, dengan bertambahnya khususnya yang memiliki latar belakang perencanaan dan penganggaran. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

2. Open bidding jabatan fungsional perencana tingkat pertama, muda dan madya

Open bidding diharapkan menjadi terobosan baru untuk menghasilkan pejabat eselon maupun fungsional yang memiliki dedikasi dan kualifikasi yang tinggi terhadap jabatan yang akan diamanahkan. Pelaksanaan open bidding diharapkan juga mampu menjadi instrumen untuk menilai kelayakan dan kemampuan pejabat eselon maupun fungsional untuk mendapatkan kesempatan pengembangan karir yang lebih baik.

3. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perencana OPD Kabupaten Kepulauan Anambas

Sebagai pejabat fungsional yang khusus menangani bagian perencanaan dan penganggaran sudah selayaknya untuk mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memberikan kontribusi sesuai dengan jabatannya serta mampu menciptakan lingkungan yang positif khususnya pada bagian perencanaan agar menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

4. Bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan berkelanjutan

Tidak hanya kepada pejabat fungsional, aparatur pelaksana yang terlibat pada proses perencanaan dan penganggaran sudah selayaknya mendapatkan pengembangan kapasitas diri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Perencanaan Nasional serta Institusi Perguruan tinggi sebagai wujud *transfer knowledge* yang baik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Proses perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten tersebut masih terjadi inkonsistensi. Inkonsistensi dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi baik pada kegiatan maupun deviasi anggaran.
2. Tingkat implementasi perencanaan Kepulauan Anambas adalah baik dengan catatan komponen kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran masih kurang baik sehingga masih perlu perbaikan.
3. Strategi yang dilaksanakan terkait penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melalui peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi/ perguruan tinggi.

Saran

1. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis khususnya dalam

- meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan dan penganggaran
2. Melaksanakan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.
 3. Melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat terkait alokasi dana transfer daerah untuk menjaga kestabilan dan kebersinambungan perencanaan dan penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.
- Bastian I. 2006b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta (ID): Salemba Empat.
- [BPS KKA] Badan Pusat dan Statistika Kabupaten Kepulauan Anambas. 2016. Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2016. Anambas (ID): BPS.
- David FR, David FR. 2015. Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing. Jakarta (ID): Salemba Empat.
- Domai T. 2013. Manajemen Keuangan Publik. Malang (ID): UB Press.
- Kinnear TC, Taylor JR. 1991. Riset Pemasaran Jilid 1. Jakarta (ID): Erlangga



STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR

Strategy to Protect Agricultural Land for Sustainable Food Security in Bogor Regency

Judo Satria¹, A. Faroby Falatehan², Irfan Syauqi Beik³

¹ Staff Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Email: j.satria14@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email: robiefa@gmail.com

³ Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM Institut Pertanian Bogor (IPB). Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email: irfan_beik@ipb.ac.id

ABSTRACT

Protection of sustainable food agriculture land is an efforts in order to control the high rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land, as well as food security and sovereignty. In addition, agricultural land has a very strategic role and function for the people of Bogor District who are agrarian because there are a large number of residents of Bogor District who depend on the agricultural sector. This study aims to formulate the strategy of the Bogor District Government through a strategy to control the transformation of sustainable food agricultural land to meet the level of food sufficiency and protect from the rate of land conversion. To achieve these objectives, a review needs to be done to check the availability of agricultural land, with the formulation of Analytical Hierarchy Process for policy development decision

Keywords: agricultural land conversion, agricultural land protection strategy.

ABSTRAK

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tinjauan terhadap ketersediaan lahan peruntukan pertanian, dengan perumusan Proses Hirarki Analitik untuk keputusan pengembangan kebijakan

Kata Kunci : alihfungsi lahan pertanian, strategi perlindungan lahan pertanian

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan sesungguhnya bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Fenomena ini sudah berlangsung lama, bahkan mungkin seusia dengan peradaban manusia. Sejalan dengan pertumbuhan populasi, penguasaan dan penggunaan lahan menjadi terganggu dan mulai dianggap bermasalah. Hal ini memunculkan

kompleksitas permasalahan akibat meledaknya pertumbuhan penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), perlahan berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian yang dikenal sebagai alih fungsi (konversi)

lahan.

Permasalahan utama Kabupaten Bogor dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan terkait dengan lahan pertanian adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan, akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Permintaan tanah untuk keperluan pembangunan berbagai sektor kegiatan antara lain; industri, perdagangan, perkebunan, infrastruktur

dan fasilitas penunjang kegiatan lainnya terus mengalami peningkatan seiring dengan lajunya tingkat pembangunan dan pertambahan penduduk merupakan tantangan dalam upaya mempertahankan penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara berkembang dengan cepat baik dari sisi pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun infrastruktur. Berdasarkan data BPS terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu sekitar 2,41 % terlihat pada Tabel 1.

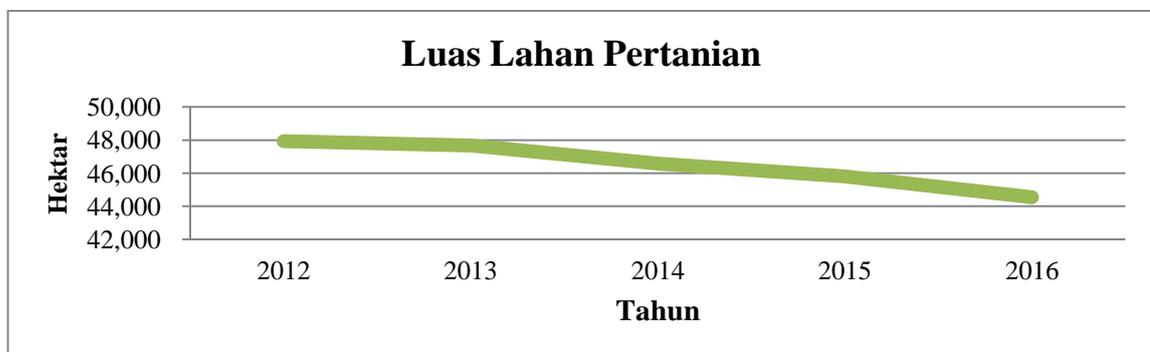
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan sensus Penduduk Tahun 2010 dan estimasi Penduduk Tahun 2014 s/d 2017

Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>				
	2010	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bogor	4.771.932	5.331.149	5,459,668	5,587,390	5,715,009

Sumber: BPS Kabupaten Bogor

Kepadatan penduduk di perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan kota. Konversi lahan pertanian di wilayah

pinggiran kota menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Oleh karena itu, konversi lahan semakin sulit untuk dikendalikan. Terlihat pada Gambar 1.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Gambar 1. Luas lahan pertanian Tahun 2012 s/d 2016 di Kabupaten Bogor

Gambar diatas menunjukkan penurunan jumlah lahan sawah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimulai dari Tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 269 ha,

Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 1080 ha. Tahun 2014 s/d 2015 sebanyak 785 ha dan tahun 2015 s/d 2016 sebanyak 1251 ha dengan jumlah total 3385 ha dalam kurun

waktu 5 tahun

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengupayakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi petani. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian menyangkut ***bagaimana strategi pengendalian alihfungsi terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.***

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mendukung tujuan utama tersebut, perlu ditetapkan tujuan spesifik, meliputi :

1. Jumlah Peruntukan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi pertanian;
2. Merumuskan strategi dengan melibatkan pihak lain di luar Pemerintahan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution dan Winoto (1996) yang mengulas pengaruh kelembagaan dalam perubahan fungsi lahan, Harjono (2010) menunjukkan hasil kurangnya sanksi, komimen pemerintah dan perilaku masyarakat, Handari (2012) dan Rahmawan (2013) dengan hasil Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

METODOLOGI

Sasaran kajian ini adalah Strategi Pengendalian Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor, data sekunder yaitu berupa luas lahan sawah Kabupaten Bogor tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan lokasi rencana penetapan PLP2B bersumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kajian PSP3 Institut Pertanian Bogor, juga Peta dari Badan Informasi Geospasial. Metode analisis yang digunakan:

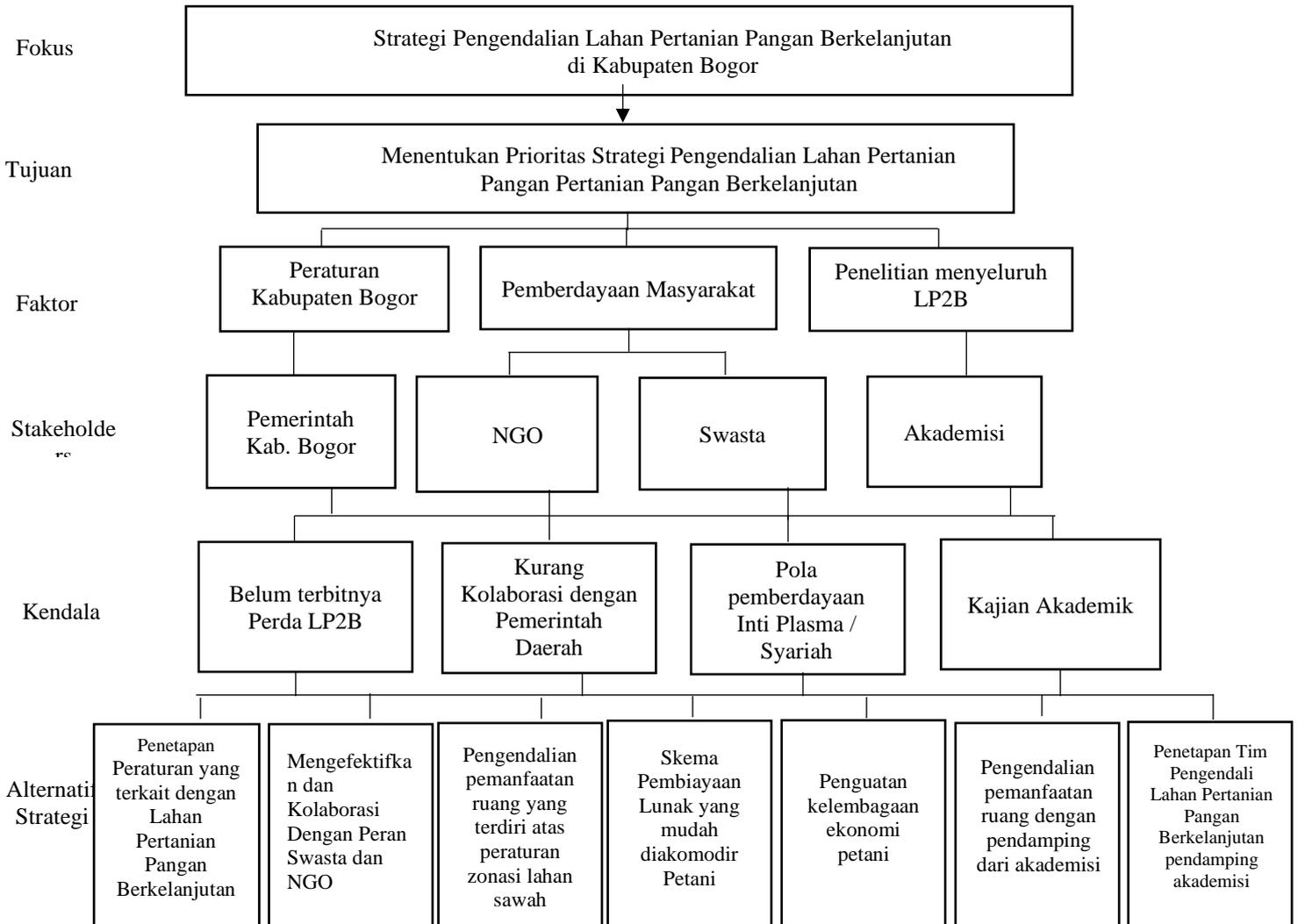
1. Analisis deskripsi untuk menggambarkan alihfungsi lahan di Kabupaten Bogor.
2. Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Pengkajian AHP dimulai dengan menata elemen suatu persoalan dalam bentuk hierarki, kemudian dilanjutkan dengan membuat pembandingan berpasangan antar elemen dan suatu tingkat sesuai dengan yang diperlukan oleh kriteria-kriteria yang berada setingkat lebih tinggi. Berbagai pembandingan ini menghasilkan prioritas dan akhirnya, melalui sintesis, menghasilkan prioritas menyeluruh. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, yang menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya.

Perumusan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui wawancara terhadap pejabat dari unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekebunan dalam hal ini pengambil kebijakan yaitu Kepala dinas yang menjadi responden, unsur Swasta merupakan pimpinan perusahaan / direktur yang berusaha di bidang pertanian, unsur Akademisi yang diwakili oleh Kepala Pusat Studi di sebuah universitas serta unsur LSM yang fokus di bidang pertanian.

Kriteria pakar atau ahli yang digunakan dalam analisis AHP ini lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau memiliki

kepentingan terhadap masalah tersebut (Falatehan, 2016).



Gambar 2 Struktur hirarki AHP strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Struktur AHP (Gambar 2) yang digunakan terdiri dari enam hirarki (level). Hirarki pertama adalah *goal* atau tujuan utama sebagai fokus strategi. Hirarki kedua adalah tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hierarki ketiga adalah faktor yang menjadi perlindungan lahan pertanian, hirarki keempat adalah aktor yang memiliki peran utama di dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, yaitu Pemerintah daerah, swasta, NGO dan Akademisi. Hirarki kelima adalah kendala implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Hierarki Keenam merupakan alternatif strategi yang direkomendasikan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bogor

Tersedianya peruntukan ruang untuk lahan pertanian seluas 58.044,93

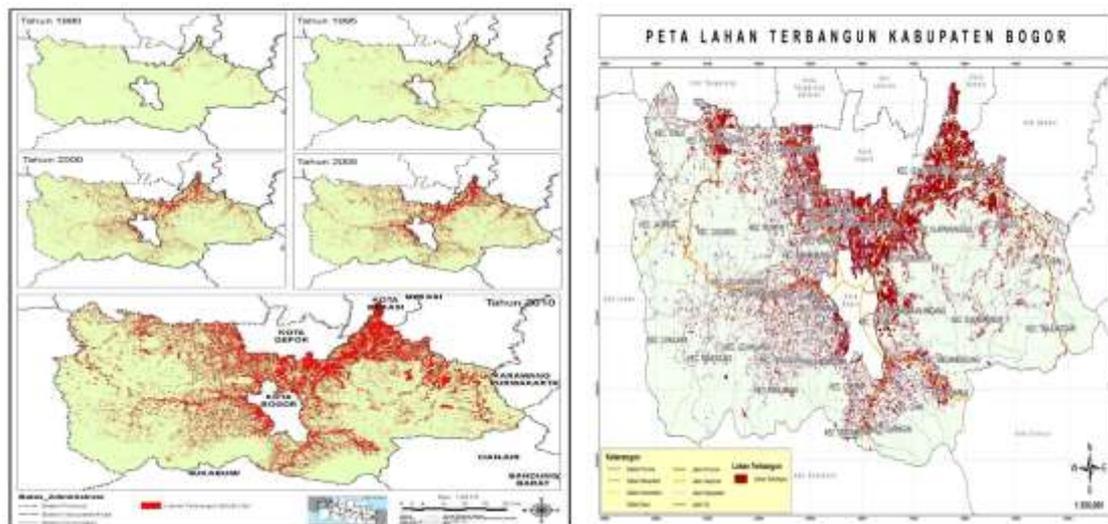
atau sebesar 19,44% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor sedangkan lahan sawah pada tahun 2016 ada berada pada angka 44.658 Ha, artinya perluasan lahan pertanian relatif dibatasi sedangkan perencanaan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor seluas 104.494,40 Ha atau sekitar 34,88 % total luas Kabupaten Bogor, dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luasan Kawasan Budidaya Kabupaten Bogor (diolah)

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	% terhadap Luas Kabupaten
1	Kawasan Peruntukkan Pertanian	58.044,93	19,44%
2	Lahan Basah	38.016.52	12,73%
TOTAL LAHAN		251.576,46	

Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun.

Sebelumnya pada periode tahun 1995-2000 juga terjadi konversi lahan yang cukup tinggi sebesar lebih dari 3.500 ha/tahun. Itu menandakan perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan.



Gambar 3. Lahan Terbangun Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 2010, dan 2015

Pembahasan tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) mengakomodir pengembangan komoditi pertanian khususnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor adalah tersedianya peruntukan

ruang untuk lahan pertanian seluas 58.044,93 atau sebesar 19,44% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor sedangkan lahan sawah pada tahun 2016 ada berada pada angka 44.658 Ha, artinya perluasan lahan pertanian relatif dibatasi sedangkan

perencanaan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor seluas 104.494,40 Ha atau sekitar 34,88 % total luas Kabupaten Bogor, luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun. Sebelumnya pada periode tahun 1995-2000 juga terjadi konversi lahan yang cukup tinggi sebesar lebih dari 3.500 ha/tahun. Itu menandakan perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan. **Strategi pengembangan komoditi pertanian** lingkup Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebut kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana. Pengembangan kawasan

perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Pentingnya Peraturan Desa tentang Tata Ruang

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah Kabupaten. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. didasarkan pada UU Nomor 6 Tentang Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang desa, dengan syarat tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan peraturan yang lain di atasnya. Kabupaten Bogor telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2016-2036 Pemerintah desa bisa menerjemahkan Perda itu pada lingkup lokal skala desa dengan dibuatkan Peraturan Desa. Peraturan Desa akan menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Dalam peraturan desa tersebut, pemerintah desa dan BPD bisa mengatur, wilayah mana saja yang akan menjadi lahan pertanian, pariwisata, perumahan dan atau komoditas apa yang bisa diunggulkan di desa tersebut. Dengan demikian, alih fungsi lahan pertanian di desa bisa diminimalisir



Tabel 3. Pola, Strategi, dan Arah Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Bogor

Pola Pemanfaatan	Strategi Pemanfaatan	Arah Pemanfaatan
<p>Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian sawah</p> <p>Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian sawah secara ruang dapat memberikan manfaat : (a) peningkatan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang telah ada;</p> <p>(b) meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya; dan (c) upaya pelestarian sumberdaya alam untuk sawah.</p> <p>Memiliki kemampuan swasembada pangan berkelanjutan</p> <p>Memiliki kemampuan mendayagunakan investasi yang telah ditanam memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan petani dan daerah</p> <p>Mempunyai peluang sebagai sektor strategis di daerah bersangkutan</p>	<p>Melakukan intensifikasi untuk lahan pertanian beririgasi teknis yang berada dalam wilayah perkotaan</p> <p>Melakukan ekstensifikasi pada lahan pertanian di luar wilayah perkotaan atau pinggiran/periferi dalam.</p> <p>Meminimalisasi alih fungsi/konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan perkotaan, khususnya lahan yang beririgasi teknis</p> <p>Jika terpaksa konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan aktivitas budidaya non- pertanian dilakukan, maka harus dalam batasan sebagai berikut :</p> <p>Lahan pertanian/sawah dua kali panen setahun, sawah satu kali panen padi dan dua kali panen palawija, sawah tidak ditanami padi tapi palawija dua kali panen, dan perkebunan.</p> <p>Lahan non-produktif (memiliki keterbatasan fisik alamiah), misal sawah tadah hujan dengan kelerengan lebih kurang 15 %</p> <p>Menyelesaikan persoalantumpang tindih dengan kegiatan potensial lainnya</p> <p>Pengembangan prasarana irigasi pertanian</p> <p>Pengembangan produk pertanian unggulan yang berorientasi industri</p>	<p>Memperluas lahan sawah beririgasi teknis pada sawah yang dapat dipanen dua sampai tiga kali setahun</p> <p>Menghindari konversi lahan pertanian beririgasi teknis untuk kegiatan lain</p> <p>Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana pengairan</p> <p>Konversi lahan pertanian diijinkan dengan catatan nilai ekonomi yang ada lebih tinggi atau untuk kebutuhan mendesak pada lahan sawah tadah hujan</p> <p>Jika kebutuhan mendesak, perlu perluasan areal sawah baru.</p>

Sumber : Hasil penelitian

Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan Analisis AHP

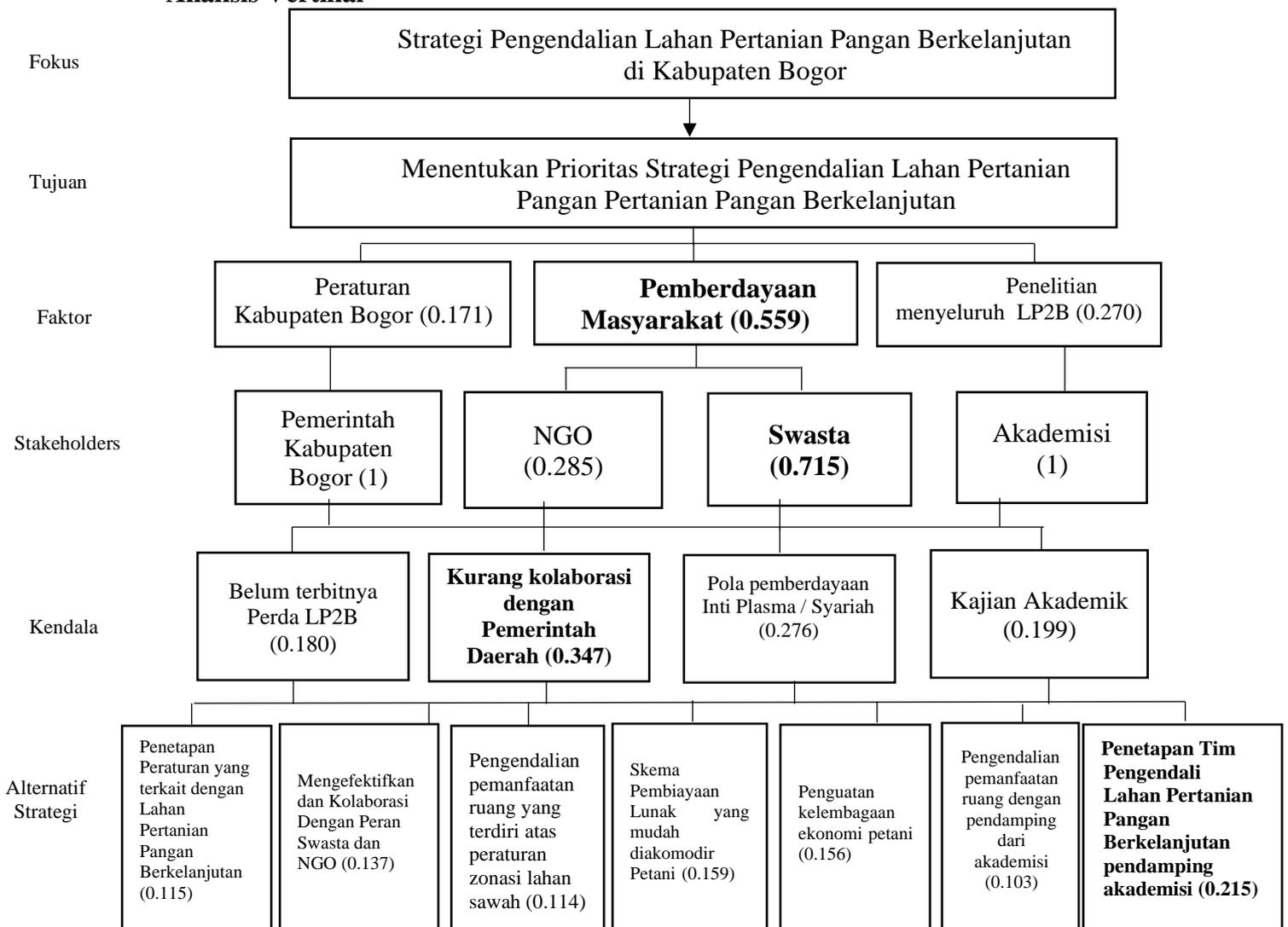
Berdasarkan hasil analisis AHP dengan fokus strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di

Kabupaten Bogor bertujuan menentukan prioritas Strategi Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan fokus pada level faktor yang menjadi prioritas adalah **pemberdayaan masyarakat**, hal tersebut adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pada

Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada **swasta**. Pada Level kendala memiliki prioritas yaitu **kurang kolaborasi dengan pemerintah daerah**. Pada level ini perlu dilakukan penyamaan persepsi dan kerja bersama antara Pemerintah, swasta dan NGO, pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada **penetapan tim pengendali lahan pertanian pangan berkelanjutan pendamping akademisi**. Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan

masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Analisis Vertikal



Gambar 4. Struktur dan nilai bobot hirarki strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas

adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat secara

mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan

untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Pada Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Karena itulah perlu dibangun seingergitas pelaku usaha, Pemerintah dengan NGO dalam hal ini lembaga wakaf untuk terus melindungi serta membangun usaha produktif kegiatan pertanian, pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bahwa Pemerintah Daerah bersama para akademisi mencanangkan program berkelanjutan dengan tujuan penetapan tim pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisis Horizontal

Tabel 4. Bobot setiap Kendala terhadap Stakeholders

Kendala	Stakeholders			
	Pemerintah Kab. Bogor	NGO	Swasta	Akademisi
Belum terbitnya Perda LP2B	0.135	0.144	0.194	0.380
Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	0.367	0.308	0.362	0.180
Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah	0.286	0.282	0.273	0.118
Kajian Akademik	0.211	0.266	0.172	0.323
Consistency ratio	0.03	0.00	0.03	0.02

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Stakeholders Pemerintah Kab. Bogor, NGO dan Swasta lebih memprioritaskan kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, sedangkan stakeholders akademisi lebih memprioritaskan kendala pada kajian akademik dengan bobot sebesar 0.323.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kendala terbitnya Peraturan

Daerah LP2B memilih prioritas strategi pada Mengefektifkan dan Kolaborasi Dengan Peran Swasta dan NGO. kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah memilih prioritas strategi pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi. kendala Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah memilih prioritas strategi pada Skema Pembiayaan Lunak yang mudah diakomodir Petani dengan bobot sebesar

0.204. kendala Kajian Akademik memilih prioritas strategi pada Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah dengan bobot sebesar 0.273

Tabel 5. Bobot setiap Alternative Strategi terhadap Kendala

	Belum terbitnya Perda LP2B	Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah	Kajian Akademik
Penetapan Peraturan yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0.137	0.061	0.147	0.099
Mengefektifkan dan Kolaborasi Dengan Peran Swasta dan NGO	0.204	0.137	0.136	0.054
Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah	0.077	0.057	0.073	0.273
Skema Pembiayaan Lunak yang mudah diakomodir Petani	0.185	0.139	0.204	0.084
Penguatan kelembagaan ekonomi petani	0.156	0.147	0.172	0.145
Pengendalian pemanfaatan ruang dengan pendamping dari akademisi	0.056	0.105	0.151	0.095
Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi	0.186	0.352	0.116	0.249
Consistency ratio	0.03	0.05	0.02	0.02

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hingga saat ini, Terlihat dari Pola Ruang yang ditetapkan Peruntukan Lahan Basah telah ditetapkan seluas 38.016,52 Ha perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan. Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarki Process (AHP) konsep *Quadruple Helix* merupakan pilar utama yang berperan mendorong perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang meliputi empat sektor yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan LSM/yayasan, dengan kolaborasi dan saling melengkapi diharapkan harga komoditi pertanian semakin kompetitif, kepemilikan lahan pertanian terlindungi, regulasi berjalan dinamis serta inovasi akan diimplementasikan dengan baik untuk kedaulatan pangan.

Saran

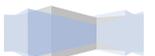
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa usulan kebijakan adalah titik tumpu (*entry point*) strategi pengendalian adalah komitmen bersama terutama pimpinan daerah dalam menyikapi alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjalankan konsekuensi setelah terbitnya peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sasaran (*goal*)

strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan baik dari peraturan peruntukan ruang maupun kebijakan yang menguntungkan para pelaku usaha pertanian yang dikhususkan kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar M. 2009. *Kemandirian Pangan: Cadangan Publik, Stabilisasi Harga Dan Diversifikasi*. Jurnal Litbang Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.7(2): 107-129
- Adam L. 2012. *Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 10(2): 103-117
- Ashari. 2009. Peran perbankan nasional dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 27(1):13-27.
- Aliadi A. 2011. *Pengembangan Kolaborasi Taman Nasional Gunung Ciremai: Kajian Melalui Riset Aksi*[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [BAPPEDA]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor & [PSP3] Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-IPB. 2010. *Kaji Tindak Pengembangan Kelembagaan Sistem Pendanaan Dan Pemasaran Dalam Revitalisasi Pertanian Di Kabupaten Bogor*. Bogor (ID): PSP3-IPB.
- Barus, B., D.R. Panuju, L.S. Iman, B.H.Trisasongko, K. Gandasmita, dan R. Kusumo. 2010. Pemetaan Potensi Konversi Lahan Sawah dalam Kaitan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan Analisis Spasial. Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB. Bogor.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Falatehan, A. Faroby. 2016. Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Indomedia Pustaka.
- [FAO]Food and Agricultural Organization. 2008. *Socio-Economic And Livelihood Analisis In Investment In Planning*.
- Ferroni, M. and P. Castle. 2011. Public-private partnerships and sustainable agricultural development. Sustainability 3:1064-1073; doi:10.3390/su3071064. Open Access Sustainability ISSN 2071-1050. <http://www.mpd.com/journal/sustainability>. (13 Juli 2018).
- Iqbal M, Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada partisipasi masyarakat*. Jurnal Litbang Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 5(2): 167-182.
- Kementerian Pertanian. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Jakarta: Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
- Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian*. Jakarta (ID): Kementan Mubarak, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomer 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

- Syauqi Beik, Irfan dan Winda Nur Apriani. 2013. Analisis Faktor - faktor yang memengaruhi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi* 31(1).
- Tonny F. 2011. Bahan Kuliah KPM 53C: *Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Daerah Bagian C*. Bogor (ID): Manajemen Pembangunan Daerah IPB.



STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Improvement Strategy of the Performance Accountability of the Bogor City Government)

Enditya Luhur Raharja¹, Lukman M Baga², A Faroby Falatehan³

¹Staff Sekretariat Daerah Kota Bogor. Email: endit87@gmail.com

²Staff Pengajar Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Email:
lukmanmb@yahoo.com

³Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB. Email: robiefa@gmail.com

ABSTRACT

In the last few years the level of performance accountability of the Bogor City Government has not shown a significant increase, so it needs strategies to improve it. This research included descriptive research type with using primary and secondary data. Analysis methods used were Importance Performance Analysis, and Analytical Hierarchy Process. The purpose of this research were to analyze the weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government, and formulate the strategies to improve the performance accountability of the Bogor City Government. Based on the results of the Importance Performance Analysis showed that there are 7 attributes that become weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government. These attributes are alignment between planning documents, results-oriented performance planning, linkages of programs / activities with strategic planning, preparation of individual performance indicators, tiered performance measurement, and utilization of performance measurement. The strategy to improve the performance accountability of the Bogor City Government is strengthening commitment, implementing performance-based budgeting, SAKIP coaching, and improving the quality of APIP.

Keywords: performance, accountability

ABSTRAK

Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dibutuhkan strategi untuk peningkatannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah *Importance Performance Analysis*, dan *Analytical Hierarchy Process*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor adalah penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP.

Kata kunci: kinerja, akuntabilitas

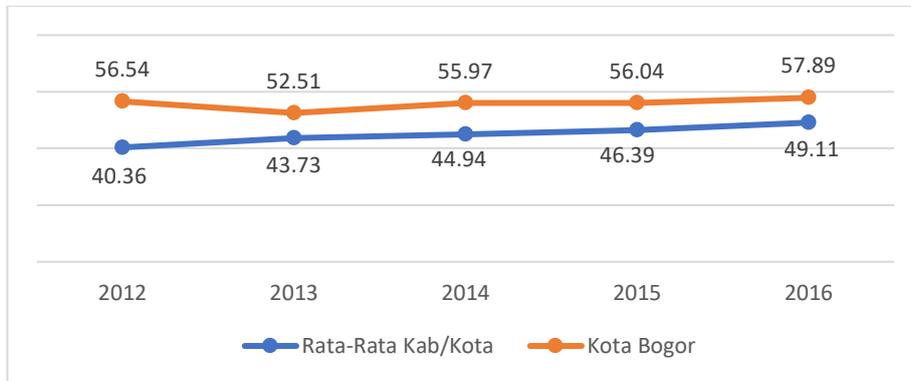
PENDAHULUAN

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparat pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat

output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (LAN dan BPKP, 2000). Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan *input* tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa selain laporan keuangan setiap instansi pemerintah juga wajib menyusun laporan kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur



Gambar 1 Tren Nilai AKIP Kota Bogor dan Rata-rata Nilai AKIP Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016

Sumber: KemenPANRB (2017)

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama pemerintah dengan menjadikannya sebagai salah satu dari tiga sasaran reformasi birokrasi. Selain itu, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu sub indikator sasaran pokok pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dimana pada tahun 2019 pemerintah menargetkan 50% pemerintah kabupaten/kota memiliki tingkat akuntabilitas yang baik. Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan SAKIP masih belum optimal. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih mendapatkan nilai 49,11 atau masih dalam predikat “C”, yang berarti masih memerlukan banyak perbaikan mendasar dalam penerapan SAKIP. Dari 475 daerah kabupaten/kota

yang dievaluasi, baru terdapat dua daerah yang mendapatkan nilai A (0,42%), yakni Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebagian besar masih mendapatkan nilai dibawah B.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengemukakan bahwa masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja daerah kabupaten/kota dikarenakan tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan yang tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Permasalahan tersebut berpotensi menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Apabila berkaca terhadap daerah yang telah berhasil dalam penerapan SAKIP, Pemerintah Kota Bandung misalnya, telah berhasil melakukan penghematan anggaran kurang

lebih 35% atau setara dengan 2 triliun rupiah melalui *refocusing* kegiatan yang berimplikasi terhadap pengurangan jumlah kegiatan yang pada tahun 2016 mencapai 5.701 kegiatan, pada tahun 2017 menjadi 4.814 kegiatan. Sedangkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil melakukan *refocusing* kegiatan yang pada tahun 2016 terdapat 2.299 kegiatan menjadi 1.428 kegiatan pada tahun 2017, sehingga dapat melakukan penghematan anggaran hingga 1 triliun rupiah.

Masih rendahnya rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota terjadi pula di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Hasil evaluasi SAKIP Kota Bogor pada tahun 2016 masih mendapatkan nilai 57,89 atau masih dalam kategori CC, mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2015 yang mendapatkan nilai 56,04. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja Pemerintah Kota Bogor belum mengalami perbaikan yang signifikan. Oleh karena akuntabilitas kinerja merupakan salah satu target utama Pemerintah Kota Bogor, serta merupakan program prioritas pemerintah pusat, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian **“Bagaimana strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor?”**.

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor tahun 2011 mencapai 53,92 dan pada tahun 2016 hanya mencapai 57,89. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor tidak mengalami perbaikan yang signifikan dikarenakan hanya meningkat 3,97 dan masih dalam predikat CC. Oleh karena itu perlu dianalisis komponen-komponen apa saja yang menjadi kelemahan dalam penerapan SAKIP di Kota Bogor? Apabila telah dianalisis komponen-komponen yang menjadi kelemahan, maka dijadikan dasar untuk merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian pertama, Darwanis dan Chairunnisa (2013) meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui korelasi dan pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap AKIP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap AKIP Aceh. Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap AKIP Aceh. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap AKIP Aceh. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap AKIP Aceh.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kaltsum (2013) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel Intervening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *path*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh langsung terhadap AKIP. Sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap AKIP dan merupakan variabel *intervening* / variabel yang memediasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap AKIP.

Yusrianti dan Safitri (2015) melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai indeks capaian dan klasifikasi tingkat implementasi SAKIP pada SKPD dan mengetahui kendala-kendala dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pencapaian tingkat implementasi SAKIP pada LAKIP SKPD Kota Palembang berada tingkat klasifikasi kurang baik sehingga sangat memerlukan asistensi dalam penyusunan LAKIP oleh BPKP. Sementara berdasarkan hasil wawancara diketahui beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP SKPD antara lain lemahnya fungsi pengawasan dan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten dan tidak adanya reviu LAKIP sehingga tidak dapat mendeteksi LAKIP SKPD yang belum sesuai dengan pedoman. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaporan dan penyusunan laporan kinerja instansi, kurangnya komitmen pimpinan instansi tentang pelaksanaan SAKIP, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang membidangi pelaporan dan penyusunan LAKIP, serta lemahnya koordinasi antar bidang pada masing-masing SKPD juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya kualitas LAKIP SKPD di Kota Palembang.

Wardhana et al (2015) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan metode analisis regresi moderasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada AKIP, yang berarti kompetensi sangat membantu mewujudkan AKIP yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja

pemerintah. Sementara komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi pada AKIP. Komitmen organisasi memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan antara kompetensi dan AKIP, semakin tinggi komitmen organisasi kepala SKPD maka usaha untuk meningkatkan AKIP akan meningkat pula.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna dan Nasrah (2016) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan data primer berupa pengisian kuesioner oleh 78 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Sedangkan hasil dari uji F menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bogor, serta merumuskan strategi peningkatannya. Adapun pemilihan lokus penelitian ini dengan mempertimbangkan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor yang masih belum signifikan selama beberapa tahun terakhir, sementara akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program prioritas nasional dan prioritas Walikota Bogor. Perbedaan dengan penelitian terdahulu juga terdapat pada metode analisis, dimana penelitian ini menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk mengetahui persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dan kinerja mengenai implemementasi SAKIP. Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan digunakan sebagai

dasar perumusan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Perumusan strategi dengan menggunakan metode AHP dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pengambil kebijakan sehingga diharapkan akan lebih implementatif.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor pada bulan Februari sampai dengan Mei 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil pengisian kuesioner. Data sekunder yang digunakan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 2015-2019, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan lain sebagainya.

Tabel 1 Variabel Dan Atribut Penelitian

Variabel	Atribut
1. Perencanaan Kinerja	P1 Keselarasan antar dokumen perencanaan
	P2 Perencanaan kinerja berorientasi hasil
	P3 Penetapan target kinerja
	P4 Penetapan dan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama
	P5 Keterkaitan program/kegiatan dengan renstra
	P6 Penyusunan indikator kinerja individu
	P7 Penjabaran perjanjian kinerja
2. Pengukuran Kinerja	M1 Pengukuran kinerja berjenjang
	M2 Keandalan pengumpulan data kinerja
	M3 Pengumpulan data kinerja berkala
	M4 Pemanfaatan teknologi informasi
	M5 Pemanfaatan pengukuran kinerja
3. Pelaporan Kinerja	R1 Penyajian informasi analisis pencapaian kinerja tujuan/ sasaran
	R2 Penyajian perbandingan data kinerja yang memadai
	R3 Penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya
	R4 Keandalan informasi kinerja
	R5 Pemanfaatan pelaporan kinerja
4. Evaluasi Internal	E1 Pemantauan rencana aksi kinerja secara periodik
	E2 Evaluasi keberhasilan atau kegagalan program
	E3 Perumusan rekomendasi perbaikan perencanaan/ peningkatan kinerja
	E4 Penyampaian hasil evaluasi
	E5 Pemanfaatan hasil evaluasi

Analisis komponen-komponen yang menjadi kelemahan penerapan SAKIP menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) melalui pengisian kuesioner oleh seluruh pejabat yang membidangi perencanaan dan

pelaporan di tingkat perangkat daerah sebanyak 37 orang. IPA adalah sebuah teknik analisis yang diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977), yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus

ditunjukkan oleh suatu organisasi. Kuesioner yang digunakan berisi variabel dan atribut penelitian (Tabel 1) yang mengacu pada template evaluasi SAKIP

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Langkah pertama untuk analisis IPA adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk setiap item dari atribut dengan rumus:

$$\bar{X}_i = \frac{\sum_{j=1}^k x_{ij}}{n} \qquad \bar{Y}_i = \frac{\sum_{j=1}^k y_{ij}}{n}$$

- dengan : \bar{X}_i = Bobot rata-rata tingkat kepuasan item ke-i
- \bar{Y}_i = Bobot rata-rata tingkat kepentingan item ke-i
- n = Jumlah responden/sampel

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk keseluruhan item dengan rumus:

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^p \bar{X}_j}{p} \qquad \bar{y}_i = \frac{\sum_{j=1}^p \bar{Y}_j}{p}$$

- dengan : \bar{X}_i = Nilai rata-rata kepuasan item
- \bar{Y}_i = Nilai rata-rata kepentingan item
- p = Jumlah item

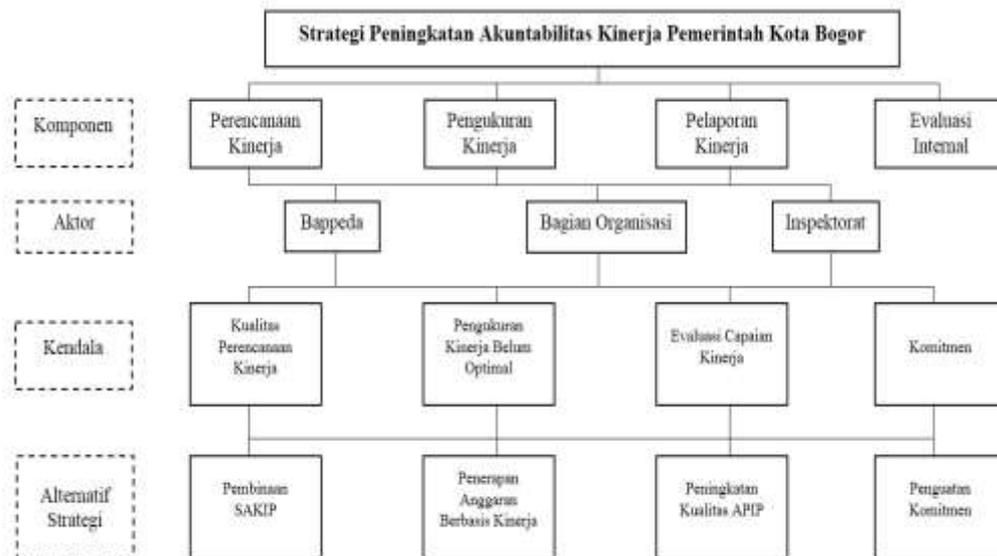
Setelah diperoleh bobot kepuasan dan kepentingan item serta nilai rata-rata kepuasan dan kepentingan item, kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam kuadran IPA.

Perumusan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui wawancara terhadap pejabat dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, dan Inspektorat. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, yang menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya. Kriteria pakar atau ahli yang digunakan dalam analisis AHP ini bukan berarti orang tersebut harus jenius, pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut (Falatehan, 2016).

Struktur AHP (Gambar 2) yang digunakan terdiri dari lima hirarki (level). Hirarki pertama adalah *goal* atau tujuan utama yakni strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Hirarki kedua adalah komponen-komponen utama di dalam implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Hirarki ketiga adalah aktor yang memiliki peran utama di dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, yaitu Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat. Hirarki keempat adalah kendala-kendala di dalam implementasi SAKIP di Kota Bogor yang diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, dan hasil dari pengolahan IPA. Adapun kendala-kendala dalam implementasi SAKIP di Kota Bogor adalah kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja belum optimal, evaluasi capaian kinerja, dan komitmen. Hirarki kelima adalah alternatif pemilihan

strategi yang merupakan cara mengatasi kendala-kendala dalam rangka upaya peningkatan implementasi SAKIP di Kota Bogor yaitu pembinaan SAKIP,

penerapan anggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan penguatan komitmen.



Gambar 2 Struktur hirarki AHP strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor

Gambaran tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat diketahui dari hasil evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor. Sedangkan gambaran mengenai tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Rata-rata nilai akuntabilitas kinerja tingkat perangkat daerah tahun 2015 hanya mencapai 51,73 atau dengan kategori CC. Pada tahun 2015, dari total 35 perangkat daerah hanya terdapat 1 perangkat daerah yang mencapai nilai B, sedangkan sisanya memperoleh nilai CC, C, dan D. Pada tahun 2016, dari total 37 perangkat daerah, rata-rata nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami penurunan menjadi 46,15 atau dengan kategori C. Perangkat daerah yang memperoleh nilai B bertambah menjadi 2, namun perangkat daerah yang memperoleh nilai C juga bertambah menjadi 18 perangkat daerah.

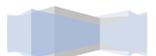
Tabel 2 Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2015 dan 2016

Nilai SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah	
	Tahun 2015	Tahun 2016
AA	-	-
A	-	-
BB	-	-
B	1	2
CC	24	16
C	7	18
D	3	1

Sumber: Inspektorat Kota Bogor (2016)

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 memperoleh nilai 56,04 atau dengan predikat "CC". Sedangkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 memperoleh nilai 57,89 atau dengan predikat "CC". Adapun uraian singkat mengenai hasil evaluasi SAKIP Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Sudah terdapat perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan dan penguatan manajemen berbasis kinerja, baik di tingkat Pemerintah Kota maupun di satuan kerjanya. Pemerintah Kota Bogor juga mulai melakukan penjenjangan atau pembagian (*cascading*) kinerja mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh tingkat eselon IV.
- b. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan rencana strategis pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau *outcome* yang mungkin belum selesai (tertunggak). Praktik seperti ini tidak mendorong SKPD untuk mengutamakan kinerja atau menerapkan anggaran berbasis kinerja.
- d. Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara berjenjang, belum sepenuhnya dimonitor, dievaluasi, dan disimpulkan secara periodik dan dikaitkan dengan reward tertentu.
- e. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program. Pemerintah Kota Bogor masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata



Tabel 3 Hasil evaluasi atas SAKIP Kota Bogor Tahun 2015 dan 2016

Komponen	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	19,64	30	21,43
b. Pengukuran Kinerja	25	10,39	25	10,47
c. Pelaporan Kinerja	15	9,26	15	10,09
d. Evaluasi Internal	10	5,06	10	5,32
e. Capaian Kinerja	20	11,69	20	10,58
Nilai Hasil Evaluasi	100	56,04	100	57,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC		CC	

Sumber: KemenPANRB (2017).

Hasil *Importance Performance Analysis*

Gambaran persepsi responden terhadap implementasi SAKIP dapat diketahui melalui perhitungan skor setiap atribut tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Langkah selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian setiap atribut, tingkat kesesuaian setiap variabel, dan tingkat kesesuaian keseluruhan. Tingkat kesesuaian diperoleh melalui skor tingkat kinerja setiap atribut dibagi dengan skor tingkat kepentingan setiap atribut. Apabila tingkat kesesuaian setiap atribut \geq tingkat kesesuaian keseluruhan, maka dapat dikatakan persepsi responden terhadap atribut tersebut telah baik. Sebaliknya, apabila tingkat kesesuaian setiap atribut $<$ tingkat kesesuaian keseluruhan, maka dapat dikatakan persepsi responden terhadap atribut tersebut belum baik. Berdasarkan hasil perhitungan (Tabel 4) tingkat kesesuaian

setiap atribut, diketahui bahwa terdapat 14 atribut yang dapat dikategorikan Baik, dan 8 atribut yang dikategorikan Belum Baik. Dalam komponen perencanaan kinerja terdapat lima atribut yang termasuk dalam kategori Belum Baik yakni (P1) Keselarasan antar dokumen perencanaan, (P2) Perencanaan kinerja berorientasi hasil, (P5) Keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, (P6) Penyusunan indikator kinerja individu, dan (P7) Penjabaran perjanjian kinerja. Dalam komponen pengukuran kinerja terdapat tiga atribut yang termasuk dalam kategori Belum Baik yakni (M1) Pengukuran kinerja berjenjang, (M4) Pemanfaatan teknologi informasi, dan (M5) Pemanfaatan pengukuran kinerja. Dalam komponen pelaporan kinerja hanya terdapat satu atribut yang termasuk dalam kategori Belum Baik yakni (R3) Penyajian informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 4 Tingkat Kesesuaian Per Atribut

Atribut	Tingkat Kepentingan		Tingkat Kinerja		Tingkat Kesesuaian (%)	Kategori
	Skor	Rataan	Skor	Rataan		
P1	169	4,57	110	2,97	65,09	Belum Baik
P2	162	4,38	109	2,95	67,28	Belum Baik
P3	159	4,3	118	3,19	74,21	Baik
P4	151	4,08	112	3,03	74,17	Baik
P5	166	4,49	112	3,03	67,47	Belum Baik
P6	165	4,46	111	3	67,27	Belum Baik
P7	155	4,19	116	3,14	74,84	Belum Baik
M1	166	4,49	106	2,86	63,86	Belum Baik
M2	158	4,27	121	3,27	76,58	Baik
M3	159	4,3	119	3,22	74,84	Baik

Atribut	Tingkat Kepentingan		Tingkat Kinerja		Tingkat Kesesuaian (%)	Kategori
	Skor	Rataan	Skor	Rataan		
M4	156	4,22	100	2,7	64,10	Belum Baik
M5	163	4,41	90	2,43	55,21	Belum Baik
R1	153	4,14	115	3,11	75,16	Baik
R2	151	4,08	123	3,32	81,46	Baik
R3	154	4,16	104	2,81	67,53	Belum Baik
R4	153	4,14	127	3,43	83,01	Baik
R5	151	4,08	115	3,11	76,16	Baik
E1	157	4,24	124	3,35	78,98	Baik
E2	156	4,22	119	3,22	76,28	Baik
E3	157	4,24	115	3,11	73,25	Baik
E4	152	4,11	113	3,05	74,34	Baik
E5	153	4,14	127	3,43	83,01	Baik
Total	3466	93,68	2506	67,73	72,30	

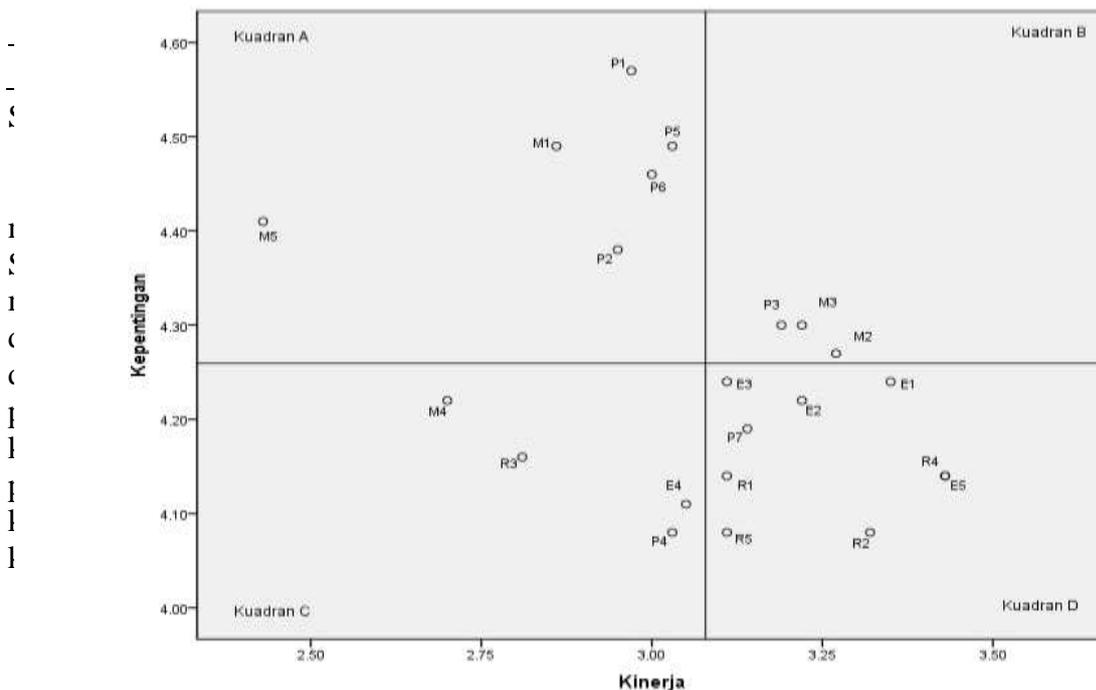
Sumber: Pengolahan data primer (2018)

Sedangkan perhitungan tingkat kesesuaian setiap variabel menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang termasuk dalam kategori Belum Baik yakni variabel perencanaan kinerja dan

variabel pengukuran kinerja. Sementara variabel pelaporan kinerja dan variabel evaluasi internal termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 5 Tingkat kesesuaian per komponen

Variabel	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kinerja	Tingkat Kesesuaian (%)	Kategori
Perencanaan Kinerja	1127	788	69,92	Belum Baik
Pengukuran Kinerja	802	536	66,83	Belum Baik
Pelaporan Kinerja	767	584	76,64	Baik



Gambar 3. Diagram Kartesius

Sumber: Pengolahan data primer (2018)



Gambar 3 menunjukkan terdapat enam atribut yang berada di dalam kuadran A, tiga atribut pada kuadran B, empat atribut pada kuadran C, serta sembilan atribut pada kuadran D. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran A yang merupakan faktor-faktor yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah:

a. (P1) Keselarasan antar dokumen perencanaan

Atribut P1 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa masih banyak dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah yang belum selaras dengan RPJMD Kota Bogor, sementara responden menilai atribut ini sangat penting. Hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi KemenPANRB di dalam laporan hasil evaluasi, dimana Pemerintah Kota Bogor agar memastikan tersedianya RPJMD dan Rencana Strategis yang lebih selaras. Keselarasan merupakan syarat utama dari kualitas perencanaan kinerja yang baik, sehingga diharapkan sasaran kinerja perangkat daerah akan memiliki korelasi atau memiliki hubungan kausalitas terhadap sasaran kinerja tingkat kota yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.

b. (P2) Perencanaan kinerja berorientasi hasil

Atribut P2 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai perencanaan kinerja di tingkat perangkat daerah masih belum berorientasi hasil, sementara atribut ini dianggap sangat penting. Hal ini sejalan pula dengan salah satu rekomendasi KemenPANRB di dalam laporan hasil evaluasi, dimana Pemerintah Kota Bogor agar memastikan tersedianya RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang lebih terukur, menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan, serta dapat diketahui dan dimonitor hasilnya.

c. (P5) Keterkaitan program/kegiatan dengan renstra

Atribut P5 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa masih banyak program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak memiliki keterkaitan atau bukan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD, sementara responden menganggap atribut ini sangat penting.

d. (P6) Penyusunan indikator kinerja individu

Atribut P6 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah belum dimanfaatkan untuk penyusunan indikator kinerja sampai dengan staf pelaksana, sementara responden menganggap atribut ini sangat penting. Hal ini sejalan dengan hasil observasi penulis, bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyusunan perjanjian kinerja untuk tingkat eselon 2, 3, dan 4, namun belum dimanfaatkan untuk penyusunan indikator kinerja staf pelaksana.

e. (M1) Pengukuran kinerja berjenjang

Atribut M1 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor belum dilakukan sampai dengan staf pelaksana, sementara responden menganggap hal ini sangat penting. Berdasarkan hasil observasi penulis, setiap akhir tahun anggaran telah dilaksanakan pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, namun hanya untuk pimpinan perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

f. (M5) Pemanfaatan pengukuran kinerja

Atribut M5 yang berada pada kuadran A menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang selama ini telah

dilakukan belum dijadikan dasar penilaian kinerja, sementara responden menganggap atribut ini sangat penting. Hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi KemenPANRB yakni agar Pemerintah Kota Bogor memastikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani dimonitor, diukur, dan disimpulkan dan dijadikan dasar penerapan sistem penghargaan dan sanksi atas capaian kinerja yang pantas dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan budaya kinerja.

Perumusan Alternatif Strategi

Perumusan alternatif strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penyusunan bobot prioritas dari pengolahan kuesioner AHP pada level komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor adalah perencanaan kinerja sebesar 0.488, pengukuran kinerja sebesar 0.259, evaluasi internal sebesar 0.170, dan pelaporan kinerja sebesar 0,083. Besarnya bobot komponen perencanaan kinerja dikarenakan dalam implementasi SAKIP, proses manajemen kinerja dimulai sejak tahap perencanaan. Perencanaan kinerja memuat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan atau dicapai pada akhir periode waktu perencanaan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan juga dilengkapi dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Disamping itu, dalam perencanaan kinerja juga harus dilakukan proses penurunan dan penyelarasan (*cascading*) kinerja sampai dengan unit organisasi di level yang paling bawah, sehingga seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki relevansi dan hubungan kausalitas terhadap upaya pencapaian visi misi.

Komponen pengukuran kinerja juga memiliki pengaruh cukup besar terhadap implementasi SAKIP. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan indikator-indikator kinerja yang terdapat di dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam rangka pengendalian proses pencapaian kinerja maka pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala (bulanan/triwulan/semester). Pengukuran kinerja juga diharapkan dilakukan secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana, serta hasilnya dijadikan dasar dalam penilaian kinerja.

Untuk level aktor diperoleh bobot prioritas yang relatif tidak terlalu berbeda jauh, dimana Bappeda merupakan aktor yang memiliki peran terbesar dengan nilai 0.352, diikuti Bagian Organisasi dengan nilai 0.348, dan Inspektorat dengan nilai 0.300. Besarnya bobot Bappeda dikarenakan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama di bidang perencanaan yang merupakan komponen utama di dalam penyelenggaraan SAKIP. Bappeda memiliki peran penting di dalam proses pengejawantahan visi misi kepala daerah yang akan diintervensi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah. Pada komponen pengukuran dan evaluasi kinerja, Bappeda memiliki peran untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Bagian Organisasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja, baik tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan, baik untuk tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah. Bagian Organisasi juga memiliki tugas untuk menyusun laporan kinerja tingkat kota. Inspektorat melalui APIP memiliki tugas untuk melakukan review terhadap laporan kinerja tingkat kota yang disusun oleh Bagian Organisasi. Pelaksanaan review tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,

keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Selain itu, Inspektorat juga

memiliki tugas untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada perangkat daerah.



Gambar 4 Struktur dan nilai bobot hirarki strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor

Untuk level kendala diperoleh bobot dengan urutan prioritas berturut-turut adalah komitmen sebesar 0.334, kualitas perencanaan kinerja sebesar 0.235, pengukuran kinerja belum optimal sebesar 0.220, dan evaluasi capaian kinerja sebesar 0.212. Besarnya kendala dalam hal komitmen sejalan dengan hasil penelitian Yusrianti dan Safitri (2015) yang menyatakan bahwa kurangnya komitmen pimpinan instansi menjadi salah satu faktor masih rendahnya kualitas LAKIP SKPD di Kota Palembang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wardhana et al (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi kepala SKPD maka usaha untuk meningkatkan AKIP akan meningkat pula. Kualitas perencanaan kinerja juga merupakan kendala yang harus diperbaiki. Perencanaan kinerja yang berkualitas mensyaratkan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja di berbagai tingkatan. Hal ini mutlak diperlukan agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dan akan dilaksanakan memiliki keterkaitan atau merupakan penyebab tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk level strategi yang memiliki bobot terbesar adalah penguatan komitmen sebesar 0.390. Prioritas strategi selanjutnya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 0.245, diikuti pembinaan SAKIP sebesar 0.212, dan peningkatan kualitas APIP sebesar 0.152. Penguatan komitmen, mulai dari kepala daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah merupakan hal yang sangat elementer dalam keberhasilan implementasi SAKIP. Hal itu dikarenakan dalam penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen semata, serta bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan, melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi. Sementara penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu strategi untuk mendukung terwujudnya Result Oriented Government. Inti dari strategi ini adalah proses penganggaran tidak hanya berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah semata, namun menekankan pentingnya

pertanggungjawaban kinerja terlebih dahulu sebelum proses penganggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip money follow program, program follow result. Apabila anggaran berbasis kinerja dapat diterapkan, maka diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh pelaksanaan program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau merupakan cara yang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, maka strategi utama yang harus dilakukan adalah penguatan komitmen. Penguatan komitmen merupakan keniscayaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan langkah awal dan kunci utama di dalam penerapan SAKIP. Penguatan komitmen dapat dilakukan mulai dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Walikota beserta seluruh pimpinan perangkat daerah, untuk mulai ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang merupakan variabel utama di dalam implementasi SAKIP. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana penerapan SAKIP tidak hanya menghasilkan berbagai macam dokumen, melainkan pemanfaatan dokumen tersebut di dalam proses manajemen kinerja. Langkah yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan komitmen adalah Pemerintah Kota Bogor harus mulai memanfaatkan dokumen perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem reward and punishment. Pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan harus mulai dimonitor secara berkala, diukur, dievaluasi serta dijadikan dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Tolak ukur penerapan mekanisme tersebut adalah terdapat perbedaan antara

pejabat/pegawai yang berhasil mencapai target kinerja dengan yang tidak mencapai target kinerja. Penerapan mekanisme ini diharapkan akan mendorong para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk komit terhadap implementasi SAKIP dan fokus terhadap kerjanya masing-masing. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor harus mulai menerapkan pemberian tunjangan berbasis kinerja. Tunjangan kinerja yang diberikan harus didasarkan pada capaian indikator kinerja masing-masing individu pegawai. Penyusunan indikator kinerja individu dapat dilakukan melalui proses penurunan dan penyesuaian (*cascading*) kinerja pimpinan perangkat daerah ke level pejabat eselon III, eselon IV, sampai dengan staf pelaksana. Indikator kinerja individu kemudian dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja.

Strategi yang kedua adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap serapan anggaran saja, tetapi dilakukan pula terhadap capaian target-target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan. Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan salah satu dasar perencanaan anggaran tahun selanjutnya. Dengan demikian penerapan anggaran berbasis kinerja mensyaratkan seluruh perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran untuk tahun selanjutnya.

Strategi yang ketiga adalah pembinaan SAKIP. Pembinaan SAKIP dapat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan

teknis kepada seluruh perangkat daerah, khususnya terkait komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang memiliki bobot terbesar dalam implementasi SAKIP. Peran pimpinan perangkat daerah sangat penting dalam penerapan SAKIP. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pimpinan perangkat daerah mengenai SAKIP sehingga akan menambah komitmen untuk terus mengawal penerapannya di lingkungannya masing-masing. Sementara peran Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga tidak kalah penting, dikarenakan mereka merupakan pejabat teknis yang mengkoordinasikan penerapan SAKIP di masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan bimbingan teknis penerapan SAKIP kepada seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Apabila pemahaman mengenai SAKIP semakin meningkat diharapkan terjadi perbaikan manajemen kinerja di seluruh perangkat daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Strategi yang terakhir adalah peningkatan kualitas APIP. Inspektorat melalui APIP memiliki tugas untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di tingkat perangkat daerah. Sebagai evaluator sudah seharusnya APIP memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap SAKIP itu sendiri. Namun pada saat pelaksanaan evaluasi, seringkali dijumpai perbedaan persepsi, baik antara APIP selaku pihak evaluator dengan perangkat daerah yang dievaluasi, bahkan diantara sesama evaluator itu sendiri. Langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan bimbingan teknis mengenai tata cara evaluasi SAKIP terhadap seluruh APIP. Apabila kualitas APIP semakin meningkat dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, maka diharapkan akan menambah peran Inspektorat dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di seluruh perangkat daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

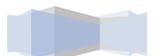
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa atribut yang menjadi kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Sedangkan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor berdasarkan urutan prioritasnya adalah penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP.

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran adalah (1) untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, diperlukan soliditas antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, dan Inspektorat selaku aktor utama dalam penerapan SAKIP; (2) diperlukan komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana di seluruh perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP; dan (3) untuk mendapatkan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor yang lebih komprehensif, perlu dilakukan kajian lebih lanjut khususnya terkait dengan penganggaran berbasis kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanis, Chairunnisa S. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 6(2):150-174.
- Falatehan AF. 2016. *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta (ID): Indomedia Pustaka.

- Inspektorat Kota Bogor. 2016. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- Kaltsum U. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(1):1-14.
- [Kemenpanrb] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2016. Hasil Evaluasi atas Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Jakarta (ID): Kemenpanrb.
- [Kemenpanrb] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. Hasil Evaluasi atas Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Jakarta (ID): Kemenpanrb.
- [Kemenpanrb] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta (ID): Kemenpanrb.
- [LAN; BPKP] Lembaga Administrasi Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (ID). 2000. "Akuntabilitas dan Good Governance". *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta (ID): LAN.
- Martilla JA, James JC. 1977. *Importance Performance Analysis*. *Journal of Marketing*. 77-79.
- Rasul S. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta (ID): PNRI.
- Ratna I, Nasrah H. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19 (1): 56-79.
- Saaty TL. 1994. *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process*. Pittsburgh (USA): RWS Publications.
- Wardhana GAS, Rasmini NK, Astika IBP. 2015. Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 4(9): 571-598.
- Yusrianti H, Safitri RH. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 13(4): 545-558.



STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH EKONOMI KABUPATEN BANGKALAN

Regional Development Strategy of Economy in Bangkalan Regency

Ahmad Herlyasa Sosro Pratama¹, Ernan Rustiadi², Yusman Syaukat³

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Email: ahmadherlyasa@yahoo.co.id

²Staf Pengajar Departemen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian. IPB.
Email: ernan@indo.net.id

³Staf Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan
Manajemen. IPB. Email: ysyaukat@gmail.com

ABSTRACT

Bangkalan City became one of the regional activities of regional centers in Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) Regional Units with Surabaya as its center. Therefore, to compensate for development with other SWP areas. In general, the purpose of this study is to formulate the strategy for the development of the existing economic region in Bangkalan regency. through Input-Output analysis (I-O) and Analithical Hierarchy Processs (AHP). There are 4 steps identified through the I-O analysis, including the linkages of economic sectors, key sectors, economic sector multipliers, and investment impacts. The I-O analysis is performed as an alternative basis for the strategy that will be later responded by the AHP analysis. The alternative strategic priorities generated through AHP analysis will be translated into policy recommendations in determining the priority of investment sector economic development in Bangkalan District,

Keywords: Regional development, Input-Output, economic sector, investment polic

ABSTRAK

Kota Bangkalan menjadi salah satu pusat kegiatan skala regional kabupaten dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) dengan Surabaya sebagai pusatnya. Maka dari itu, untuk mengimbangi pembangunan deagan daerah - daerah SWP lainnya. Secara umum, tujuan kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan wilayah ekonomi yang ada di Kabupaten Bangkalan. melalui analisis *Input-output* (I-O) dan *Analithical Hierarchy Processs* (AHP). Terdapat 4 langkah diidentifikasi melalui analisis I-O, antara lain keterkaitan sektor ekonomi, sektor kunci, pengganda sektor ekonomi, dan dampak investasi. Analisis I-O dilakukan sebagai dasar alternatif strategi yang nanti akan direspons oleh analisis AHP. Prioritas alternatif strategi yang dihasilkan melalui analisis AHP akan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dalam menentukan prioritas pengembangan investasi sektor ekonomi di Kabupaten Bangkalan,

Kata Kunci : Pengembangan wilayah, Input-Output, sektor ekonomi, kebijakan investasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Madura yang termasuk dalam Kawasan Strategis Ekonomi Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Bangkalan masih bertumpu dari sektor pertanian yang ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian yang masih menjadi kontributor terbesar sejak tahun 2009 hingga 2013

dengan rata – rata mencapai 30,32%. Sektor pertanian Kabupaten Bangkalan masih bertumpu pada pertanian rakyat dengan rata – rata 60% tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Jhingan (2008) berpendapat bahwa perekonomian suatu daerah dikatakan masih dalam kondisi tertinggal apabila daerah tersebut masih menggantungkan struktur perekonomiannya pada sektor pertanian *on farm*. Kondisi

ini masih menjadikan Kabupaten Bangkalan masih menjadi salah satu 5 daerah paling tertinggal di Provinsi Jawa Timur bersama dengan Kabupaten Probolinggo, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan memiliki prosentase 23,23% penduduk miskin, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase penduduk miskin Jawa Timur (BPS, 2016).

Sebagai bagian dari kota Ordo IIIa yang memiliki ketentuan sebagai wilayah yang dapat melayani penduduk dengan kapasitas sebesar 150.000–500.000 jiwa. Kota Bangkalan menjadi salah satu pusat kegiatan skala regional kabupaten dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) plus dengan core wilayah SWP di Kota Surabaya, seperti halnya Jabodetabeka di wilayah Jakarta dan Sekitarnya, Kabupaten Bangkalan harus mampu menata dirinya menjadi wilayah yang mampu berkembang, berkompetisi dan nyaman bagi para investor.

Untuk meningkatkan kapasitas input dasar tersebut, diperlukan investasi terus menerus, dalam perspektif ini, pembangunan ekonomi yang optimal memerlukan investasi pada input dasar secara berimbang. Dari sisi pemerintah, investasi pembangunan berimbang diindikasikan dari alokasi anggaran pembangunan (APBD) serta promosi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah bangkalan. Alokasi anggaran pembangunan yang berimbang dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan produktivitas masing – masing sector.(Rustiadi, 2011)

Sektor - sektor ekonomi yang sangat berpengaruh yang memiliki potensi peningkatan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki harus dioptimalisasi dan memunculkan inisiatif alokasi investasi pembangunan bagi pemerintah bangkalan ataupun sektor swasta untuk terus menanamkan modalnya. Peluang pengembangan wilayah

pembangunan melalui pendekatan strategis ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mengejar keteringgalan serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu, **“Bagaimana Strategi Pengembangan Wilayah Ekonomi Kabupaten Bangkalan ?”**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bangkalan. Untuk menjawab tujuan utama tersebut maka tujuan spesifik kajian ini adalah:

1. Mengetahui nilai keterkaitan sektor bagi perekonomian di Kabupaten Bangkalan
2. Mengetahui nilai pengganda output dan pendapatan bagi perekonomian di Kabupaten Bangkalan
3. Mengetahui dampak pengaruh investasi sektor bagi perekonomian di Kabupaten Bangkalan
4. Merumuskan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, yang dipilih berdasarkan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan. Pertimbangan tersebut yaitu Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang tergabung dalam kawasan ekonomi nasional Gerbangkertosusila dan Kabupaten Bangkalan menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur kawasan . Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang sebagian besar berasal dari Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur 2010

yang dikonversi menjadi Tabel Input Output Kabupaten Bangkalan melalui pendekatan Location Quation yang menggunakan data PDRB tahun 2013. Selain Tabel Input-Output digunakan juga data pendukung lainnya yang juga merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari instansi-instansi terkait yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, dan dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pemilihan Responden

Pemilihan responden diperlukan untuk kebutuhan analisis Analytical Hierarchy Process yang ditentukan secara purposive yang melibatkan responden ahli dalam penentuan kebijakan pengembangan kawasan berdasarkan pada Kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berdasarkan Perpres No. 27 tahun 2008, Perpres No. 23 Tahun 2009 dan rancangan revisi Perpres No. 27 Tahun 2008, seperti Instansi BPWS, Provinsi Jawa Timur, dan *stakeholder* yang juga memiliki peran dalam perencanaan dan pembangunannya, seperti akademisi/konsultan dan investor.

METODOLOGI

Tabel 1 Metode Analisis

No	Tujuan	Metode Analisis	Output
1	Menganalisis keterkaitan sektor dan angka pengganda	Forward dan Backward Linkage	Teridentifikasi nya dampak keterkaitan sektor
2	Menganalisis angka pengganda output dan pendapatan	Input – Output	Teridentifikasi nya dampak pengganda output, PDRB dan pendapatan
3	Menganalisis dampak investasi	Input – Output	Teridentifikasi nya dampak investasi sektor
4	Merumuskan strategi pengembangan wilayah	Analytical Hierarchy Process	Terumuskannya prioritas strategi dalam pengembangan

1. Agregasi Sektor Input-Output

Agregasi sektor bertujuan untuk mensimplifikasi serta mensinkronisasi pengelompokkan sektor – sektor didalam struktur ekonomi daerah. Data input output awal yang digunakan adalah data input output berdasarkan atas total transaksi pembeli Provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang terdiri atas 110 sektor x 110 sektor (BPS Provinsi Jawa Timur, 2015). Selanjutnya dilakukan sinkronisasi sektor antara data input output Jawa Timur dengan PDRB Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Bangkalan. Terdapat 32 sektor dalam PDRB Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Bangkalan, yaitu :

- 1) Tanaman Bahan Makanan; 2) Tanaman Perkebunan; 3) Peternakan; 4) Kehutanan
- 5); Perikanan; 6) Minyak dan gas bumi; 7) Penggalian lainnya; 8) Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau; 9) Tekstil, Barang, kulit dan Alas Kaki; 10) Barang Kayu, dan Hasi Hutan Lainnya; 11) Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet; 12) Semen dan Barang Galian Bukan Logam; 13) Logam dasar, besi, dan baja; 14) Alat angkut, mesin, peralatan, dan barang lainnya; 15) Listrik; 16) Air bersih; 17) Bangunan; 18) Perdagangan besar dan eceran; 19) Hotel; 20) Restaurant; 21) Angkutan jalan raya; 22) Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan; 23) Jasa Penunjang Angkutan; 24) Pos dan

telekomunikasi; 25) Bank; 26) Lembaga keuangan tanpa bank; 27) Sewa bangunan; 28) Jasa perusahaan; 29) Administrasi pemerintahan dan pertahanan; 30) Sosial kemasyarakatan; 31) Hiburan dan rekreasi; dan 32) Perorangan, Rumahtangga, dan jasa lainnya.

2. Penyesuaian Koefisien

Penyesuaian koefisien Input-Output wilayah dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)*. Metode ini dipilih karena kemudahan dan ketersediaan data yang digunakan dibandingkan dengan metode lain. *Location quotient (LQ)* dapat dihitung menggunakan data PDRB Bangkalan dan Jawa Timur dengan rumus yang dijabarkan sebagai berikut:

$$LQ_i = (e_i/e) / (E_i/E)$$

Keterangan :

- LQ_i** = nilai LQ untuk sektor i di Kabupaten Bangkalan
- e_i** = PDRB sektor i di Kabupaten Bangkalan
- e** = PDRB seluruh sektor di Kabupaten Bangkalan
- E_i** = PDRB sektor i di Provinsi Jawa Timur
- E** = PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Timur

Nilai $LQ \geq 1$, maka nilai koefisien Jawa Timur dapat langsung diserap sebagai nilai koefisien Kabupaten Bangkalan, sedangkan $LQ < 1$, nilai koefisien tersebut harus dikalikan angka koefisien Jawa Timur untuk menyerapnya sebagai nilai koefisien Bangkalan. Penurunan tabel transaksi/tabel *Input-Output*, bagi sektor-sektor yang memiliki nilai koefisien ≥ 1 , perilaku Jawa Timur dalam tabel I-O dapat langsung diturunkan menjadi perilaku wilayah dalam tabel I-O Bangkalan (penurunan perilaku dilakukan per kolom). Sedangkan sektor yang memiliki koefisien < 1 , transaksi dikalikan dengan koefisien Bangkalan.

3. Analisis Keterkaitan

Analisis keterkaitan digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor. Keterkaitan ini terdiri dari, keterkaitan langsung ke depan, keterkaitan langsung ke belakang, keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang.

a. Keterkaitan Langsung ke Depan

Keterkaitan langsung ke depan menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Keterkaitan tipe ini dirumuskan sebagai berikut:

$$F(d)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

$F(d)_i$ = keterkaitan langsung ke depan sektor i

a_{ij} = unsur matrik koefisien teknis

b. Keterkaitan Langsung ke Belakang

Keterkaitan langsung ke belakang menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Keterkaitan tipe ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$B(d)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$B(d)_j$ = keterkaitan langsung ke belakang sektor i,

a_{ij} = unsur matrik koefisien teknis.

4. Analisis *Input Output*

Format dari tabel I-O terdiri dari suatu kerangka matriks berukuran “n x n” dimensi yang dibagi menjadi empat kuadran dan tiap kuadran mendeskripsikan suatu hubungan tertentu.



Tabel 2 Ilustrasi Tabel Input - Output

Alokasi Output Susunan Input			Permintaan Antara				Permintaan Akhir	Total Output
			Sektor Produksi					
			1	2	...	n		
Input Antara	Sektor produksi	1	X ₁₁	X ₁₂	...	X _{1n}	F ₁	X ₁
		2	X ₂₁	X ₂₂	...	X _{2n}	F ₂	X ₂
	
		n	X _{n1}	X _{n2}	...	X _{nn}	F _n	X _n
Jumlah Input Primer			V ₁	V ₂	...	V _n		
Total Input			X ₁	X ₂	...	X _n		

Tabel 2 diatas menjelaskan isian angka sepanjang baris (horisontal) yang memperlihatkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan, sebagian untuk memenuhi permintaan antara sebagian lagi untuk memenuhi permintaan akhir. Isian angka menurut kolom (vertikal) menunjukkan pemakaian input antara maupun input primer yang disediakan oleh sektor lain untuk kegiatan produksi suatu sektor. Secara horisontal permasalahannya adalah

$$\sum_{j=1}^i x_{ij} + F_i = X_i; \text{ untuk } i = 1, 2, 3 \text{ dst}$$

dimana x_{ij} adalah banyaknya output sektor i yang dipergunakan sebagai input oleh sektor j dan F_i adalah permintaan akhir terhadap sektor i serta X_i adalah jumlah output sektor i.

$$\sum_{i=1}^j x_{ij} + V_j = X_j; \text{ untuk } j = 1, 2, 3 \text{ dst}$$

Secara horizontal persamaannya adalah:

$$AX + F = X \text{ atau } (I - A) X = F \text{ atau } X = (I - A)^{-1} F$$

dimana V_j adalah input primer (nilai tambah bruto) dari sektor j

Secara umum apabila persamaan horizontal disubstitusikan kedalam persamaan vertical.

- I : Matriks identitas yang elemennya memuat angka satu pada diagonalnya dan nol pada selainnya
- F : Permintaan Akhir
- X : Jumlah Output
- (I - A) : Matriks Leontief
- (I - A)⁻¹ : Matriks Kebalikan Leontief

Untuk bisa digunakan menganalisa dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap perekonomian Madura maka dibutuhkan data input output Kabupaten Bangkalan tahun 2014 yang didapat dengan melakukan penyesuaian koefisien input output Jawa Timur. Penyesuaian koefisien input output dilakukan dengan metode *the simply location quotient* (SLQ) guna menganalisa kinerja ekonomi Madura apakah memiliki kinerja yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kinerja perekonomian Jawa Timur. Metode ini dipilih karena kemudahan dan ketersediaan data yang digunakan dibandingkan dengan metode lain.

5. Analisis Dampak Investasi

Untuk melihat dampak investasi pengembangan wilayah terhadap perekonomian Kabupaten Bangkalan digunakan dua pendekatan yakni pendekatan berdasarkan data input-output yang terbentuk dan pendekatan dengan menggunakan proses simulasi terhadap kegiatan investasi pengembangan wilayah. Rumus perhitungan mengenai dampak investasi dapat dilihat dibawah ini :

Keterangan:

a. Dampak Terhadap Pembentukan Output

$$\Delta X = (I-A)^{-1} \Delta Y$$

b. Dampak Terhadap Pendapatan Rumah Tangga

$$\Delta I = a_{n+1} (I-A)^{-1} \Delta Y$$

dimana :

ΔX = dampak terhadap pembentukan output

ΔI = dampak terhadap pendapatan rumah tangga

ΔY = investasi sektoral

$(I-A)^{-1}$ = matriks kebalikan Leontief

a_{n+1} = koefisien pendapatan

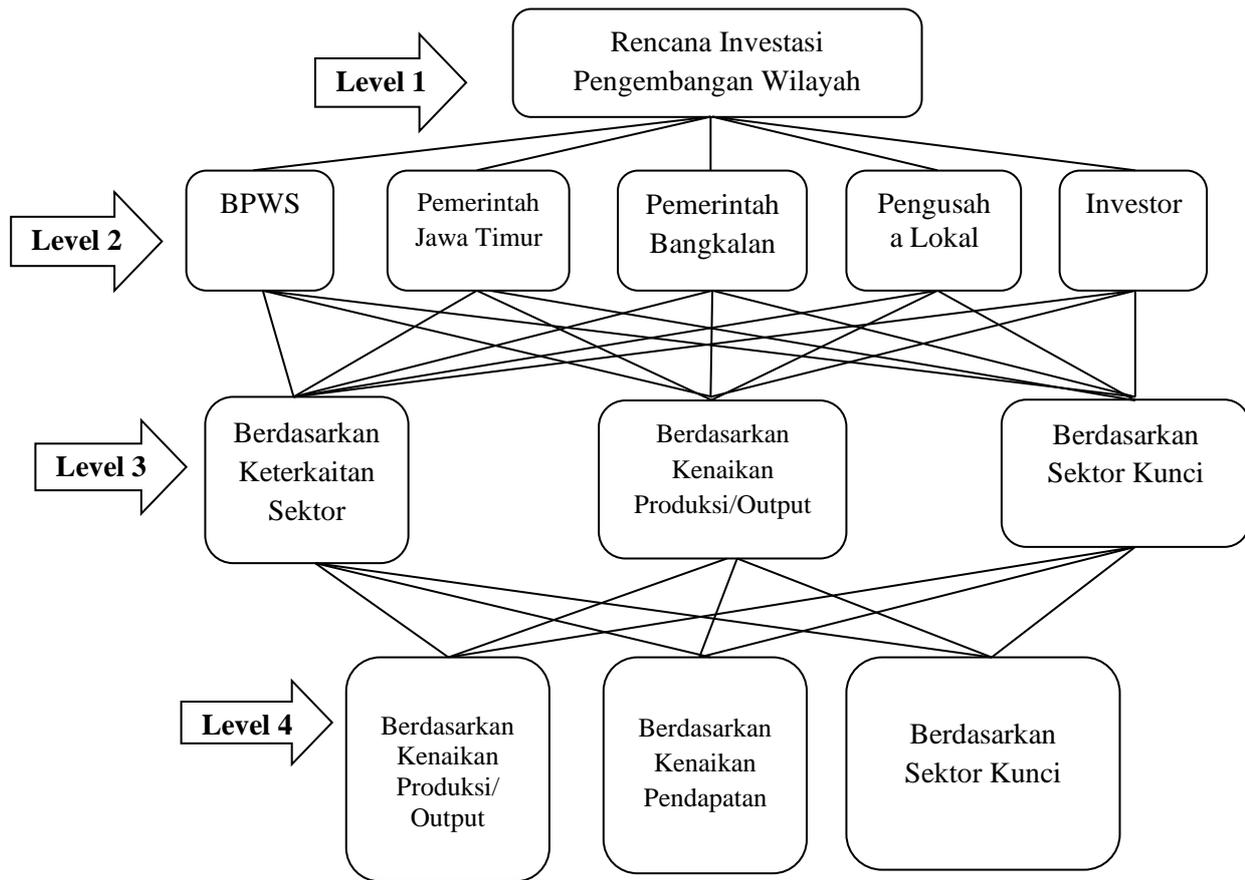
6. *Analysis Hierarchy Process* (AHP)

Analisis data yang digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan, terkait dengan upaya pengelolaan pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan adalah metode AHP (*analytical hierarchy process*). Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur, strategis dan dinamis serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara

subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibanding dengan variabel yang lain. Dengan berbagai pertimbangan kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada system tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam AHP adalah dekomposisi, komparatif judgement, sintesis prioritas dan konsistensi logika.

Dalam kajian pengembangan wilayah ekonomi Kabupaten Bangkalan ini, digunakan metode AHP untuk mendapatkan informasi kebijakan prioritas optimal terhadap perekonomian di Kabupaten Bangkalan, sehingga implementasi pembangunan kawasan tersebut diharapkan sesuai dengan tujuan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pemikiran, maka struktur hirarki pengembangan kawasan suramadu adalah sebagai berikut Gambar 1.





Gambar 1 Struktur Hirarki Pengembangan Wilayah Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Sumber: Data Diolah 2016

Keterangan :

Hierarki level 1 : Rencana Investasi pengembangan wilayah

Hierarki level 2 : *Stakeholder* perencana pengembangan wilayah Suramadu yang terdiri dari:

1. BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu)
2. Pemerintah Prov. Jatim
3. Pemerintah Kab. Bangkalan
4. Pengusaha lokal
5. Investor

Hierarki level 3 : Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah Suraadu yang terdiri dari:

1. Berdasarkan Keterkaitan Sektor
2. Berdasarkan Kenaikan Produksi / Output
3. Berdasarkan Sektor Kunci

Hierarki Level 4: Beberapa indikator sebagai dasar dari penentuan alternatif kebijakan

1. Kebijakan berdasarkan Kenaikan Produksi/Output
2. Kebijakan berdasarkan Kenaikan Pendapatan
3. Kebijakan berdasarkan Sektor Kunci

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterkaitan

1. Analisis Keterkaitan Ke Belakang

Besarnya nilai keterkaitan ke belakang total memiliki nilai lebih dari satu karena didalamnya juga memperhitungkan perubahan input dari suatu sektor yang dimaksud. Berdasarkan Tabel 3 dapat ditunjukkan bahwa 5 (lima) sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang total terbesar adalah sektor 8 :

Industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2.00283; sektor 22 : Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan sebesar 1.78777; sektor 21 : Angkutan Jalan raya sebesar 1.77316; sektor 26 : Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar 1.64438 dan sektor 10 : Barang Kayu, dan Hasi Hutan Lainnya sebesar 1.60480. Besarnya nilai keterkaitan ke depan total suatu sektor ditunjukkan dari besarnya nilai penjumlahan baris suatu sektor pada matriks kebalikan leontief.

Tabel 3 Lima Sektor Tertinggi Keterkaitan Total ke Belakang Tahun 2013

No.	Sektor	Keterkaitan Total Ke belakang
1	Industri makanan, minuman, dan tembakau	2.00283
2	Angkutan laut, sungai, dan danau	1.78777
3	Angkutan Jalan Raya	1.77316
4	Lembaga keuangan tanpa bank	1.64438
5	Barang kayu, dan hasil hutan lainnya	1.60480

Sumber: Data Diolah 2016

Sektor Industri makanan, minuman, dan tembakau memang memegang peranan penting kehidupan berekonomi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Maka, menjadi tak heran apabila industri ini memiliki keterkaitan ke belakang yang cukup tinggi secara langsung ataupun total. Dalam hal ini, industri di Kabupaten Bangkalan terutama di sektor industri makanan, minuman, dan tembakau tersebar di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Bangkalan, kecamatan Burneh, Kecamatan Socah, Kecamatan Modung, dan Kecamatan Tanah Merah. Industri - industri yang terdapat di 5 kecamatan

tersebut berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan 2015, termasuk ke dalam kategori home industri.

2. Analisis Keterkaitan Ke Depan

Analisa keterkaitan ke depan digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sektor dalam mendorong perkembangan produksi sektor lain melalui penyediaan output yang digunakan sebagai input yang bisa meningkatkan produksi sektor lain. Berikut adalah table sector dengan nilai keterkaitan total ke depan dengan nilai tertinggi:

Tabel 4 Lima Sektor Tertinggi Keterkaitan Total ke Depan Tahun 2013

No.	Sektor	Keterkaitan Total Ke Depan
1	Angkutan Jalan Raya	4.31715
2	Perdagangan Besar dan Eceran	3.91463
3	Tanaman Bahan makanan	2.27034
4	Bangunan	2.02698
5	Angkutan Laut, Sungai, Danau	1.54024

Sumber: Data Diolah 2016



Berdasarkan Tabel 4 dijelaskan bahwa lima sektor yang memiliki nilai keterkaitan ke depan total terbesar adalah sektor 21 : Angkutan jalan Raya sebesar 4.31715; sektor 18 : perdagangan besar dan eceran sebesar 3.91463; sektor; sektor 1 : tanaman bahan makanan sebesar 2.27034; sektor 17 : Bangunan sebesar 2.02698; dan sektor 22 Angkutan laut, sungai, dan danau. Besarnya nilai keterkaitan ke depan total lebih besar dari satu karena didalamnya juga memperhitungkan perubahan output dari sektor yang dimaksud. Keterkaitan ke depan total sektor 21 sebesar 4.31715 artinya adalah jika output sektor 21 meningkat satu rupiah maka akan meningkatkan distribusi output total sebesar 4.31715 rupiah yang dialokasikan ke sektor lain termasuk sektor 21 sendiri.

Pasca Jembatan Suramadu resmi dipergunakan bagi transportasi massal pada tahun 2010, angkutan jalan raya menjadi prioritas utama pilihan para pengguna transportasi umum di Kabupaten Bangkalan, begitu juga dengan angkutan antar kecamatan yang beroperasi di wilayah sekitar pelabuhan kamal Bangkalan. lebih menjadi pilihan masyarakat dalam bepergian. Jembatan Suramadu memang dirasa sangat efektif dari segi waktu dan juga efisien dari segi biaya jika dibandingkan dengan tarif kapal yang lebih mahal dari biaya masuk tol Jembatan Suramadu, sehingga penumpang

lebih memilih transportasi massal yang rutenya melewati jembatan Suramadu.

Effendi (2014) dan Yanti (2012) juga mengatakan Dengan adanya Jembatan Suramadu membawa manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat di Kabupaten Bangkalan antara lain mendorong pembangunan ekonomi, menghemat waktu bagi penumpang dan angkutan barang, dan bertambah kenyamanan dan perasaan menyenangkan. Semakin mudahnya akses dan transportasi ke Pulau Madura akan meningkatkan nilai investasi arus transportasi semakin lancar sebelum adanya Jembatan Suramadu masyarakat di Pulau Madura yang ingin pergi ke kota Surabaya hanya menggunakan alat transportasi laut Kapal Feri Perak – Kamal, satu- satunya akses dari Pulau Madura ke Surabaya dan sebaliknya. Berdasarkan data BPS 2016, terjadi kenaikan jumlah unit transportasi yang tercatat, bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan 3,1%.

Analisis Sektor Kunci

Sektor kunci memiliki kemampuan untuk menarik produksi sektor lainnya sekaligus yang memiliki kemampuan mendorong produksi sector lain yang lebih besar dari seluruh sektor ekonomi. Lima sektor tersebutlah bisa mempercepat perekonomian Madura karena jika ada *shock* positif maka akan memberikan dampak yang besar dan positif terhadap perekonomian.

Tabel 5. Kelompok sektor kunci pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan tahun 2013

Kelompok	ITKB	ITKD	Sektor
I	> 1	> 1	1,17,21,22,26,28
II	> 1	< 1	8,9,10,11,13,15,20,25,27,29
III	< 1	< 1	2,3,4,5,7,12,14,16,19,23,24,30,31,32
IV	< 1	> 1	6,18

Sumber: Data Diolah 2016

Sektor- sektor ini tanaman bahan makanan; sektor bangunan; sektor Angkutan Jalan Raya; sektor Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;

sektor Lembaga Keuangan tanpa Bank serta sektor Jasa Perusahaan. diharapkan menjadi proritas utama pembangunan di Kota Bangkalan, salah satu contoh adalah

Sektor tanaman Bahan makanan yang masuk dalam kategori 5 besar sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan tertinggi. Santoso (2012) dan Azmi (2012) menempatkan Kabupaten Bangkalan masih menjadikan sektor pertanian (sektor tanaman bahan makanan merupakan subsektor dari sektor pertanian, namun dalam kajian ini sektor tanaman bahan makanan menjadi sektor tersendiri) sebagai basis ekonomi masyarakat dan kontributor utama PDRB-nya.

Analisis Pegganda

1. Analisis Pegganda Output

Pegganda output menjelaskan tentang besarnya pengaruh perubahan

permintaan akhir pada peningkatan output diseluruh sektor perekonomian atau nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi adanya perubahan satu rupiah permintaan akhir dari suatu sektor. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa 5 (lima) sektor yang memiliki nilai pegganda output terbesar adalah sektor 21 : Angkutan jalan raya sebesar 4.31715; sektor 18 : perdagangan besar dan eceran sebesar 3.91463; sektor 1 : Tanaman bahan makanan sebesar 2.27034; sektor 17 : konstruksi sebesar 2.02698 dan sektor 22 : Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan sebesar 1.54024.

Tabel 6. 5 (lima) Sektor tertinggi nilai pegganda output tahun 2013

No	Sektor	Nilai Pegganda Output
1	Angkutan Jalan Raya	4.31715
2	Perdagangan Besar dan Eceran	3.91463
3	Tanaman Bahan makanan	2.27034
4	Bangunan	2.02698
5	Angkutan Laut, Sungai, Danau	1.54024

Sumber: Data Diolah 2016

Sektor angkutan jalan raya memiliki output terbesar dikarenakan pesatnya perkembangan Bangkalan terhadap pembangunan yang bersifat fisik serta perdagangan besar dan eceran yang menempati urutan kontributor output ketiga dan kedua. Sejak beroperasinya Jembatan Suramadu, angkutan jalan raya mulai menggantikan armada kapal laut karena dinilai lebih efektif dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk biaya sarana transportasi ataupun distribusi. Selain itu dari sektor tanaman pangan bisa digambarkan bahwa keadaan di Kabupaten Bangkalan yang terletak di wilayah Kecamatan Tragah, Socah, Blega dan beberapa kawasan kecamatan berbasis pedesaan lainnya, sebagian besar penduduknya masih bergantung pada hasil bumi berupa hasil tani tanaman pangan,

padi, jagung dan singkong sebagai komoditas utama (BPS Bangkalan, 2015)

2. Analisis Pegganda Pendapatan

Pegganda pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan rumah tangga yang tercipta akibat adanya tambahan satu rupiah permintaan akhir di suatu sektor. Jika terjadi perubahan permintaan akhir maka terjadi juga perubahan output yang diproduksi oleh sektor-sektor produksi. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa 5 (lima) sektor yang memiliki nilai pegganda output terbesar adalah sektor 8 : Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3.87325; sektor 13 : Logam dasar, besi, dan baja sebesar 2.90683; sektor 12 : Semen dan Barang Galian Bukan Logam sebesar 2.53684; sektor 11 : Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet sebesar 2.41079 dan sektor 15 : Listrik sebesar 2.27674.



Tabel 7. 5 (Lima) Sektor Tertinggi Nilai Pengganda Pendapatan Tahun 2013

No	Sektor	Nilai Pengganda Pendapatan
1	Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau	3.87325
2	Logam dasar, besi, dan baja	2.90683
3	Semen dan Barang Galian Bukan Logam	2.53684
4	Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	2.41079
5	Listrik	2.27674

Sumber: Data Diolah 2016

Sebagai contoh industri andalan di Kabupaten Bangkalan yang terdapat didalam sektor industri makanan, minuman, dan tembakau adalah industri tembakaunya. Pulau Madura yang juga merupakan penghasil produksi tembakau terbesar di Indonesia, sebagian kecil pabrik pengolahan tembakau berada di Kabupaten Bangkalan. Begitu juga dengan industri industri lainnya yang memegang penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut, menurut Oktaviani (2012), bahwa pengembangan sektor yang berbasis pertanian (dalam hal ini sektor industri makanan, minuman, dan tembakau) akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang akan berimbas pada meningkatnya akumulasi pendapatan di sektor tersebut, terutama pada basis industri makanan, minuman, dan tembakau padat karya.

Dampak Investasi

Besarnya dampak pengembangan wilayah Kabupaten Bangkalan terhadap peningkatan PDRB yang ditunjukkan oleh total persentase mengalami peningkatan sebanyak 45,86% dengan total output sebesar 15,61 trilyun rupiah. Dengan adanya pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan, menyebabkan terjadinya kenaikan output perekonomian dalam jumlah yang cukup besar. Seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis dampak investasi di Kabupaten Bangkalan tahun 2013

	Total Kenaikan (Dalam Trilyun Rupiah)	Persentase (%)
Pengganda Output	15,61	0,4586
Pengganda Pendapatan	4,09	0,4470

Sumber: Data Diolah 2016

Kenaikan output yang tinggi akan terjadi pada sektor-sektor yang mendapatkan alokasi dana serta sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pengembangan. Semakin besar investasi yang dilakukan maka semakin besar pula kenaikan output yang akan terjadi.

Dampak pendapatan yang terjadi karena investasi yang ditanamkan di bangkalan berdasarkan pada tabel 8. secara total keseluruhan sektor, sebesar 4,09 trilyun rupiah dengan persentase 44,7 %. Pengembangan wilayah ekonomi di Kabupaten Bangkalan juga memberikan dampak yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Terjadinya kenaikan output akan diikuti dengan kenaikan pendapatan bagi tenaga kerja yang terlibat didalam kegiatan ekonomi sektoralnya Kenaikan pendapatan yang tinggi akan terjadi pada sektor-sektor yang mendapatkan alokas dana serta sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pengembangan. Selain itu, semakin besar investasi yang dilakukan maka semakin besar pula kenaikan pendapatan yang akan terjadi

Strategi dan Implikasi Kebijakan

1. Pemilihan Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan tabel 9, maka prioritas utama dalam pemilihan kebijakan pengembangan wilayah adalah dengan mendasarkan pada kenaikan pendapatan. hal ini menjadi penting dikarenakan memang Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur dilihat dari pendapatan perkapita masyarakatnya, Namun dalam hal ini pembangunan yang akan dilakukan adalah pembangunan secara sektoral berdasarkan nilai kenaikan pendapatan yang didapatkan melalui analisis dampak investasi.

Tabel 9 Prioritas Kebijakan

Prioritas Kebijakan	Bobot
Kenaikan Pendapatan	3.8288
Kenaikan Produksi	2.0294
Sektor Kunci	1.1963

Sumber: Data Diolah 2016

Aduigna (2014) dan Fafurida (2014) berpendapat sama dengan Nurhadi (2011) bahwa industri merupakan *leading sektor* melalui pendekatan pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Bangkalan memang diharapkan menjadi daerah perluasan industri di Kawasan Gerbangkertosusilo karena berbatasan langsung dengan pelabuhan - pelabuhan peti kemas untuk kebutuhan industri di Surabaya dan Gresik. Kebijakan kenaikan pendapatan berdasarkan pada nilai pengganda pendapatan menyebutkan bahwa sektor - sektor industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian bukan logam; sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet; dan sektor listrik menjadi prioritas pembangunan wilayah dinilai oleh responden mampu menjadi solusi dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

2. Implikasi Kebijakan

Secara detail apabila kita melihat dari hasil penghitungan yang telah dilakukan dimulai dari analisis keterkaitan, analisis pengganda, hingga analisis dampak investasi ketidakkonsistenan hasil, antara hasil analisis keterkaitan dan analisis pengganda output dengan analisis dampak investasi. Jumlah investasi yang masuk terbesar di Kabupaten Bangkalan adalah pada sektor *real estate*, sedangkan berdasarkan hasil analisis keterkaitan sektor, analisis pengganda, dan analisis sektor kunci yang telah dilakukan, sektor angkutan jalan raya; industri makanan, minuman, dan tembakau; dan sektor tanaman bahan makanan, memiliki dampak ekonomi tertinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa kecenderungan investasi yang tidak berorientasi sektor yang paling berpotensi pada peningkatan ekonomi daerah. Diperlukan reorientasi kebijakan ke arah kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor - sektor yang lebih potensial.

Berdasarkan hasil analisis AHP yang telah dilakukan analisis pengganda strategi yang menjadi prioritas adalah strategi berdasarkan angka pengganda sektor, yaitu strategi pengembangan industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian bukan logam; sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet; dan sektor listrik. Jika, berdasarkan pada sektor yang akan dikembangkan, strategi ini sesuai dengan RTRW Kabupaten bangkalan tahun 2009-2029. Selain itu juga Kabupaten bangkalan merupakan kabupaten yang tergabung ke dalam kawasan ekonomi terintegrasi Gerbangkertosusila. Segala bentuk pengembangan ekonomi sektoral yang berkaitan dengan pengembangan industri harus berkoordinasi dengan BPWS. Kawasan ekonomi terintegrasi di Kabupaten Bangkalan yaitu Kawasan *East Java Integrated Industrial Zone* (EJIIZ) yang merupakan suatu konsep untuk mengharmonisasikan seluruh potensi

ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan atas hasil analisa maka dapat diketahui bahwa secara simultan pada 10 kecamatan direncanakan lahan peruntukan industri dengan kawasan utamanya pada wilayah Kecamatan Tragah dengan luas sebesar 600 Ha. Lahan yang direncanakan untuk dikembangkan untuk menjadi bagian dari wilayah EJIIZ melingkupi 10 kecamatan yaitu: Kecamatan Kamal, Kecamatan

Burneh, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tragah, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Arosbaya. Berikut adalah usulan program dan kegiatan bagi Kabupaten Bangkalan berkenaan dengan strategi pengembangan dengan prioritas industri yang memiliki pengganda pendapatan tertinggi:

Tabel 10 Rekomendasi Program Dan Kkegiatan Kabupaten Bangkalan

No	Strategi	Program	Kegiatan
1	Pengembangan industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian bukan logam; sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet; dan sektor listrik	Pengembangan Zona Industri Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) Kabupaten Bangkalan, dengan BPWS 2. Dokumen perencanaan deliniasi zona Industri 3. Dokumen perencanaan kawasan klaster industri tiap di sektor pengembangan industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian bukan logam; sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet; dan sektor listrik 4. pembebasan lahan kawasan untuk kawasan industri 5. Penyelesaian dokumen daya dukung investasi 6. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) Kabupaten Bangkalan, BPWS dan investor 7. pembangunan Infrastruktur pendukung seperti perizinan perkantoran, listrik, dan air bersih

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sektor yang termasuk didalam sektor kunci berdasarkan Indeks keterkaitan ke belakang dan ke depan terbesar adalah sektor tanaman bahan makanan;

sektor bangunan; sektor angkutan jalan raya; sektor angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan; sektor lembaga keuangan tanpa bank serta sektor jasa perusahaan.

2. Sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah sektor angkutan jalan raya, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor tanaman bahan makanan. Sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah sektor

- industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian
3. Peningkatan output akibat dampak output dari investasi adalah sebesar 45,86 % dengan total output sebesar 15,61 trilyun rupiah. Peningkatan output juga mengiringi peningkatan PDRB sebesar 55,64% Dampak kenaikan pendapatan investasi di bangkalan secara total, sebesar 4,094 trilyun rupiah dengan persentase 44,7%.
 4. Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten bangkalan urutan prioritasnya adalah berdasarkan pengganda pendapatan, sektor industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor logam dasar, besi, dan baja; sektor semen dan barang galian bukan logam; sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet; dan sektor listrik.

Saran

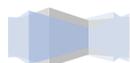
1. Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan ekonomi sektoralnya perlu dilakukan reorientasi. Reorientasi yang dimaksud adalah pengembangan ekonomi yang didasarkan pada sektor – sektor ekonomi yang potensial meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk penelitian lebih lanjut agar kajiannya lebih mendalam dapat ditambahkan alat analisis lain berupa, deliniasi zona industri, penghitungan aglomerasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia untuk industri

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H.R. 2005. Pengembangan Wilayah. Graha Ilmu, Edisi Pertama, Yogyakarta
- Annaf, Julissar. 2011. *Tinjauan Analitis Terhadap Model Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN
- Adugna, Teshome. 2104. Impacts of Manufacturing Sektor on Economic Growth in Ethiopia: A Kaldorian Approach. *Journal of Business Economics and Management Sciences* Vol. 1(1), pp.1-8, December 2014
- Badan Pusat Statistik 2014, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2013*. Jawa Timur.
- Badan Penmbangunan Wilayah Suramadu, 2015. *Rencana Strategi Pembangunan 2015 - 2019*. Surabaya: BPWS
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Dalam ekonomi Umum*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: 1996. Erlangga
- Hasni, 2006. *Analisis Peningkatan Investasi Pemerintah di Sektor Konstruksi terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis InputOutput Sisi Permintaan*. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Karyadinata, 2011. *Analisa Dampak Pengembangan Wilayah Suramadu Terhadap Perekonomian Madura*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia
- Mardiyantoni, T dan Ciptomulyono, U. 2012. *Penerapan Analisis Input Output dan ANP dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Sub Sektor Industri di Jawa Timur*. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, (Sept, 2012) ISSN: 2301-9271
- Marimin. 2005. *Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi Manajerial*. Bogor : IPB Press.



- McCann, Philip. 2001. *Urban and Regional Economics*. New York: Oxford University Press
- Miller, Ronald E. 1998 "Regional and Interregional Input-Output Analysis." In *Methods of Interregional and Regional Analysis*. Aldershot, England: Ashgate, 1998, pp. 41-124
- Nurhadi. 2011. Strategi Perencanaan Pembangunan Regional dalam Kajian Variasi Keruangan. Artikel Ilmiah.
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/STRATEGI%20PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20REGIONAL.pdf>. diakses 29 Desember 2017
- Pradithasari, H. 2013. *Analisis Dampak Rencana Investasi Jembatan Selat Sunda Terhadap Pulau Sumatra dan Pulau Jawa*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N2
- Rustiadi, Ernani *et al.* 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sim, B. *et al.* 2007. *Developing an Interregional Input-Output Table for Cross-Border Economies: An Application to Lao People's Democratic Republic and Thailand*. ADB Economics and Research Department (ERD Occasional Statistical Paper Series)
- Simehate, S. 2009. *Analisis Intensitas Perdagangan Intradaerah dan Antardaerah Berdasarkan Data IRIO 2000 dan 2005*. Skripsi pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia



STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PERTANIAN LAHAN KERING DI JAWA BARAT

Poverty Alleviation Strategies in Dryland Agriculture in West Java

Yusman Syaukat¹, A Faroby Falatehan¹, Nizar Nasrullah², Arini Hardjanto¹

¹Staf Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB.

Email: ysyaukat@gmail.com, affalatehan@gmail.com,

²Staf Pengajar Departemen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian.

IPB. Email: nizarnasrullah@yahoo.com

ABSTRACT

Majority of the community in Sukabumi and Tasikmalaya Districts are still below the poverty line. The approach used to analyze poverty levels is an expenditure approach which is then compared to the poverty limit of the BKKBN and BPS. Communities in Sukabumi and Tasikmalaya District are classified to the first prosperous family (KS1) based on the classification of the BKKBN. Whereas compared to BPS poverty level, Communities in Sukabumi District are classified as poor that is 15.79 percent and 19.23 percent for Tasikmalaya District. The second objective of this study was to implement a cropping strategy that farmers should do to increase farmers' income so that they are not below the poverty line. The recommended cropping pattern is by planting horticultural crops such as spinach, caisin, watermelon and melon in the third growing season.

Keywords: poverty, dry land, farming, food

ABSTRAK

Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya yang menjadi daerah penelitian ini masih terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran yang kemudian dibandingkan dengan batas kemiskinan dari BKKBN dan BPS. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya berada pada golongan keluarga sejahtera I berdasarkan penggolongan dari BKKBN. Sedangkan bila dibandingkan berdasarkan tingkat kemiskinan BPS, masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tergolong miskin sebanyak 15.79 persen dan pada Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 19.23 persen. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah strategi pola tanam yang sebaiknya dilakukan petani untuk meningkatkan pendapatan petani agar tidak berada dibawah garis kemiskinan. Pola tanam yang disarankan yaitu menanam tanaman hortikultura seperti kangkung darat, caisin/sawi, semangka dan melon pada musim tanam ketiga.

Kata kunci: kemiskinan, lahan kering, usahatani, pangan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena yang umum ditemui di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dari proses pembangunan ekonomi karena menggambarkan tercapainya unsur pemerataan (*equity*) yang merupakan indikator dari kemakmuran. Sebagian besar masyarakat miskin di

Indonesia tinggal di wilayah pedesaan karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja terdidik dan mencari pekerjaan di perkotaan. Berdasarkan data BPS (2016), lebih dari separuh rumah tangga miskin memperoleh penghasilann utamanya dari sektor pertanian, sementara sebagian besar lainnya bekerja pada sektor industri dan lainnya.



Pertanian lahan kering didefinisikan sebagai pertanian pada lahan yang tidak memiliki fasilitas pengairan (FAO, 2012). Usaha pertanian yang umum diusahakan pada lahan kering adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Karena tidak memiliki fasilitas pengairan, sumber air bagi pertanian di lahan kering adalah air hujan. Sementara, untuk daerah-daerah dengan jumlah lahan kering yang tinggi di Indonesia (Jawa Timur, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT), curah hujan yang terjadi tidaklah tinggi. Hal ini membuat pengusahaan pertanian pada lahan kering seringkali tidak diminati oleh petani dan hanya sebagian kecil saja yang mengusahakannya secara komersial. Sebagian besar petani masih bertani di lahan kering sebatas untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahtangganya saja sehingga seringkali tidak ada keseragaman pola tanam pada pertanian di lahan kering. Padahal, lahan kering sangat berpotensi menghasilkan berbagai variasi produk pangan, yakni padi gogo, jagung, kedelai, shorgum, dan ubi-ubian (Abdurachman *et al*, 2008).

Data BPS menyatakan bahwa Propinsi Jawa Barat juga menempati posisi ketiga untuk jumlah penduduk miskin setelah Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada bulan September 2014, sebanyak 15% dari penduduk miskin di Indonesia tinggal di propinsi Jawa Barat. Sebagian besar dari penduduk miskin ini berada di wilayah Kabupaten Bogor, Garut dan Cirebon. Namun jika dibagi menurut wilayah, daerah bagian selatan memiliki lebih dari setengah jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Tidak hanya kemiskinan, besarnya kontribusi Jawa Barat pada sektor pertanian juga tidak menjamin kebutuhan pangan daerah-daerah di Jawa Barat dapat dipenuhi secara mandiri. Dari 28 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, masih ada beberapa wilayah yang berstatus rawan pangan karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga harus membeli dari daerah

lainnya (Priyambodo, 2015). Hal tersebut mengindikasikan masih perlunya upaya peningkatan produksi pertanian di wilayah Jawa Barat.

Potensi pengembangan sektor pertanian di wilayah Jawa Barat relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain karena lokasinya yang strategis dan iklimnya yang cukup baik. Sebagai daerah yang berpotensi besar dalam pengembangan produksi pertaniannya, nyatanya selama ini masih banyak lahan yang belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dari karakteristik wilayah, terdapat perbedaan kondisi antara Jawa Barat bagian utara dan selatan. Berbeda dengan kondisi tanah bagian utara yang dikenal subur, kondisi tanah di Jawa Barat bagian selatan didominasi oleh lahan kering. Lahan kering di wilayah bagian selatan merupakan yang terbesar diantara dua wilayah lainnya yang ada di Jawa Barat yaitu bagian utara dan tengah. Luas lahan kering di wilayah selatan mencapai 55.98 persen dari total lahan kering yang ada di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi adalah daerah yang memiliki luas lahan kering terbesar di wilayah selatan yaitu sebesar 232.023 ha, disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya (Rachmat, 2013). Luasnya lahan kering yang dimiliki oleh wilayah Jawa Barat Selatan tidak didukung oleh sistem pengairan yang baik. Hal ini disebabkan besar lahan pertanian di wilayah selatan berada diatas aliran sungai sehingga saluran irigasi sulit untuk dibuat. Sehingga, ketersediaan air pada kawasan ini sangat bergantung pada curah hujan.

Lahan kering memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya. Namun, selama ini pemanfaatan lahan kering dalam usahatani komersil masih belum dilakukan secara maksimal sehingga masih banyak lahan kering yang menganggur. Secara umum, belum ada komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan dari zona agrosistem yang sangat bergantung pada curah hujan ini. Secara demografis,

sebagian besar petani yang berada pada zona agrosistem ini memiliki lahan yang sempit, bermodal kecil, serta masih menganut sistem pertanian subsisten (Setiawan, 2008).

Lahan kering yang ditanami tanaman padi di Kabupaten Sukabumi sebagian besar berupa sawah tadah hujan, dengan pola tanam padi 1-2 kali dalam satu tahun. Tanaman lain yang ditanam selain padi berupa tanaman palawija seperti kacang kedelai, cabai, ubi, dan jagung. Produktivitas padi pada MT 1 sebesar 7, ton/Ha, produktivitas yang tinggi ini dikarenakan padi ditanam pada saat musim penghujan sehingga cukup air. Di Kabupaten Tasikmalaya, lahan kering yang ditanami tanaman padi sebagian besar berupa ladang dan sawah tadah hujan, dengan pola tanam padi 1-2 kali dalam satu tahun. Produktivitas padi pada MT 1 hanya sebesar 3, ton/Ha, nilai produktivitas yang rendah terjadi karena pada musim tanam tersebut petani mengalami gagal panen, meskipun belum diketahui penyebab gagal panen tersebut (Falatehan et al 2017).

Berdasarkan permasalahan, dapat diformulasikan tujuan umum dari penelitian ini yaitu ingin mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya dan merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis tingkat kemiskinan petani lahan kering di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya pada saat ini; (2) merumuskan strategi pola tanam dan produksi yang optimal di lahan kering Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya upaya memenuhi kebutuhan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi survei berada di dua lokasi dengan luas lahan kering tertinggi di

wilayah Jawa Barat Selatan, yaitu di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan pendampingan teknis budidaya dan pemasaran terkait kajian dilaksanakan di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan cara survei, *in depth interview*, pengisian kuesioner, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat, institusi nasional dan internasional, serta berbagai sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan, strategi pola tanam dan produksi yang optimal di lahan kering Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya. Pengambilan sampel digunakan juga untuk menentukan lokasi pendampingan implementasi alternatif kegiatan optimasi produksi pangan di lahan kering Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Metode Analisis

1) Analisis Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan petani lahan kering di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya dianalisis melalui pendekatan pengeluaran yang kemudian kategorikan ke dalam kriteria dan garis kemiskinan. Terdapat beberapa acuan garis kemiskinan. Di Indonesia, garis



kemiskinan didekati dari data BPS. Tingkat kemiskinan petani lahan kering dianalisis dengan membandingkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan lahan kering dengan garis kemiskinan menurut Provinsi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

2) Analisis Data Agroklimat

Analisis data agroklimat digunakan untuk memilih pola tanam yang menghasilkan tingkat produksi optimum. Teori pemilihan komoditas yang dapat menghasilkan tingkat produksi optimum dianalisis dengan memperhatikan kesesuaian iklim, curah hujan, kondisi tanah, kondisi air, serta hama dan penyakit yang biasa terdapat pada usahatani di lahan kering Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data agroklimat yang terdapat di wilayah usahatani lahan kering Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat tanaman yang sesuai untuk ditanam di lahan kering tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tingkat kemiskinan di Sukabumi dan Tasikmalaya berdasarkan BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga yang membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor - faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di

lingkungannya. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Penelitian ini bermaksud melihat apakah petani di daerah penelitian tergolong dalam kelompok keluarga miskin (pra-sejahtera) atau tidak. Oleh karena itu, paling tidak responden harus memenuhi salah satu dari indikator Keluarga Sejahtera I. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau

indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sugu bagi mereka yang biasa makan sugu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah

mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

Penelitian ini membahas lima buah indikator Keluarga Sejahtera I yaitu indikator nomor 1,2,3,4, dan 6. Pada penelitian ini ada satu indikator Keluarga Sejahtera I yang tidak dibahas yaitu indikator kelima (Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi).

Dari lima indikator yang dibahas, terdapat tiga indikator dimana seluruh responden baik responden di Kabupaten Sukabumi maupun responden di Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi ketiga indikator tersebut. Indikator tersebut adalah indikator 2,4 dan 6 yaitu anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan dan semua



anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Sementara itu untuk dua indikator lainnya, tidak semua responden dapat memenuhi indikator tersebut.

Pada indikator 1 yaitu “pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih”, terdapat beberapa responden yang tidak dapat memenuhinya. Pada Kabupaten Tasikmalaya terdapat empat orang dan pada Kabupaten Sukabumi terdapat tiga orang petani responden yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya lebih dari satu kali per hari. Hal ini direfleksikan kepada rendahnya besaran pengeluaran untuk makanan dari ketujuh petani responden tersebut.

Pada indikator “rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik” terdapat beberapa responden yang belum bisa memenuhi kebutuhan rumahnya dengan baik. Keadaan rumah tinggal keluarga seharusnya mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan. Pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi, terdapat masing-masing dua orang petani responden yang tidak memiliki rumah tinggal yang layak. Rumah dari keempat responden tersebut masih berupa rumah dengan dinding bambu dan lantai kayu. Sehingga dari segi perlindungan dan kesehatan masih kurang layak untuk ditempati.

Dari standar yang ditetapkan BKKBN, maka jika ada salah satu dari indikator keluarga sejahtera I yang tidak dipenuhi, maka keluarga/rumah tangga tersebut tergolong ke dalam kelompok keluarga pra-sejahtera. Dari 26 responden di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat enam orang petani responden yang dapat dinyatakan sebagai keluarga pra sejahtera. Diantara enam orang ini, empat orang responden belum dapat memenuhi kebutuhan pangan hariannya dan dua orang responden belum dapat memenuhi kondisi rumah tempat tinggal yang layak.

Sementara itu dari 19 orang responden di Kabupaten Sukabumi, empat orang responden dapat digolongkan ke dalam keluarga pra sejahtera. Dari keempat orang ini, sebanyak dua orang responden belum mampu memenuhi kebutuhan pangan hariannya, satu orang belum mampu memenuhi kondisi rumah tempat tinggal yang layak dan satu orang lagi belum mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

b. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya berdasarkan Garis Kemiskinan BPS

Garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Garis kemiskinan nasional berdasarkan data BPS (2017) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 366.203 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp. 344.472 per kapita per bulan. Besaran nilai garis kemiskinan ini telah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

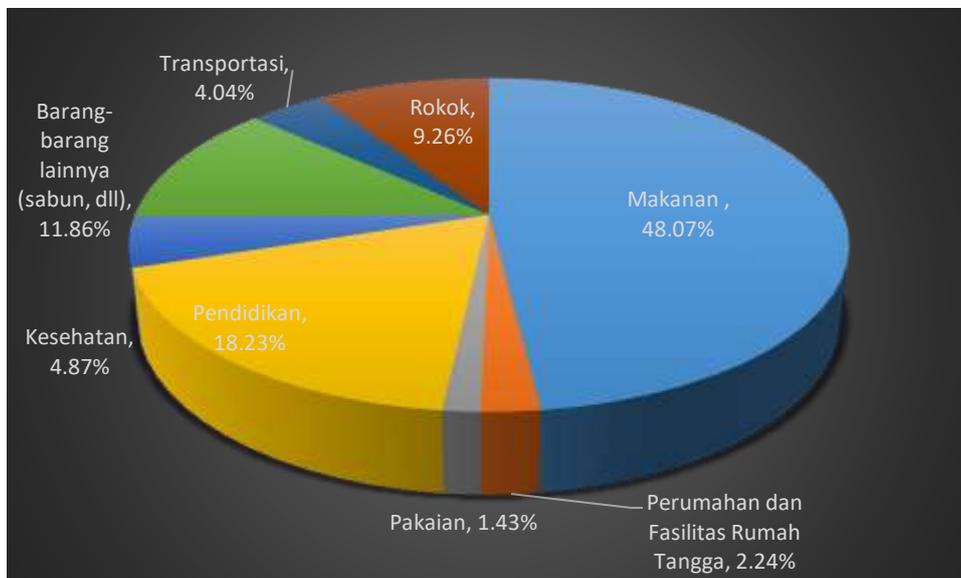
Tingkat garis kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi berturut-turut adalah sebesar Rp. 284.462 dan Rp. 284.603 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya ini merupakan garis kemiskinan terendah kedua dan ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Garut. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya rata-rata konsumsi penduduk di daerah tersebut.

Berdasarkan data BPS (2017), Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat berada pada kawasan pedesaan (61,2%) dibandingkan kawasan perkotaan (38,8%). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan ke-7 dan ke-10, dimana urutan

pertama adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk miskin mencapai 487,28 ribu orang selama tahun 2017. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing menyumbang 4,7 persen dan 4,5 persen dari total penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.

Penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil survei penelitian hanya sebesar 15.79 persen. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sukabumi tergolong penduduk tidak miskin berdasarkan hasil survei lapangan yaitu sebanyak 16 orang (84.21 persen). Penggolongan penduduk miskin

ini didekati dari pengeluaran responden baik makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi berdasarkan BPS sebesar Rp 284,063 per kapita per bulan. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 455,154. Pengeluaran terbesar per kapita per bulan dari jumlah responden yang diwawancara sebesar Rp 2,220,000 dan pengeluaran terkecil sebesar Rp 168,333. Sumber pengeluaran terbesar berasal dari makanan, pendidikan, dan kebutuhan barang rumahtangga lainnya seperti sabun dan lain-lain. Persentase pengeluaran dari komponen makanan sebesar 48.07 persen, pendidikan sebesar 18.23 persen dan kebutuhan barang lainnya sebesar 11.86 persen.



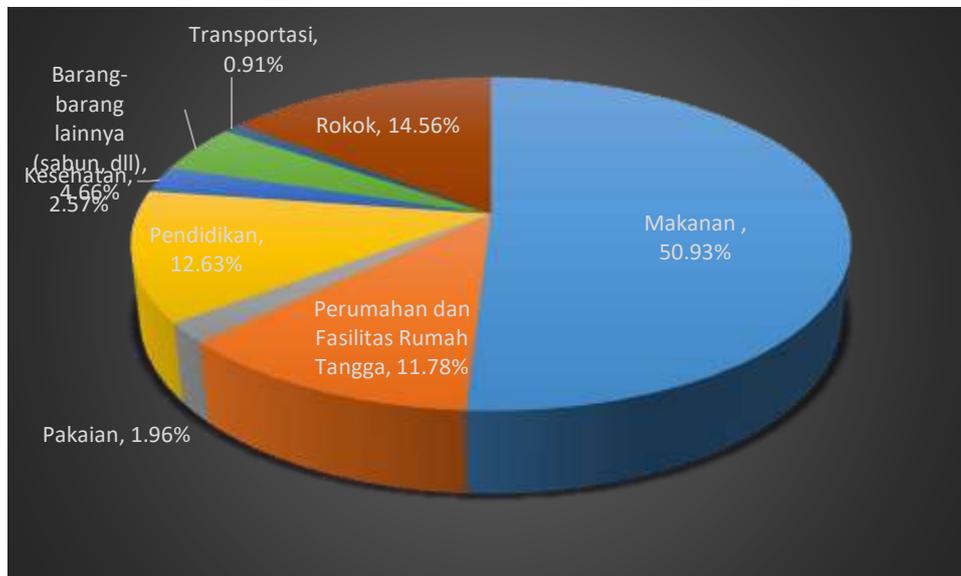
Gambar 1 Pengeluaran Rumah Tangga Petani di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi

Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dapat dikurangi melalui sektor pertanian. Cara yang dapat ditempuh dengan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi modern sehingga rumahtangga miskin dapat keluar dari kemiskinan. Cara kedua yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemiskinan dengan revitalisasi pertanian dengan pengelolaan irigasi yang baik. Selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dengan diversifikasi jenis tanaman yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang biasa ditanam seperti tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya, petani harus dapat didampingi oleh penyuluh atau tenaga ahli, sehingga diversifikasi tanaman dapat berjalan dengan maksimal.

Seperti halnya Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 19.23 persen. Garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan BPS



sebesar Rp 284,462 per kapita per bulan. Pengeluaran terbesar berasal dari makanan yaitu 50,93 persen, pengeluaran kedua terbesar yaitu rokok (14,56 persen), pengeluaran ketiga terbesar adalah pendidikan yaitu 12,63 persen. Rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah makanan, hasil ini sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 yang menjadikan rokok sebagai pengeluaran terbesar mengalahkan beras. Konsumsi rokok di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya karena pemerintah Indonesia belum optimal dalam mengendalikan rokok (Lembaga Demografi UI, 2012) dan harga rokok di Indonesia relatif murah dibandingkan negara-negara maju lainnya.



Gambar 2 Pengeluaran Rumah Tangga Petani di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya

Pendidikan telah menjadi salah satu pengeluaran terbesar baik di Kabupaten Sukabumi maupun Tasikmalaya, namun bidang kesehatan belum menjadi pengeluaran terbesar, sehingga perlu ditingkatkan pentingnya peran kesehatan bagi masyarakat. Salah satu cara untuk menaggulangi kemiskinan adalah dengan memperhatikan sektor kesehatan melalui investasi kesehatan. Bentuk investasi kesehatan seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan akses pemeliharaan kesehatan. Kebijakan lain yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan berupa proyek pembangunan nasional yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Proyek yang melibatkan masyarakat telah terbukti efektif dapat berjalan dengan baik dan pengembalian investasi relatif tinggi. Keuntungan dari proyek berbasis masyarakat adalah dapat memberdayakan

masyarakat miskin dan memiliki dampak yang baik bagi pembangunan wilayahnya.

Alternatif Strategi Pengentasan Kemiskinan

Alternatif tanaman yang dapat ditanam, selain itu petani diberikan informasi cara menanam tanaman yang baik melalui pembuatan demplot. Beberapa komoditas yang dipilih, yaitu semangka, melon, sawi dan kangkung. Keempat komoditas ini disarankan kepada para petani karena sebagian besar petani di kedua kecamatan belum pernah menanam komoditas-komoditas ini. Padahal jika dilihat dari kesesuaian tanaman-tanaman tersebut jika di tanam di lahan kering sangat sesuai.

Sementara itu jika dilihat secara finansial, tanaman-tanaman ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti untuk sayuran yang dapat dipanen setiap dua minggu.

Tabel 1. Alternatif Pola Tanam untuk Kecamatan Sukabumi dan Tasikmalaya

Musim Tanam I	Musim Tanam II	Musim Tanam III
Padi	Padi	Melon, Semangka, Sawi Atau Kangkung

SIMPULAN

Kemiskinan yang berada Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya didekati dengan pendekatan BKKBN dan BPS. Hasil yang diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat di dua Kabupaten merupakan golongan keluarga sejahtera I. Apabila dilihat dari pendekatan pengeluaran, maka hanya 15 persen di Kabupaten Sukabumi dan 11.56 persen di Kabupaten Tasikmalaya yang tergolong kedalam penduduk miskin yang dibandingkan dengan garis kemiskinan menurut BPS.

Strategi pengentasan kemiskinan di kawasan ini adalah melalui peningkatan penanaman, terutama pada musim tanam III. Biasanya pada musim ketiga petani tidak menanam tanaman apapun atau dalam lahan dalam kondisi bera, akan tetapi untuk meningkatkan pendapatan petani maka pada musim ketiga petani disarankan untuk menanam tanaman hortikultura, seperti kangkung darat, caisin, semangka, dan melon.

DAFTAR PUSTAKA

- Falatehan AF, Syaukat Y, Reswatie FD, Sari DAP. Planting and Consumption Patterns of Upland Rice Farmer in Indonesia. ADRI International Journal of Agriculture Volume 1 No 1 2017
- Isdijoso W, Suryahadi A, Akhmadi. 2016. Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. The SMERU Research Institute.
- Kementrian Ristek. 2000. Budidaya Semangka. Jakarta
- Priyambodo RH. (2015). Deddy Mizwar: Empat daerah di Jabar rawan pangan. <http://www.antaraneews.com> [diakses 3 mei 2016]
- Nurwati, N. 2008. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjajaran 10 (1): 1-11.
- Supriatna. 1997. *Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan*, impac Edisi
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
- Soekartawi. 1995. AnalisisUsahatani. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Suwarno, B. Kustianto, WS Arjasa and GN Atlin. 2002. Participatory selection on upland rice in Sumatra. Breeding rainfed for drought-rpone environment: integrating conventional and participatory plant breeding in South and Southeast Asia. Proceeding of DFID Plant Sciences Research Programme/IRRI Conference. 12-15 March 2002. Los Banos



ANALISIS DAMPAK EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN *INPUT OUTPUT ANALYSIS*

Economic Impact Analysis of cadger Traders in Bogor City Using an Output Analysis Approach

Syarief Gerald Prasetya¹, Yustiana Wardhani²

¹Staf Pengajar Program Studi Akuntansi. STIE Binaniaga. Email: er7et70@gmail.com

²Staf Pengajar Program Studi Manajemen. STIE Binaniaga. Email: yustiana.wardhani@yahoo.com

ABSTRACT

A very high jobless people in the city has created an informal sector. This informal sector has become an alternative way for them to find a job. It has happened since it is very relatively easy joining or leaving this informal sector as there is not any particular regulation required. This research aims to study the contribution of street stalls upon the multiplier output, revenue, employment and forward-backward linkage over the economy. Method of analysis has been using input-output analysis and the research location has taken place in Bogor. The result of the research has indicated that the availability of the street stalls in the city cannot be considered as a marginal sector as they have been contributing positively the city economy either in the multiplier analysis or forward-backward linkage. Organizing and registering the street stalls in Bogor should have to be executed properly and periodically in order to find out their economical potential, making sure that they will not jeopardize the landscape of public facility. However, a particular association should have to be established in order to ease the supervision of the street stalls and to improve their quality accordingly.

Keyword : Street stalls, informal sector, output, revenue, manpower

ABSTRAK

Tingginya tingkat pengangguran perkotaan menumbuhkan sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan disebabkan mudahnya untuk masuk dan keluar di sektor informal relatif mudah karena tidak ada aturan secara khusus yang mensyaratkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pedagang kaki lima terhadap *multiplier* output, pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan *forward-backward linkage* terhadap perekonomian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *input-output* dan lokasi penelitian di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan pedagang kaki lima perkotaan tidak dapat dipandang sebagai sektor yang marginal, pedagang kaki lima memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian perkotaan baik dalam analisis *multiplier* dan analisis *forward-backward linkage*. Penataan dan pendataan pedagang kaki lima di Kota Bogor perlu dilakukan secara periodik agar dapat diketahui potensi ekonomi, tidak mengganggu *landscap* dan peruntukan fasilitas umum kota. Perlunya pembentukan assosiasi agar dapat lebih mudah dalam pengawasan dan upaya peningkatan kualitas pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Sektor Informal, Output, Pendapatan, Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Problematika perkotaan saat ini semakin tumbuh dan berkembang menyebabkan semakin sulitnya pemerintah, khususnya pemerintah daerah mencari solusi mengatasi masalah tersebut. Di satu sisi permasalahan yang

timbul di daerah perkotaan semakin kompleks dan rumit, namun di sisi lain kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintahan Kota Bogor yang kepadatan penduduknya cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Kurangnya

kemampuan wilayah perkotaan dalam menampung penduduk tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti tingkat pengangguran kota yang semakin tinggi, tingkat kriminalitas yang semakin berkembang dan diperparah lagi dengan kurang memadainya sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi. Kondisi seperti ini dirasakan oleh seluruh wilayah perkotaan yang ada di Indonesia, sehingga permasalahan perkotaan menjadi prioritas penting dalam upaya membangun kehidupan bangsa.

Kota menjadi magnet penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun di perkotaan peluang usaha tersedia lebih besar, namun karena bekal keahlian dan keterampilan yang terbatas, maka tidak mudah bagi pencari kerja untuk memasuki sektor formal yang hampir selalu diperlukan syarat formal seperti ijazah suatu pendidikan tertentu. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengangguran wilayah perkotaan semakin tinggi. Tingginya tingkat pengangguran ini menumbuhkan sektor informal di wilayah perkotaan. Sektor informal menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan disebabkan untuk masuk dan keluar di sektor relatif mudah karena tidak ada aturan secara khusus yang mensyaratkan. Kemudian untuk kepemilikan dan pengelolaan umumnya bersifat kekeluargaan sehingga dapat memanfaatkan keluarga sendiri atau teman-teman yang ada. Selain itu usaha yang dijalankan relatif berskala kecil sehingga lebih pada karya dengan teknologi yang masih tradisional dan begitu membutuhkan modal besar serta sektor ini tidak membutuhkan keahlian khusus, dan pasar bersifat kompetitif tetapi tidak disertai regulasi yang jelas.

Semakin beragamnya sektor informal menyebabkan sulit membedakan dengan sektor formal. Hal ini dikarenakan dalam sektor informal terdapat kesatuan rangkaian antara usaha

berskala kecil dengan yang berskala besar, illegal dan legal serta yang produktif dengan yang kurang produktif. Aktivitas yang mereka jalankan sangat beragam, mulai dari penjaja makanan, jasa ojek, sampai pada para penjual barang-barang elektronik bajakan dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk meningkatkan skala usahanya sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Kondisi menyebabkan orientasi sektor informal bukan pada pemupukan modal, tetapi lebih pada upaya memperoleh pendapatan *cash* yang langsung dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang paling banyak digeluti dan memiliki keragaman yang tinggi. Usaha ini memiliki kecenderungan yang semakin berkembang setiap waktunya. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh aktivitas ini sangat beragam seperti menjual makanan, pakaian, rokok dan barang-barang kebutuhan lain yang memiliki harga relatif murah. Kemunculan pedagang kaki lima berdampak semakin meningkatnya ketersediaan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan oleh seluruh golongan ekonomi karena harga produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima cukup terjangkau untuk golongan bawah sampai dengan atas.

Selain itu pedagang kaki lima merupakan salah satu solusi alternatif dalam menurunkan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan. Peran penting pedagang kaki lima di perkotaan adalah sebagai katup pengaman penyedia lapangan pekerjaan. Sebagian besar pedagang kaki lima pada mulanya melakukan kegiatan dalam skala kecil dengan modal yang terbatas, namun tidak sedikit dari mereka akhirnya berhasil sehingga berkembang hampir mendekati sektor formal. Perkembangan usaha ini selanjutnya diikuti dengan

kebutuhan tenaga kerja. Oleh karenanya tidak sedikit tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha ini.

Berdasarkan uraian tersebut pedagang kaki lima dari sisi ekonomi memiliki dampak positif yang meliputi, (1) peningkatan jumlah barang dan jasa yang menyebabkan semakin meningkatnya pendapatan daerah, (2) pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, (3) peningkatan pendapatan masyarakat dan (4) berpengaruh terhadap perkembangan industri hilir dan hulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pedagang kaki lima terhadap perekonomian Kota Bogor, yang meliputi:

1. Kontribusi pedagang kaki lima terhadap multiplier output di Kota Bogor.
2. Kontribusi pedagang kaki lima terhadap multiplier pendapatan di Kota Bogor.
3. Kontribusi pedangan kaki lima terhadap multiplier penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
4. Keterkaitan pedagang kaki lima dengan industri hilir dan hulu di Kota Bogor

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum (2015) menemukan bahwa sektor informal yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Sebagai sektor yang eksistensinya tidak terbantahkan dalam ekonomi perkotaan, sektor informal selain menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu, namun sektor informal juga menyimpan permasalahan dan potensinya sendiri. Sebagai sektor yang sangat bebas untuk dimasuki oleh setiap orang, sektor informal menjadi katup pengaman sosial dalam sebuah negara (Prasetya, 2016). Artinya, jika sektor ini dikelola dengan baik, maka berbagai persoalan sosial

khususnya di perkotaan bisa diminimalisir. Kemampuan menyerap tenaga kerja dengan proporsi yang fenomenal serta ikut menyelamatkan perekonomian negara, dalam waktu bersamaan ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang adil oleh pemerintah (Mus Mualim, Bin Raudha A H, 2009).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dengan menggunakan data Bappeda, BPS dan data Survei Ekonomi (SE), kajian ini merupakan analisis terhadap jumlah, persentase, pertumbuhan rata-rata per tahun, analisis pekerja menurut lapangan pekerjaan dan menurut jenis pekerjaan sektor informal.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Perangkat Pemerintah Kota Bogor yang terkait dengan permasalahan sektor informal seperti: Bappeda, Dinas koperasi, industri dan perdagangan, Satpol PP, Dinas Perekonomian.
2. Para pedagang kaki lima.
3. Asosiasi/paguyuban pedagang kaki lima.
4. Akademisi.
5. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi dan pemberdayaan sektor informal.
6. Masyarakat atau penerima manfaat.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, sampel diambil dengan maksud tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data yang digunakan adalah hasil Survei Ekonomi 2015 yang diterbitkan secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel Input-Output (IO). Analisis dengan tabel IO ini dapat memberikan informasi mengenai angka pengganda output (*output*

multiplier), angka pengganda pendapatan (*income multiplier*), angka pengganda kesempatan kerja (*employment multiplier*), keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkages*).

Namun pada umumnya analisis dengan tabel IO ini hanya memasukkan sektor-sektor formal saja. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menginternalisasikan kegiatan sektor informal ke dalam tabel Input-Output (disimbolkan dengan IO*) dan kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan IO dan IO* untuk melihat dampak kehadiran sektor informal

1. Pengertian Input-Output

Tabel Input-Output adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks baris dan kolom yang menggambarkan transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Besarnya ketergantungan suatu sektor tertentu terhadap sektor yang lain ditentukan oleh input yang digunakan dalam proses produksi maupun besarnya output yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Dengan demikian pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak di dukung oleh sektor lain.

2. Kegunaan Tabel Input-Output

Model IO dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang:

- a. Struktur perekonomian nasional atau regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor.
- b. Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi.

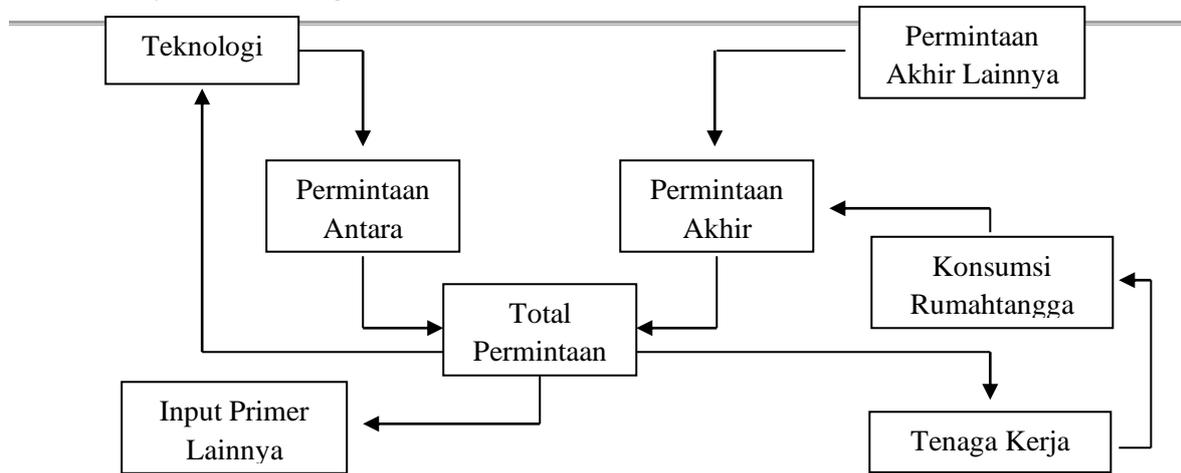
- c. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berskala impor.
- d. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Melihat gambaran di atas, hal ini berarti bahwa model IO akan memberikan beberapa keuntungan atau kegunaan, antara lain:

- a. Dapat memberikan deskripsi yang detail tentang perekonomian nasional ataupun regional dengan menguantifikasikan ketergantungan antarsektor dan asal (sumber) dari ekspor dan impor.
- b. Untuk suatu perangkat permintaan akhir dapat ditentukan besaran output dari setiap sektor dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya.
- c. Dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang disebabkan oleh sektor swasta ataupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan secara terperinci.
- d. Perubahan-perubahan teknologi dan harga relatif dapat diintegrasikan ke dalam model melalui perubahan koefisien teknik.

Melalui model IO dapat ditelusuri kemana saja output dari suatu sektor didistribusikan dan input apa saja yang digunakan oleh sektor tersebut. Dengan memodifikasi model IO kita membentuk alur distribusi dengan terbentuknya suatu model IO secara sederhana (khususnya jika dilihat dari sisi permintaan) yang digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1. Model Sederhana Input-Output

Gambar 1. di atas menjelaskan bahwa output dari sektor produksi didistribusikan kepada dua konsumen, yaitu pertama konsumen yang menggunakan output tersebut sebagai input untuk proses produksi lanjutan (konsumen ini disebut produsen) dan kedua konsumen yang menggunakan output tersebut untuk dikonsumsi langsung (konsumen akhir, yaitu rumah tangga, pemerintah, swasta dan konsumen luar negeri). Bagi konsumen pertama, output suatu sektor merupakan input antara dalam proses produksinya, sedangkan pada konsumen kedua, outputnya merupakan permintaan akhir.

Dalam kaitannya dengan input, dapat dilihat adanya perpindahan barang antarsektor. Namun demikian input yang digunakan dalam suatu proses produksi bukan hanya berupa input antara saja, tetapi ada input-input lainnya yaitu faktor produksi tenaga kerja, modal, tanah dan lain sebagainya di mana kesemuanya ini digolongkan sebagai input primer. Dalam model IO input primer ini direfleksikan melalui upah dan gaji, surplus usaha, pajak tak langsung dan subsidi. Selain input yang berasal dari dalam negeri ada juga input yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu model IO juga memasukkan komoditas impor dalam distribusi inputnya.

4. Dasar Teori Input-Output

Output yang dihasilkan oleh suatu sektor i didistribusikan ke dua pemakai, yaitu sektor produksi dan pemakai akhir. Dalam input antara dapat terjadi arus perpindahan barang antar sektor misalnya sektor i ke sektor j dan dapat pula terjadi perpindahan dalam sektor itu sendiri (perpindahan intrasektor), perpindahan terjadi dari sektor i ke sektor j jika $i = j$. Dimisalkan nilai uang arus barang dari sektor i ke sektor j dinotasikan z_{ij} , kemudian total output sektor i dinotasikan X_i , sedangkan total permintaan akhir dari sektor i dinotasikan Y_i , maka dapat dituliskan total output dari sektor i sebagai berikut :

$$X_i = z_{i1} + z_{i2} + z_{i3} + \dots + z_{in} + Y_i$$

Oleh karena dalam perekonomian terdapat n sektor produksi, maka secara keseluruhan dapat dituliskan total output semua sektor sebagai berikut :

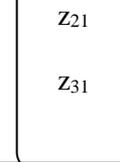
$$X_1 = z_{11} + z_{12} + z_{13} + \dots + z_{1n} + Y_1$$

$$X_2 = z_{21} + z_{22} + z_{23} + \dots + z_{2n} + Y_2$$

$$X_i = z_{i1} + z_{i2} + z_{i3} + \dots + z_{in} + Y_i$$

$$X_n = z_{n1} + z_{n2} + z_{n3} + \dots + z_{nn} + Y_n$$

Jika dinotasikan dalam bentuk tabel matriks, untuk setiap kolom dapat dituliskan suatu z_{11} dan kolom yang berisikan :



Misalkan dalam suatu perekonomian terdapat tiga sektor produksi saja,

yaitu sektor 1, 2 dan 3, berdasarkan persamaan di atas dapat dibuat sebuah kerangka dasar Tabel IO berikut:

Tabel 1. Model Input-Output Untuk Tiga Sektor

Input \ Output	Sektor Produksi			Permintaan Akhir				Total Output	
	1	2	3	C	I	G	E	X	
Sektor Produksi	1	z_{11}	z_{12}	z_{13}	C_1	I_1	G_1	E_1	X_1
	2	z_{21}	z_{22}	z_{23}	C_2	I_2	G_2	E_2	X_2
	3	z_{31}	z_{32}	z_{33}	C_3	I_3	G_3	E_3	X_3
Input Primer	V	V_1	V_2	V_3	V_C	V_I	V_G	V_E	V
Impor	M	M_1	M_2	M_3	M_C	M_I	M_G	M_E	M
Total Input	X	X_1	X_2	X_3	C	I	G	E	X

Tabel 1. di atas menunjukkan transaksi antar komponen suatu perekonomian pada satu titik waktu. Diasumsikan bahwa perekonomian terdiri dari tiga sektor produksi, yaitu sektor 1, 2 dan 3, komponen permintaan akhir terdiri dari empat, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor luar negeri (E), satu faktor produksi misalkan tenaga kerja dengan balas jasa upah (V), selain itu sektor-sektor produksi maupun pengguna akhir dapat juga membeli barang dari luar negeri dalam bentuk impor (M). Terdapat tiga matriks dasar yang dapat dilihat dalam tabel di atas, yaitu :

a. Matriks Z atau matriks transaksi input antara

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} \\ z_{21} & z_{22} & z_{23} \end{pmatrix}$$

b. Matriks Y atau matriks permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), investasi

perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor (E)

$$Y = \begin{pmatrix} C_1 & I_1 & G_1 & E_1 \\ C_2 & I_2 & G_2 & E_2 \end{pmatrix}$$

c. Matriks V atau matriks input primer yang terdiri dari upah atau gaji (W), surplus usaha (S), penyusutan (D) dan pajak tidak langsung/minus subsidi (T).

$$V = \begin{pmatrix} W_1 & W_2 & W_3 \\ S_1 & S_2 & S_3 \end{pmatrix}$$

Dengan misalkan X_j dari masing-masing sektor akan diperoleh koefisien teknologi a_{ij} atau yang disebut dengan koefisien input-output atau koefisien input langsung seperti :

$$z_{ij} = a_{ij}X_j \text{ atau}$$



Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh koefisien a_{ij} tidak lain mencerminkan hubungan antara output sektor-j dengan input sektor-i dan hubungan keduanya sifatnya tetap. Koefisien ini menunjukkan jumlah input sektor-i yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sektor-j. Jika terdapat n sektor di dalam perekonomian, maka diperoleh sebanyak $n \times n$ koefisien a_{ij} .

Seluruh koefisien a_{ij} tersebut jika dinyatakan dalam matriks akan menjadi matriks teknologi sebagai berikut :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Setelah mendapatkan koefisien teknologi a_{ij} dan melalui manipulasi aljabar menghasilkan persamaan :

$$\begin{aligned} X_1 &= a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 + \dots + a_{1n}X_n + Y_1 \\ X_2 &= a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 + \dots + a_{2n}X_n + Y_2 \\ X_n &= a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + a_{n3}X_3 + \dots + a_{nn}X_n + Y_n \end{aligned}$$

atau disederhanakan menjadi :

$$\begin{aligned} (1 - a_{11})X_1 - a_{12}X_2 - a_{13}X_3 - \dots - a_{1n}X_n &= Y_1 \\ -a_{21}X_1 + (1 - a_{22})X_2 - a_{23}X_3 - \dots - a_{2n}X_n &= Y_2 \\ -a_{n1}X_1 - a_{n2}X_2 - a_{n3}X_3 - \dots + (1 - a_{nn})X_n &= Y_n \end{aligned}$$

Sistem persamaan tersebut dapat dituliskan dalam notasi matriks sederhana sebagai berikut :

$$(I - A)X = Y$$

Di mana I adalah matriks identitas yang berukuran $n \times n$, kemudian A adalah matriks koefisien input, sedangkan X dan Y masing-masing menunjukkan vektor kolom matriks output dan permintaan akhir. Jika terdapat perubahan permintaan akhir dalam perekonomian akan ada

perubahan pola pendapatan nasional dan dituliskan:

$$\begin{aligned} X &= (I - A)^{-1} Y \\ &= Ma Y \end{aligned}$$

Matriks Ma adalah $(I - A)^{-1}$ yang dikenal dengan nama matriks invers Leontief. Elemen matriks ini dinotasikan dengan a_{ij} dan mencerminkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap output sektor-sektor di dalam perekonomian. Permintaan akhir tersebut adalah variabel yang eksogen sifatnya. Salah satu komponennya adalah pengeluaran pemerintah yang besarnya sepenuhnya diatur oleh pemerintah itu sendiri. Sementara itu komponen-komponen lain dari permintaan akhir tersebut (konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan dan ekspor) adalah variabel-variabel yang besarnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakannya. Dalam konteks ini maka permintaan akhir dapat menjadi alat kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu dengan target tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, pemerintah dapat memilih instrumen mana yang akan digunakan untuk mendorong permintaan akhir tersebut dan sekaligus juga melihat dampak dari tingkat pertumbuhan tersebut pada output sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian.

5. Keterkaitan Antarsektor dalam Model Input-Output

Model IO dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan sektoral. Dari hasil analisis IO dapat diputuskan sektor-sektor mana saja yang dijadikan sebagai *leading sector* atau sektor pimpinan dalam pembangunan ekonomi. Dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang menjadi pimpinan maka target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai dengan lebih baik. Suatu sektor yang terindikasi

sebagai pimpinan dianggap memiliki kemampuan daya sebar dan kepekaan yang sangat tinggi dalam suatu perekonomian, sehingga efek yang diberikannya bersifat ganda. Di satu sisi sektor tersebut dapat mendorong permintaan agregat (*aggregate demand*) yang lebih tinggi dan di sisi lain dapat meningkatkan penawaran agregat (*aggregate supply*) untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

Adanya penggunaan input antara yang berasal dari output sektor produksi lain dan penggunaan input primer seperti tenaga kerja dan modal membuat suatu sektor produksi menjadi terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Hubungan ini merupakan hubungan saling ketergantungan satu dengan lainnya, di mana output dari suatu sektor produksi merupakan input bagi sektor produksi lainnya. Oleh sebab itu perubahan output suatu sektor produksi akan mempengaruhi output sektor produksi lainnya. Rincian keterkaitan antar sektor produksi ini antara lain keterkaitan langsung ke belakang dan ke depan, daya sebar ke depan dan ke belakang.

Keterkaitan antar sektor merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh *growth pole* dalam perkembangan ekonomi yang lebih mengacu pada suatu sektor yang bisa menyebar dalam berbagai aktivitas sektor produksi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor semacam ini umumnya memiliki ciri-ciri antara lain (Arsyad, 1999) :

- a. Perkembangannya relatif cepat.
- a. Industrinya relatif besar untuk memberikan dampak langsung dan tidak langsung.

- b. Memiliki keterkaitan tinggi antar industri

Model IO dapat digunakan untuk melihat sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi sektor pemimpin dalam pembangunan. Sektor-sektor tersebut dapat dideteksi dengan empat cara, yaitu:

- a. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkage*) dan kaitan ke depan (*forward linkage*) yang relatif tinggi.
- b. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila menghasilkan output bruto yang relatif tinggi, sehingga mampu mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi pula.
- c. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci jika mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
- d. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci jika mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi.

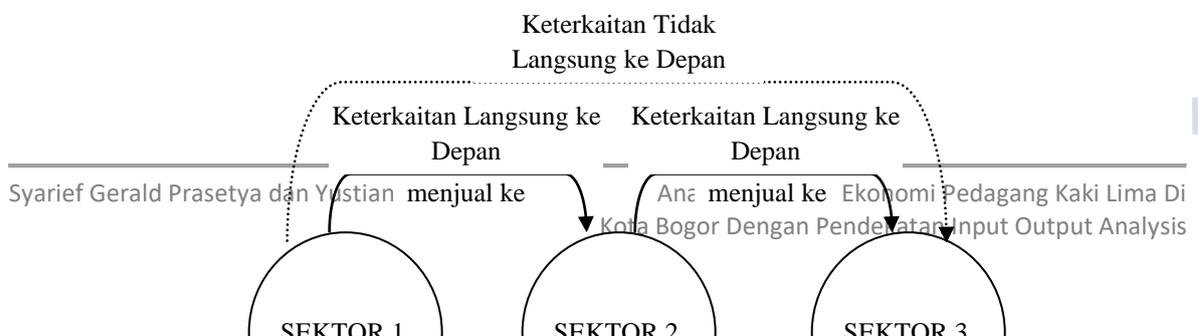
Keterkaitan ke belakang di suatu sektor diperoleh dengan menjumlahkan secara kolom matriks input A dengan formulasi :

$$BL_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ij}}{\sum_{j=1}^n X_j} = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Sedangkan untuk memperoleh keterkaitan ke depan dilakukan dengan cara yang sama, namun penjumlahan dilakukan secara baris dengan formulasi :

$$FL_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ij}}{\sum_{j=1}^n X_j} = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

Alur keterkaitan antar sektor dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Keterkaitan Antar Sektor Dalam Perekonomian

Dimisalkan perekonomian terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor 1, sektor 2 dan sektor 3. Sektor 2 membutuhkan output dari sektor 1 sebagai faktor produksinya, sedangkan sektor 3 membutuhkan input yang berasal dari output sektor 2. Oleh karena sektor 2 membeli output dari sektor 1 dalam proses produksinya, maka dapat dikatakan sektor 2 memiliki keterkaitan ke belakang secara langsung dengan sektor 1. Namun di sisi lain output sektor 2 dijual kepada sektor 3 yang hal ini berarti bahwa sektor 2 memiliki keterkaitan ke depan secara langsung dengan sektor 3. Bagi sektor 3, karena outputnya dibeli oleh sektor 2 sementara sektor 2 membeli output sektor 1 sebagai inputnya, maka dapat dikatakan dari rangkaian keterkaitan ini sektor 3 memiliki keterkaitan ke belakang secara tidak langsung dengan sektor 1. Dengan demikian untuk sektor 1, karena outputnya dijual kepada sektor 2, sementara output sektor 2 dijual kepada sektor 3, maka dapat dikatakan bahwa sektor 1 memiliki keterkaitan ke depan secara tidak langsung dengan sektor 3 (Daryanto dan Yundy, 2010).

Dua jenis ukuran indeks untuk melihat keterkaitan ke depan dan ke belakang dari suatu sektor dalam perekonomian, yaitu melalui kemampuan penyebaran (*power of dispersion*) dan kepekaan penyebaran (*sensitivity of dispersion*). Dengan dua

indeks ini kita dapat melakukan perbandingan besarnya derajat keterkaitan antarsektor, yang nantinya bisa ditentukan sektor-sektor mana saja yang dapat dijadikan sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin dalam pembangunan ekonomi.

6. Model Input-Output Regional

Analisis input-ouput untuk daerah memiliki struktur yang sama dengan struktur analisis input-ouput perekonomian nasional. Input-ouput daerah dengan koefisien regional. Koefisien regional tersebut diperoleh benar-benar dari daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain metode ini membuat tabel IO regional untuk daerah yang dianalisis. Caranya adalah dengan melakukan survai kepada sektor-sektor produksi di daerah tersebut. Dengan demikian diperoleh suatu tabel IO yang memang mencerminkan situasi daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pedagang Kaki Lima Terhadap Perekonomian Kota Bogor

Sektor formal dan informal merupakan penggerak perekonomian di Kota Bogor. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang berbeda bagi perekonomian. Pedagang kaki lima

merupakan salah satu jenis sektor informal yang banyak di Kota Bogor, telah mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Bogor, antara lain mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan, meningkatkan perekonomian (pendapatan) masyarakat kecil, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah dan produk domestik bruto.

Pedagang kaki lima dapat mengurangi pengangguran karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pedagang kaki lima lebih mudah dimasuki oleh para pencari kerja dibandingkan sektor formal. Tenaga kerja dalam sektor ini tidak membutuhkan spesifikasi khusus seperti dalam sektor formal, hanya berbekal kemauan bekerja saja sudah dapat memasuki sektor ini. Selain kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pedagang kaki lima juga memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari kemampuan

pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas di daerah. Melihat fakta tersebut perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa besar kontribusi pedagang kaki lima terhadap perekonomian khususnya dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.

Penelitian ini menggunakan tabel transaksi input-output Kota Bogor sebagai dasar dan telah diagregasi menjadi lima sektor. Untuk mengetahui kontribusi pedagang kaki lima terhadap perekonomian Kota Bogor dilakukan dengan menggunakan analisis input-output dengan dua versi, yaitu analisis input output sebelum menginternalisasikan pedagang kaki lima (IO) dan analisis input-output yang setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima (IO*). Analisis yang tidak menginternalisasikan pedagang kaki lima (IO) ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2. Input-Output 5x5 Sebelum Menginternalkan Pedagang Kaki Lima (dalam miliar rupiah)

Sektor	1	2	3	4	5	180	F	TK
1	6793	3127	735	1	73	10729	804838	815567
2	153037	845908	220928	31690	233525	1485088	2042638	3527726
3	406319	609164	247819	36736	19043	1319081	1887542	3206623
4	30428	249406	74515	516378	73591	944318	790475	1734793
5	130949	79286	40723	193212	237279	681449	182537	863986
190	727526	1786891	584720	778017	563511			
V	88041	1740835	2621903	956776	300475			
X	815567	3527726	3206623	1734793	863986			

Sumber : data diolah

Keterangan :

- 1 = Pertanian, Pertambangan, Pengalihan
- 2 = Industri Pengolahan
- 3 = Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan
- 4 = Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi
- 5 = Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa
- 190 = jumlah biaya antara
- V = nilai tambah bruto
- X = Output = Jmlah biaya antara (190) + Nilai tambah bruto (V)
- 180 = Jumlah permintaan antara
- F = jumlah permintaan akhir
- TK = total konsumsi = permintaan antara (180) + permintaan akhir (F)



Selanjutnya analisis input-output yang menginternalisasikan pedagang kaki lima (IO*) dilakukan dengan menggunakan metode RAS. Tujuan dikembangkan dan digunakan metode ini adalah untuk menghasilkan matriks teknologi pada tahun tertentu dengan menggunakan matriks teknologi yang telah ada, tanpa harus melakukan survai secara detail kembali.

Pada dasarnya RAS adalah sebuah nama rumus matriks di mana R dan S adalah matriks diagonal berukuran $n \times n$ dan A merupakan matriks berukuran $n \times n$ yang menunjukkan banyaknya sektor industri. Jika ingin menaksir elemen matriks A pada periode t (atau A_t) serta diketahui elemen matriks A pada periode $t = 0$ (atau $A(0)$), maka $A(t)$ dapat ditaksir dengan menggunakan formulasi : $A(t) = R.A(0).S$

Elemen matriks A disebut sebagai koefisien teknologi (koefisien input). Tingkat perubahan koefisien teknologi pada dua periode yang berbeda diwakili oleh elemen matriks R dan S. Elemen matriks diagonal R mewakili efek substitusi teknologi yang diukur melalui penambahan jumlah permintaan antara tiap output sektor-sektor industri. Kemudian elemen matriks diagonal S menunjukkan efek perubahan jumlah input pada setiap sektor industri.

Salah satu penyebab digunakannya metode RAS ini disebabkan karena umumnya sektor informal tidak tercatat dalam instrumen pencatatan kegiatan ekonomi. Namun demikian pedagang kaki lima memiliki keterkaitan dengan sektor formal dan memiliki kontribusi terhadap kegiatan ekonomi daerah. Untuk keperluan analisis ini, maka sektor informal terbagi menjadi lima kelompok yang disesuaikan dengan sektor formal, yaitu (1) pertanian, pertambangan dan penggalian, (2) industri pengolahan, (3) listrik, gas, air bersih dan bangunan, (4) perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan (5) keuangan, perbankan dan jasa-jasa.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa pihak yang terkait dan pedagang kaki lima dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima memiliki keterkaitan dengan sektor formal, dimana dari perkiraan diketahui bahwa pedagang kaki lima menyerap 26 persen output sektor formal dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar tiga persen
2. Industri pengolahan sebesar sepuluh persen
3. Listrik, gas, air bersih dan bangunan sebesar lima persen
4. Perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi sebesar empat persen
5. Keuangan, perbankan dan jasa-jasa sebesar empat persen

Nilai di atas dapat dijelaskan bahwa pedagang kaki lima memiliki kontribusi ke output antara sektor pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar 3 persen yang berasal dari 26 persen dikalikan dengan pangsa output antara sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Kegiatan pedagang kaki lima memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan output sektor formal adalah industri pengolahan yaitu sebesar 10 persen. Untuk sektor listrik, gas, air bersih bangunan pedagang kaki lima memberikan kontribusi sebesar lima persen terhadap penyerapan sektor formal. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, perbankan dan jasa-jasa masing-masing memberikan kontribusi terhadap penyerapan output sektor formal sebesar empat persen.

Sebagian output yang dihasilkan oleh sektor informal ada yang langsung dikonsumsi tetapi ada juga digunakan sebagai bahan dasar untuk sektor formal. Kontribusi output sektor informal sebagai barang akhir (*final demand*) umumnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai output sektor formal. Perkiraan kontribusi output kegiatan sektor informal terhadap

total barang/permintaan akhir adalah sebesar 22 persen, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar persen persen
2. Industri pengolahan sebesar sembilan persen
3. Listrik, gas, air bersih dan bangunan sebesar empat persen
4. Perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi sebesar tiga persen
5. Keuangan, perbankan dan jasa-jasa sebesar tiga persen

Selain menggunakan output dari sektor formal, pedagang kaki lima juga memberikan dampak yang positif bagi sektor formal berupa penyediaan input bagi proses produksi sektor formal. Diperkirakan sektor informal memberikan kontribusi dalam

menyediakan input bagi sektor formal sebesar 25 persen dengan rincian:

1. Pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar tiga persen
2. Industri pengolahan sebesar sebelas persen
3. Listrik, gas, air bersih dan bangunan sebesar tiga persen
4. Perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi sebesar empat persen
5. Keuangan, perbankan dan jasa-jasa sebesar empat persen

Dari perkiraan prosentase kontribusi pedagang kaki lima terhadap output antara, total output dan total biaya input antara di atas serta dengan mengaplikasikan metode RAS, diperoleh tabel input-ouput setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima sebagai berikut :

Tabel 3. Input-Output 5x5 Setelah Menginternalkan Pedagang Kaki Lima (dalam triliun rupiah)

Sektor	1	2	3	4	5	180	F	TK
1	7009,79	3501,33	1115,38	1,05	78,09	11705,66	828328,35	840034,01
2	150247,8	901147,04	318973,8	3168973,6	237698,47	1639754,72	2223335,5	3863090,5
3	428211	696603,78	384076,7	39431,02	20806,90	1569129,43	2034729,6	3603859,1
4	31159,47	277130,55	112215,5	538567,17	781130,87	1037203,59	757413,37	1794616,9
5	132723,7	87197,41	60698,59	199450,83	249337,08	729407,60	166133,09	895540,69
190	749351,78	1965580,1	877080,0	809137,86	586051,44			
V	90682,23	1897510,1	2726779,1	985479,28	309489,25			
X	840034,01	3863090,5	3603859,1	1794616,9	895540,69			

Sumber : pengolahan data

Keterangan :

- 1 = Pertanian, Pertambangan, Penggalian
- 2 = Industri Pengolahan
- 3 = Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan
- 4 = Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi
- 5 = Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa
- 190 = jumlah biaya antara
- V = nilai tambah bruto
- X = Output = Jmlah biaya antara (190) + Nilai tambah bruto (V)
- 180 = Jumlah permintaan antara
- F = jumlah permintaan akhir
- TK = total konsumsi = permintaan antara (180) + permintaan akhir (F)

Analisis model input-output pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh sektor-sektor industri formal terhadap perekonomian suatu negara. Di mana pengaruh ini dapat dilihat dari nilai output yang dihasilkan oleh sektor

tersebut. Namun dengan menginternalisasikan pedagang kaki lima ke dalam model input output akan dapat diketahui pula pengaruh pedagang kaki lima terhadap perekonomian Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat dari analisa

input-output dengan membandingkan kinerja perekonomian hasil perhitungan tabel input-output sebelum menginternalkan pedagang kaki lima (IO) dengan tabel input-output yang telah menginternalkan pedagang kaki lima (IO*). Indikator kinerja perekonomian secara makro meliputi angka pengganda output (*output multiplier*), angka pengganda pendapatan (*income multiplier*), angka pengganda tenaga kerja (*employee multiplier*) dan keterikatan antar sektor (*linkages*) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Pengganda Output (*Output Multiplier*)

Efek pengganda suatu sektor dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peningkatan permintaan akhir (*final demand*) pada suatu sektor akan meningkatkan output sektor itu sendiri dan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Peningkatan output

terhadap sektor-sektor lain dapat terjadi akibat adanya efek langsung dan efek tidak langsung (hubungan teknis antar sektor) dari peningkatan permintaan akhir. Besarnya kelipatan perubahan output akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor inilah yang disebut dengan angka pengganda output. Oleh sebab itu angka pengganda output suatu sektor dapat diartikan sebagai nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian yang tercipta akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir.

Besarnya angka pengganda output untuk sektor ke-n di dalam perekonomian dihitung dari penjumlahan kolom ke-n dari matriks kebalikan Leontief untuk perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan hasil perhitungan input-output diperoleh angka pengganda output disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Angka Pengganda Output

No.	Sektor	Sebelum Menginternalisasi PKL (IO)	Setelah Menginternalisasi PKL (IO*)	Perubahan (persen)
1.	Pertanian, Pertambangan, Penggalian	11,972	12,578	5,064
2.	Industri Pengolahan	25,485	27,056	6,162
3.	Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan	1,172	1,243	6,054
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi	1,725	1,740	0,854
5.	Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa	1,952	1,988	1,867

Sumber : pengolahan data

Interpretasi angka pengganda output tersebut dimisalkan pada pedagang kaki lima pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, di mana perubahan angka pengganda output setelah menginternalkan pedagang kaki lima adalah sebesar 5,064 yang menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu rupiah (Rp 1,00,-) permintaan akhir pada pedagang kaki lima pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian akan menyebabkan kenaikan total output

perekonomian Kota Bogor sebesar Rp. 5,064,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan kaki lima di setiap sektor memberikan kontribusi atau pengaruh positif bagi total output perekonomian Kota Bogor.

Dalam analisis tersebut terlihat bahwa perubahan terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 6,162 yang mengartikan bahwa permintaan akhir pedagang kaki lima pada sektor industri pengolahan memberikan kenaikan total output

perekonomian Kota Bogor yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pedagang kaki lima pada sektor ini memiliki kontribusi yang paling besar terhadap output perekonomian Kota Bogor. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh pedagang kaki lima pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0,854.

2. Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)

Selain meningkatkan jumlah output, perubahan permintaan akhir suatu sektor juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat atau rumah tangga. Besarnya pelipatgandaan (*multiplier*) peningkatan ini dapat dilihat dari angka pengganda pendapatan. Oleh sebab itu yang disebut dengan angka pengganda pendapatan adalah perubahan pendapatan rumah tangga total yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit permintaan akhir di

suatu sektor. Angka pengganda pendapatan ini disebut sebagai peningkatan permintaan akhir dalam bentuk pendapatan rumah tangga.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika terdapat perubahan permintaan akhir, maka akan terjadi pula perubahan output yang diproduksi oleh setiap sektor produksi yang terkait dalam perekonomian (dalam hal ini ditunjukkan oleh angka pengganda output). Perubahan jumlah output yang diproduksi tersebut kemudian akan mengubah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja yang digunakan akan mendapatkan balas jasa. Karena balas jasa tenaga kerja tersebut merupakan sumber pendapatan rumah tangga dalam bentuk upah atau gaji, maka perubahan permintaan tenaga kerja sudah pasti akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Untuk melihat angka pengganda dari hasil analisis input-output akan dijelaskan oleh tabel berikut ini:

Tabel 5. Angka Pengganda Pendapatan

No.	Sektor	Sebelum Menginternalisasi PKL (IO)	Sesudah Menginternalisasi PKL (IO*)	Perubahan (persen)
1.	Pertanian, Pertambangan, Penggalan	33,686	35,301	4,793
2.	Industri Pengolahan	3,363	3,483	3,566
3.	Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan	1,245	1,342	7,838
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi	1,719	1,732	0,715
5.	Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa	1,977	2,006	1,436

Sumber : pengolahan data

Interpretasi angka pengganda pendapatan dapat dimisalkan pada pedagang kaki lima pada industri pertanian, pertambangan dan penggalan, di mana perubahan angka pengganda pendapatan setelah menginternalkan pedagang kaki lima adalah sebesar 4,793 yang menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu rupiah (Rp 1,00,-) permintaan akhir pada pedagang kaki lima pada sektor pertanian,

pertambangan dan penggalan akan menyebabkan kenaikan total pendapatan rumah tangga secara agregat dalam perekonomian Kota Bogor sebesar Rp 4,793,-. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima pada setiap sektor ekonomi memiliki pengaruh dan kontribusi yang positif terhadap pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis juga terlihat bahwa perubahan terbesar setelah

menginternalisasikan pedagang kaki lima terjadi pada sektor listrik, gas, air bersih dan bangunan, yaitu sebesar 7,838 yang mengartikan bahwa permintaan akhir pedagang kaki lima pada sektor ini memberikan kenaikan total pendapatan rumah tangga dalam perekonomian Kota Bogor yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pedagang kaki lima pada sektor ini memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan rumah tangga di Kota Bogor. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh pedagang kaki lima pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0,715.

3. Angka Pengganda Kesempatan Kerja (*Employment Multiplier*)

Efek lain adanya peningkatan permintaan akhir adalah perubahan kesempatan kerja sebagai akibat adanya peningkatan produksi. Besarnya efek

tersebut dapat diperhitungkan dari angka pengganda kesempatan kerja. Angka pengganda kesempatan kerja merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan dalam perekonomian akibat adanya satu unit perubahan permintaan akhir di suatu sektor.

Untuk dapat mengetahui efek dari satu unit perubahan permintaan akhir di suatu sektor produksi terhadap perubahan lapangan pekerjaan di seluruh perekonomian diperlukan jumlah lapangan pekerjaan awal atau jumlah tenaga kerja awal pada masing-masing sektor produksi yang memang telah digunakan untuk melakukan proses produksi selama ini. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung berapa kontribusi setiap pekerja, secara rata-rata dalam memproduksi output sektornya masing-masing. Tabel yang menunjukkan angka pengganda kesempatan kerja akan disajikan di bawah ini :

Tabel 6. Angka Pengganda Tenaga Kerja

No.	Sektor	Sebelum Menginternalisasi PKL (IO)	Sesudah Menginternalisasi PKL (IO*)	Perubahan (persen)
1.	Pertanian, Pertambangan, Penggalian	29,436	30,795	4,617
2.	Industri Pengolahan	2,352	2,412	2,521
3.	Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan	1,258	1,359	8,037
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi	1,728	1,740	0,713
5.	Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa	2,236	2,267	1,367

Sumber : pengolahan data

Interpretasi angka pengganda kesempatan kerja dapat dimisalkan pada sektor informal pada industri pengolahan, di mana perubahan angka pengganda pendapatan setelah menginternalkan pedagang kaki lima adalah sebesar 4,617 yang menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu rupiah (Rp 1,00,-) permintaan akhir pada pedagang kaki lima pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian menyebabkan kenaikan

kesempatan kerja dalam perekonomian Kota Bogor sebanyak 4,617 orang. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima di setiap sektor memiliki pengaruh dan kontribusi positif bagi kesempatan kerja dalam perekonomian Kota Bogor.

Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa perubahan terbesar setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima terjadi pada sektor listrik, gas, air

bersih dan bangunan, yaitu sebesar 8,037 yang mengartikan bahwa permintaan akhir pedagang kaki lima pada sektor listrik, gas, air bersih dan bangunan memberikan kenaikan atau penambahan kesempatan kerja pada perekonomian Kota Bogor yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pedagang kaki lima pada sektor ini memiliki kontribusi yang paling besar terhadap perubahan kesempatan kerja di Kota Bogor. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh pedagang kaki lima pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0,713.

2.3 Keterikatan Antara Sektor (*Linkages*)

Selain digunakan untuk mengetahui angka pengganda (*multiplier*) analisis input-output juga dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor-sektor, yang dalam hal ini digunakan untuk melihat dampak dari output suatu sektor terhadap sektor yang lainnya. Dampak dari satu sektor terhadap sektor lainnya menunjukkan bahwa setiap sektor akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu pula dengan analisis keterkaitan antar sektor-sektor ini dapat juga digunakan untuk menentukan sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan atau sektor kunci dalam suatu perekonomian. Di mana sektor yang memiliki keterkaitan paling tinggi berarti memiliki potensi menghasilkan output produksi yang tinggi pula.

Sektor dengan angka keterkaitan tinggi pada umumnya akan menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga dan tambahan lapangan pekerjaan tertinggi yang hal ini dapat diketahui dari mengkonversi output ke pendapatan rumah tangga dan angka pengganda kesempatan kerja. Keterkaitan antar sektor-sektor dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*).

Asumsi dalam analisis ini adalah bahwa dengan adanya peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya. Dimisalkan jika terjadi peningkatan output sektor-i akan menyebabkan meningkatnya permintaan input sektor-i. Input sektor-i tadi ada yang berasal dari sektor-i sendiri dan ada pula yang berasal dari sektor lain (misalkan sektor-j). Oleh sebab itu sektor ini akan meminta output sektor-j lebih banyak daripada sebelumnya untuk dijadikan input guna melakukan proses produksi, yang berarti di sini menunjukkan bahwa sektor-j harus melakukan peningkatan jumlah output. Peningkatan jumlah output sektor-j selanjutnya akan meningkatkan permintaan input sektor-j itu sendiri, yang berarti pula harus ada peningkatan output sektor-j sektor lainnya. Kondisi ini akan berlangsung seterusnya, di mana akan terjadi keterkaitan antar sektor-sektor industri tersebut dalam suatu perekonomian. Keterkaitan antar sektor-sektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke belakang. Hal ini disebabkan karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input produksi.

Jika output sektor-i mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh peningkatan permintaan akhir sektor-i, maka akan terjadi peningkatan input produksi sektor-i secara langsung. Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan penggunaan input adalah peningkatan output karena total input yang digunakan adalah sama dengan total output yang dihasilkan. Misalnya jika terjadi peningkatan satu unit uang sektor pertanian, akan meningkatkan pula pertumbuhan industri-industri lain yang merupakan input sektor pertanian, seperti industri pupuk, benih pertanian, alat-alat pertanian dan lain sebagainya.

2. Keterkaitan ke depan (*forward linkages*)

Keterkaitan ke depan dilakukan dengan cara menghitung total output yang tercipta akibat dari meningkatnya

output suatu sektor industri melalui mekanisme distribusi output dalam perekonomian. Misalkan terjadi peningkatan output sektor-i, maka tambahan output tersebut akan didistribusikan ke sektor-sektor produksi lain di dalam perekonomian tersebut (termasuk sektor-i itu sendiri). Oleh sebab itu jika terjadi peningkatan satu unit output sektor-i, akan menyebabkan peningkatan output total dalam perekonomian melalui mekanisme output.

Peningkatan yang terjadi tidak hanya di satu sektor saja, hal ini dapat pula berdampak pula secara tidak langsung terhadap peningkatan output sektor lainnya lagi. Jika diketahui nilai keterkaitan ke belakang secara langsung dan keterkaitan totalnya, maka akan diperoleh nilai keterkaitan ke

belakang secara tidak langsung yang besarnya adalah selisih antara kedua nilai keterkaitan tersebut.

Dengan kata lain keterkaitan ke depan menunjukkan peningkatan produksi suatu sektor (misalkan sektor-i), akan mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor yang mempergunakan produk (output) dari sektor-i tersebut. Misalkan dengan meningkatnya sektor pengolahan (produk karet), akan meningkatkan pertumbuhan industri lainnya seperti industri sandal sepatu, industri ban dan lain sebagainya.

Nilai keterkaitan antar sektor-sektor ke belakang dan ke depan berdasarkan analisis sebelum dan setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima dalam perekonomian Kota Bogor dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Keterkaitan Antar Sektor-sektor

Sektor	Keterkaitan Sebelum Menginternalisasi PKL (IO)		Keterkaitan Sesudah Menginternalisasi PKL (IO*)		Perubahan (persen)	
	<i>Backward</i>	<i>Forward</i>	<i>Backward</i>	<i>Forward</i>	<i>Backward</i>	<i>Forward</i>
1.	1,251	0,514	1,252	0,501	0,011	-2,371
2.	0,944	1,289	0,936	1,276	-0,869	-1,062
3.	0,662	1,118	0,703	1,151	6,212	2,957
4.	0,956	1,043	0,940	1,045	-1,692	0,183
5.	1,185	1,034	1,168	1,025	-1,424	-0,879

Sumber : pengolahan data

Keterangan :

- 1 = Pertanian, Pertambangan, Penggalian
- 2 = Industri Pengolahan
- 3 = Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan
- 4 = Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi
- 5 = Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa

Keterkaitan kebelakang atau disebut juga daya penyebaran menunjukkan besarnya output domestik yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan 1 unit permintaan akhir dari suatu sektor tertentu. Semakin tinggi keterkaitan ke belakang suatu sektor berarti semakin tinggi kemampuan sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi indeks daya penyebaran (IBIj) suatu sektor ekonomi akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut

terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yang berarti pula bahwa keterkaitan/ketergantungan sektor tersebut terhadap sektor lainnya cukup besar.

Keterkaitan kedepan (*forward linkage*) atau derajat kepekaan suatu sektor menunjukkan keterkaitan antar-sektor yang dilihat dari besarnya output yang dihasilkan oleh suatu sektor sebagai akibat dari peningkatan permintaan akhir seluruh sektor ekonomi. Keterkaitan antar-sektor ini disebut dengan. Indeks

derajat kepekaan (IFLj) merupakan ukuran total dampak terhadap output suatu sektor akibat penggunaan output sektor tersebut oleh sektor lainnya sebagai input. Semakin tinggi nilai indeks derajat berarti semakin tinggi pula daya kepekaan sektor tersebut karena pertumbuhan sektor-sektor lain yang menggunakan sektor tersebut untuk proses produksinya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui untuk keterkaitan ke belakang sektor pertanian, pertambangan dan penggalian memiliki IBLj yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 1,251. Kemudian setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima, sektor ini juga masih memiliki nilai IBLj yang paling besar dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 1,252. Namun demikian sektor ini bukan merupakan sektor unggulan di Kota Bogor, karena untuk menjadi sektor unggulan disyaratkan memiliki nilai IBLj dan IFLj yang paling besar di bandingkan dengan sektor lainnya. Dari hasil analisis keterkaitan kebelakang diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai IFLj paling besar adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 1,289. Kemudian setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima sektor industri pengolahan masih menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 1,279.

Nilai perubahan keterkaitan ke belakang atau pun ke depan setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima ada positif (meningkat) dan ada pula yang negatif (menurun). Nilai perubahan positif mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima telah mampu meningkatkan keterkaitan, baik ke belakang maupun ke depan terhadap sektor-sektor di Kota Bogor. Kondisi ini terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, air bersih dan bangunan untuk keterkaitan ke belakang. Sedangkan untuk keterkaitan ke depan terjadi pada sektor listrik, gas,

air bersih dan bangunan serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi.

Nilai keterkaitan untuk sektor listrik, gas, air minum dan bangunan setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima memiliki nilai positif, baik ke belakang maupun ke depan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pedagang kaki lima telah mampu meningkatkan keterkaitan sektor ini baik ke belakang maupun ke depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keberadaan pedagang kaki lima perkotaan tidak dapat dipandang sebagai sektor yang marginal, pedagang kaki lima memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian perkotaan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Keberadaan kaki lima di setiap sektor memberikan kontribusi atau pengaruh positif bagi total output perekonomian Kota Bogor. Perubahan terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 6,162 Sedangkan kontribusi terendah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,854.
2. Pedangan kaki lima pada setiap sektor ekonomi memiliki pengaruh dan kontribusi yang positif terhadap pendapatan rumah tangga. Perubahan terbesar setelah menginternalisasikan pedagang kaki lima terjadi pada sektor listrik, gas, air bersih dan bangunan, yaitu sebesar 7,838. Kontribusi terendah diberikan oleh pedagang kaki lima pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,715.
3. Keberadaan pedagang kaki lima di setiap sektor memberikan kontribusi atau pengaruh positif bagi total penyerapan tenaga kerja Kota Bogor. Perubahan terbesar setelah

mengeinternalisasikan pedagang kaki lima terjadi pada sektor listrik, gas, air bersih dan bangunan sebesar 8,037. kontribusi terendah diberikan oleh pedagang kaki lima pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0,713.

4. Keterkaitan ke belakang sektor pertanian, pertambangan dan penggalian memiliki IBLj yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Keterkaitan kebelakang diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai IFLj paling besar adalah sektor industri pengolahan.

Keterbatasan Penelitian

1. Dikarena setiap daerah tidak mengupdate secara periodik/tidak membuat tabel transaksi input output disebabkan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang relatif lama, dalam penelitian ini menggunakan tabel transaksi input output Kota Bogor tahun 2010.
2. Dikarenakan sel-sel pada tabel transaksi IO Kota Bogor tidak terisi secara lengkap sehingga dimungkinkan adanya misdate, dilakukan agregasi pada tabel transaksi input output Kota Bogor tahun 2010 menjadi lima sektor.
3. Informasi kontribusi pedagang kaki lima terhadap sektor-sektor perekonomian menggunakan teknik *judgment* kepada para pihak yang terkait, untuk kedepan disarankan untuk melakukan penelitian dengan survei pada sektor-sektor perekonomian.

Saran

1. Penataan dan pendataan pedagang kaki lima di Kota Bogor perlu dilakukan secara periodik agar dapat diketahui potensi ekonomi, tidak mengganggu *landscap* dan peruntukan fasilitas umum kota.

2. Perlunya pembentukan assosiasi pedagang kaki lima agar dapat lebih mudah dalam pengawasan dan upaya peningkatan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Jennifer dan Paul, A. 1991. <http://www.jstor.org/pss/2803879>.
- Arief, S. 1993. Metode Penelitian Ekonomi. LPFE-UI : Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE : Jogjakarta.
- Artina Vita Ningrum. 2015. Peran Sektor Informal Dalam Perekonomian Indonesia. Universitas Diponegoro; Semarang
- Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Tenaga Kerja Nasional. Jakarta.
- _____. 2013. Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas). Jakarta.
- _____. 2016. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009. Jakarta.
- _____. 2010. Data dan Metodologi Untuk Kajian Sektor Informal di Indonesia. Jakarta.
- Bappenas. 2009. Kajian Evaluasi Pembangunan Nasional, Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan. Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta.
- _____. 2010. Kajian Penyusunan Stretagi Penanggulangan Kemiskinan Pada Sektor Informal. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Bappenas.
- Bernabe, Sabine. 2002. *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework, Centre Analysis of Social Exclusion*. London School of Economics : London.
- Cuevas, S.et.all. 2008. *Informal Employment in Indonesia*, ADB.

- Daryanto, A dan Yundy, H. 2010. Analisis Input Output dan *Social Accounting Matrix* Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. IPB Press : Bogor.
- Effendi, T., Noer. 1996. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Tiara Wacana : Jogjakarta.
- Firnandy. 2002. Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan. Direktorat Ketenagakerja dan Analisis Ekonomi : Jakarta.
- Manning, C. dan Effendi, T., N . 1993. Sektor Informal. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Ihsan dan Kharisma Susetyo. 2013. Pengaruh Sektor Informal Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja di Jakarta. UIN Syarif Hidayattullah : Jakarta.
- Mus Mualim dan Bin Raudha A H. 2009. Menata Sektor Informal di Perkotaan. Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya : Malang.
- Prasetya, S.,G.2016. *The Roles of Syariah Micro Finance Institution (LKSM) in Eliminating The Poverty in Indonesia (Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil)*. The Accounting Journal of Binaniaga. Vol 01.No.2.
- Rachbini, D., J dan A. Hamid. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi Gelombang Kedua. LP3ES : Jakarta.
- _____. 2000, *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Garfindo Persada : Jakarta.
- Retno Widjajanti, 2012. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang). Universitas Diponegoro : Semarang
- Winarso H dan Gede B. 2008. Sektor Informal yang Terorganisasi : Menata Kota Untuk Sektor Informal. Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung : Bandung.



PEDOMAN PENULISAN

JURNAL MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **SIFAT NASKAH.** Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Naskah tersebut harus sesuai dengan tema Manajemen Pembangunan Daerah.
2. **BENTUK NASKAH.** Naskah diketik dengan MS Word (min versi 2003), font Time New Roman (10), 1.5 (satu setengah) spasi dan abstrak 1 (satu) spasi. Panjang naskah maksimum 20 halaman termasuk tabel, gambar, perhitungan dan literatur. Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut: Judul Naskah, Nama penulis, nama dan alamat instansi (Pos maupun E-mail), abstrak dan kata kunci dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan implikasi kebijakan, daftar pustaka dan lampiran (jika ada).
3. **BAHASA.** Naskah harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. Untuk naskah bahasa Indonesia pemakaian istilah-istilah asing sebaiknya dikurangi/disesuaikan dengan pedoman bahasa Indonesia.
4. **JUDUL NASKAH.** Judul harus mencerminkan isi naskah.
5. **ABSTRAK.** Abstrak harus mencakup tujuan, metode, lokasi, hasil utama dan implikasi kebijakan dengan maksimum 200 kata dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia).
6. **TABEL.** Tabel diberi judul singkat, jelas dan diikuti keterangan tempat dan waktu cakupan data. Jumlah digit yang dipergunakan untuk parameter estimasi dapat mencapai 4 (empat) digit dibelakang koma, sedangkan untuk parameter lain 2 (dua) digit dibelakang koma. Penggunaan titik (.) pada bilangan ribuan dan koma (,) pada decimal.
7. **GAMBAR DAN GRAFIK.** Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan direduksi antara 50-60 persen dari gambar dan grafik asli. Judul gambar dan grafik diletakkan dibawahnya tanpa mempengaruhi bagian gambar atau grafik.
8. **SATUAN PENGUKURAN.** Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik misalnya cm, kg, l, ha dan lain sebagainya.
9. **DAFTAR PUSTAKA.** Kutipan pustaka di dalam teks harus ada di dalam daftar pustaka dan disusun sesuai abjad dengan urutan nama pengarang, tahun, judul karangan, nama majalah/buku/jurnal/publikasi, penerbit dan halaman.
10. **PENYERAHAN NASKAH.** Diserahkan ke alamat redaksi rangkap 4 (empat) bersama cd/dvd yang berisikan naskah tulisan.
11. **WAKTU PENERBITAN.** Jurnal MPD akan diterbitkan dua nomor dalam satu volume, satu volume merupakan satu tahun penerbitan.



Program Studi
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Wing 5 Level 4, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
Telp/Fax: 0251-8629342. Mobile: 085218426205
Website: <http://mpd.ipb.ac.id/>, email: mpdipb@hotmail.com

